

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP CONCURSUS REALIS PADA
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DAN PENCURIAN
(Studi Kasus: Putusan Pengadilan No.87/Pid.B/2015/PN.PKJ)**



**OLEH
YOGI PRATAMA
B111 13 397**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2017**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP CONCURSUS REALIS PADA
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DAN PENCURIAN
(Studi Kasus: Putusan Pengadilan No.87/Pid.B/2015/PN.PKJ)**

OLEH:

**YOGI PRATAMA
B111 13 397**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
Pada Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2017

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP CONCURSUS REALIS PADA
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DAN PENCURIAN
(Studi Kasus: Putusan Pengadilan No.87/Pid.B/2015/PN.PKJ)**

Disusun dan diajukan oleh

**YOGI PRATAMA
B111 13 397**

Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Rabu 8 Februari 2017
Dan Dinyatakan Diterima

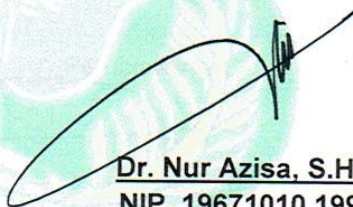
Panitia Ujian

Ketua,



Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S.
NIP. 19590317 198703 1 002

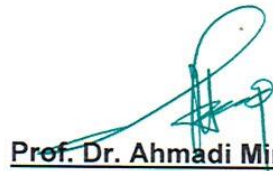
Sekretaris,



Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.
NIP. 19671010 199202 2 002

An. Dekan

**· Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Pengembangan**



Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.
NIP : 19610607 198601 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Yogi Pratama

Nomor Pokok : B111 13 397

Bagian : Hukum Pidana

Judu Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Concursus Pada Tindak
Pidana Pembunuhan Dan Pencurian (Studi Kasus
Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene No.
87/Pid.B/2015/PN.PKJ).

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi di Fakultas
Hukum Universitas Hasanuddin.

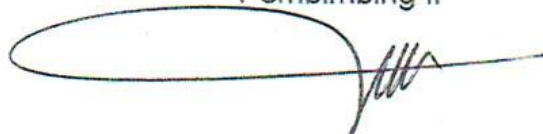
Makassar, Januari 2017

Pembimbing I



Prof. Dr. Muhadar, SH., MS
NIP. 19590317 198703 1 002

Pembimbing II



Dr. Nur Azisa, SH., MH.
NIP. 19671010 199202 2 002



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar 90245 Telp/Fax : (0411)584686,587219, E-mail:hukum@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUPH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : YOGI PRATAMA
Nomor Pokok : B11113397
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Concursus pada Tindak Pidana
Pembunuhan dan Pencurian (Studi Kasus Putusan Pengadilan
Negeri Pangkajene No.87/Pid.B/2015/PN.PKJ)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Januari 2017

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan,

Prof. Dr. Ahmadi Miru,SH.,MH
NIP. 19610607 198601 1 003

ABSTRAK

YOGI PRATAMA, B111 13 397, dengan judul skripsi “Tinjauan Yuridis Terhadap Concursus Realis Pada Tindak Pidana Pembunuhan dan Pencurian”. Dibimbing oleh bapak **Muhadar**, selaku pembimbing I dan Ibu **Nur Azisa**, selaku pembimbing II. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus dengan nomor register perkara 87/Pid.B/2015/PN.PKJ.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Adapun yang menjadi lokasi penelitian adalah Pengadilan Negeri Pangkajene. Penulisan ini dilakukan dengan melakukan studi lapangan dengan melakukan wawancara-wawancara terhadap majelis hakim yang menangani perkara tersebut sekaligus mendapatkan dokumen-dokumen atau data terkait dengan masalah dalam tulisan penulis. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan topik yang diajukan. Pendekatan kedua adalah dengan memaparkan secara deskriptif berbagai hasil wawancara lalu melakukan analisis terhadap data tersebut.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pro-kontra atau perbedaan pandangan terhadap majelis hakim dan penuntut umum dalam melihat kasus ini. Dalam putusannya, hakim melihat perkara ini sebagai suatu tindak pidana tunggal yang terjadi yaitu tindak pidana pembunuhan karena tindak pidana pencurian yang terjadi tidak dapat dibuktikan secara jelas dengan kurangnya bukti atau fakta-fakta yang menguatkan terpenuhinya unsur-unsur pada tindak pidana pencurian. Majelis Hakim membenarkan bahwa barang milik korban berada dalam penguasaan terdakwa, tetapi hal tersebut tidak serta-merta dapat dikatakan sebagai tindak pidana pencurian, karena esensi dari perbuatan mencuri adalah harus dibuktikan ada perbuatan “mengambil” barang dengan maksud untuk memiliki sebagian atau seluruhnya. Dalam konteks ini, tidak ada keterangan yang menguatkan bagaimana proses berpindahnya atau beralihnya barang milik korban, apakah secara melawan hukum atau tidak. Sedangkan penuntut umum melihat hal ini secara berbeda. Penuntut umum meyakini bahwa telah terjadi perbarengan atau gabungan tindak pidana (*concurso*). Maka dari itu, penuntut umum mendakwakan terdakwa dengan pasal 339 KUHP yang pada pokoknya menerangkan bahwa tindak pidana pembunuhan yang didahului, diikuti, atau disertai dengan tindak pidana lain. Tetapi, majelis hakim memiliki pandangan tersendiri dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa yaitu mengabulkan dakwaan subsidair dari penuntut umum yaitu Pasal 338 KUHP yang merupakan tindak pidana pembunuhan biasa.

Kata Kunci: Tinjauan Yuridis Terhadap Concursus Realis Pada Tindak Pidana Pembunuhan dan Pencurian.

ABSTRACT

YOGI PRATAMA, B111 13 397, with the title of the thesis "Judicial Review Concursus Realis On Crime Against Murder and Theft". Supervised by **Muhadar, SH as a mentor I** and **Nur Azisa, as a mentor II**. This study aims to determine the application of substantive criminal law and the legal considerations of judges in decisions on a case by case registration number 87 / Pid.B / 2015 / PN.PKJ. This Research has do in Pangkajene Islands Regency. As for the location of the research is Pangkajene District Court. The writing is done by conducting field studies conducted interviews with the judges who handled the case and obtain documents or data related to the problem in writing the author. Interviews were conducted by asking questions that are relevant to the topic proposed. The second approach is to explain in descriptive various interviews and an analysis of the data. The results of this study indicate that the pros and cons or inconsistent with the judges and public prosecutors in view of this case. In its verdict, the judge saw this case as a single criminal offense occurred, ie the crime of murder for the crime of theft that occurred can not be clearly evidenced by the lack of evidence or facts that corroborate the fulfillment of the elements of the crime of theft. The judges confirmed that the victims' belongings in the possession of the accused, but it does not necessarily be regarded as a criminal act of theft, because the essence of the act of stealing is to be proved no deed "take out" the goods with the intent to have partially or completely. In this context, no information corroborating how the process of migration or transfer of property of the victim, whether unlawful or not. While prosecutors see it differently. The public prosecutor believes that there has been a criminal offense or a combination perbarengan (concursus). Therefore, prosecutors accuse the defendant with Article 339 Penal Code which basically explains that the crime of murder is preceded, followed, or accompanied by other crimes. However, the panel of judges has its own views in a verdict against the accused are granted the subsidiary charge of the prosecution, namely Article 338 of the Penal Code which is a criminal offense of manslaughter.

Keywords: Judicial Review Concursus Realis On Crime Against Murder and Theft.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah, puja dan puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat merampungkan penulisan dan penyusunan karya tulis ilmiah ini dalam bentuk skripsi yang berjudul *“Tinjauan Yuridis Terhadap Concursus Realis Pada Tindak Pidana Pembunuhan dan Pencurian. (Studi Kasus: Putusan Pengadilan No.87/Pid.B/2015/PN.PKJ)”*.

Shalawat serta salam juga terhaturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Sang khalifah dan rahmat bagi semesta alam. Pertama-tama, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang terdalam dan tak terhingga kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda **Ir.Zainal Parenrengi** dan Ibunda **Hj. Hairunnisa, S.E.** atas segala kasih sayang, cinta kasih, serta doa dan dukungannya yang tiada henti, sehingga penulis dapat sampai di saat-saat yang membahagiakan ini. Begitu juga kepada kedua adik penulis, **Nurul Adila** dan **Muhammad Aqsha Afilla** atas dukungannya, yang secara tidak langsung telah menjadi motivator bagi penulis untuk terus bergerak maju dalam menggapai cita-cita. Terima kasih untuk kekasihku Tercinta dan Tersayang, **Dhea Azzahrah Djohan, S.H.** Sumber utama motivasi dan penyemangat penulis dalam menyelesaikan masa studi. Terima kasih atas segala perhatian dan kasih sayang yang selalu tercuruhkan dalam diri penulis. Terima kasih karena

telah menjadi teman terbaik selama ini dan selalu mendampingi penulis dari tahap awal hingga saat ini. Terima kasih atas segala bentuk krtikan dan saran dalam penyusunan skripsi ini.

Terima kasih atas semuanya dan semoga Allah SWT senantiasa menjaga dan melindungi mereka. Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan berkat dorongan semangat, tenaga, pikiran serta bimbingan dari berbagai pihak yang penulis hargai dan syukuri. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, M.A., selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta jajarannya
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta jajarannya.
3. Bapak Prof. Muhadar, S.H., M.S., selaku Pembimbing I dan Ibu Nur Azisa, S.H., M.H., selaku Pembimbing II. Di tengah kesibukan dan aktifitasnya, beliau tak bosan-bosannya menyempatkan waktu, tenaga serta pikirannya membimbing penulis dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini.
4. Bapak Prof. Dr. H.M. Said Karim, S.H., M.H, M.Si., selaku Penguji I, Ibu Dr. Haeranah, S.H., M.H., selaku Penguji II, dan Bapak Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H., selaku Penguji III, terima kasih atas kesediannya menjadi penguji bagi penulis, serta segala masukan dan sarannya dalam skripsi ini.

5. Ketua dan Sekretaris Departemen Hukum Pidana, beserta jajarannya dan segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Seluruh Staf Akademik dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak membimbing dan membantu penulis selama berada di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Kakanda dan Adinda, Legitimasi (2010), Mediasi (2011), Petitum (2012), Diplomasi (2014), Juris (2015), dan Makar (2016).
8. Rekan-rekan Angkatan Aktualisasi Solidaritas Mahasiswa yang Adil dan Solutif (ASAS 2013).
9. Keluarga Besar UKM Sepak Bola Fakultas Hukum Unhas yang penulis telah anggap sebagai rumah sendiri.
10. Keluarga Besar UKM Asian Law Student Association (ALSA) Local Capter Unhas yang merupakan wadah bagi penulis untuk memperdalam pengetahuan dan pengalaman dalam berorganisasi.
11. Sahabat penulis, Fake Campus: Muh. Zulfikar Naharuddin, Muhammad Raihan Husain, Andi Sugandhy Al Fauzan, Rezky, Muh. Arnan Arfandi, Mufti Kharisma, Muh. Ricky Subarkah, Nurhidayat, Edwin Giralldhy Mamusung, Saldi Mardika Putra, Devaky Julio, Muh. Nugroho Sugiyatno, Asaat Rizkallah Achmadsyah, Aditya Tanzil, dan Muh. Fajar Abidin,

sahabat seperjuangan sejak mahasiswa baru yang mengajarkan arti kebersamaan, kesederhanaan, kekeluargaan.

12. Sahabat penulis, Magang Geng's: Muhammad Raihan Husain, Khaiffah Khairunnisa Loleh, Ulfa Amalyah Usman, Titis Denisa Iskandar, Lisa Nursyahbani Muhlis, Risma Nur Hijriah Rusni Rauf, Sri Rezky Radeng Sawedy, Andi Atira Bunyamin, Nurindah Eka Fitriani, Meylani Fatika Sari, Dhania Soraya, Selly Oktaviani Tahir, Nur Inzani, Andi Helga Adilah dan Andi Helsa Adilah. Terima Kasih untuk sahabat sahabatku yang telah penulis anggap sebagai keluarga sendiri. Terima kasih atas kebersamaannya selama ini.

13. Sahabat penulis, Besteam Pidana: Khaiffah Khairunnisa dan Dhania Soraya. Terima kasih atas kesediannya meluangkan waktu untuk mendiskusikan hal-hal yang berhubungan dengan penulisan skripsi penulis hingga pada tahap penelitian di pengadilan negeri pangkajene.

14. Sahabat penulis, Kreatif Consultant Project (KC Project) : Fikar, Ahyar, Mario, Athif, Ricko, Otan, Saleh, Fahri, Nono, Aqso, Novi dan kakanda Tjoteng. Terima Kasih atas kebersamaannya di acara Floating Party. KC Project mengajarkan pengalaman yang baru dalam diri penulis mengenai hal-hal yang berhubungan dengan Event Organizer, dan sebagainya. Semoga event selanjutnya dapat terlaksana secepatnya.

15. Sahabat Penulis, ZONK: Fani, Arnan, dan Astrid. Sahabat sejak mahasiswa baru yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis baik pikiran ataupun tenaga.
16. Sahabat Penulis, Fantastic Eight (F8): Titis, Adel, Ina, Ima, Nuge, Ilham, Wildan. F8 adalah sahabat penulis sejak masih menempuh bimbingan belajar di Ganesha Operation (GO) hingga saat ini.
17. Rekan seperguruan penulis saat menjalani masa KKN Tematik Desa Sejahtera Mandiri Kabupaten Enrekang: Fikar, Alle, Yanneri, Thorgib, Clara, Kurni, Eda, Titin, Masni, Kina, Basra.
18. Dan seluruh civitas akademika yang turut serta membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Dan kepada semua pihak yang tak dapat penulis tuliskan namanya satu per satu. Terima kasih atas segala bantuan dan sumbangsihnya, baik itu moral maupun materil, dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini. Dengan segala keterbatasan, penulis hanyalah manusia biasa dan tak dapat memberikan yang setimpal atau membalasnya dengan apa-apa kecuali memohon, semoga Allah SWT senantiasa membalas pengorbanan tulus yang telah diberikan dengan segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya.

Skripsi ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, mungkin akan ditemui beberapa kekurangan dalam skripsi ini mengingat penulis sendiri memiliki banyak kekurangan. Olehnya itu, segala masukan, kritik dan saran konstruktif dari segenap pembaca sangat diharapkan untuk mengisi kekurangan yang dijumpai dalam skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi penulis sendiri. Amin.

Billahi Taufik Wal Hidayah Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Makassar, Februari 2017

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian dan kegunaan penelitian	6
1. Tujuan Penelitian	6
2. Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Pengertian Tinjauan Yuridis	7
B. Tindak Pidana	7
1. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana	7
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	9
3. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana	19
C. Tindak Pidana Pembunuhan	23
1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan	23
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan	23
3. Jenis Tindak Pidana Pembunuhan	26
D. Tindak Pidana Pencurian	32
1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian	32
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian	32
3. Jenis Tindak Pidana Pencurian	37

E. Dasar Pemberatan, Peringatan, dan Peniadaan Pidana	42
1. Dasar Pemberatan Pidana	42
2. Dasar Peringatan Pidana	43
3. Dasar Peniadaan Pidana	44
F. Gabungan Tindak Pidana (<i>Concursus</i>)	50
1. Pengertian <i>Concursus</i>	50
2. Jenis <i>Concursus</i>	51
3. Sistem Penjatuhan Pidana Pada <i>Concursus</i>	52
BAB III METODE PENELITIAN	55
A. Lokasi Penelitian	55
B. Jenis Dan Sumber Data	55
C. Teknik Pengumpulan Data	56
D. Analisis Data	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	58
A. Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap <i>Concursus</i> <i>Realis</i> Pada Tindak Pidana Pembunuhan dan Pencurian	58
1. Posisi Kasus	58
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	62
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	79
4. Analisis Penulis	80
B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dan Pencurian (<i>Concursus Realis</i>)	89
1. Amar Putusan	119
2. Analisis Penulis	121
BAB V PENUTUP	127
A. Kesimpulan	127
B. Saran	129
DAFTAR PUSTAKA	131
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam konstitusi secara tegas dinyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Di dalam Pasal 27 UUD 1945 juga berbunyi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia dan menempatkan kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan tanpa ada pengecualian.

Negara Republik Indonesia juga melindungi hak-hak asasi manusia dalam bidang hukum bagi setiap warga Negara yang menyatakan bahwa tidak seorangpun dapat dihadapkan di Pengadilan selain ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal ini mengandung arti bahwa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, hukum merupakan instrument atau sarana dalam melakukan aktivitas pada segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka dari itu konsekuensi dari sebuah negara hukum adalah seluruh aktivitas masyarakat tanpa terkecuali tidak boleh bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku dan setiap tindakan yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum.

Di Indonesia Negara yang berdasar hukum, pemerintah harus menjamin adanya penegakan hukum dan tercapainya tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:¹

- a. Hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*gesetzliches*);
- b. Hukum itu didasarkan pada fakta (*tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim;
- c. Fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan;
- d. Hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.

Selanjutnya, mengenai makna dari penegakan hukum (*law enforcement*). Dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui proses peradilan ataupun melalui proses arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflict resolution*). Dalam arti sempit, penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran dan penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang lebih sempit lagi melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat, dan badan-badan peradilan.²

¹ Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence Theory)*, Kencana, Jakarta, hal.293.

²*Ibid.*, hlm. 22.

Implementasi penegakan hukum di Indonesia harus memandang hukum sebagai suatu sistem. Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum terdiri dari tiga komponen yaitu struktur, substansi, dan kultur hukum.³ Ketiga komponen tersebut memiliki hubungan timbal balik sehingga harus dikaitkan secara bersama-sama demi tercapainya tujuan hukum yang optimal.

Dewasa ini, seringkali dijumpai kasus perbarengan tindak pidana (*concursum*), dimana satu orang pelaku melakukan dua atau lebih tindak pidana lainnya. Dalam kasus ini membahas mengenai perbarengan atau gabungan tindak pidana (*Concursum Realis*) yaitu tindak pidana pembunuhan dan pencurian. Salah satu persoalan yang sering muncul ke permukaan dalam kehidupan masyarakat ialah tentang kejahatan pada umumnya yang salah satunya merupakan kejahatan tentang pembunuhan. Sehubungan dengan hal itu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana) pembunuhan diatur dalam Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHPidana, yang ancaman hukumannya berbeda-beda tergantung dari jenis pembunuhan yang dilakukan.

Pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa (jiwa) seseorang, dimana nyawa tersebut merupakan hakekat hidup manusia. Masalah pembunuhan tidak saja menyangkut perbuatan pidana saja, tetapi juga menyangkut hak asasi manusia karena

³*Ibid.*, hlm. 204.

dianggap bertentangan dengan rasa keadilan. Tindak pidana pembunuhan dengan berbagai alasan sudah menjadi problematika sosial yang semakin meluas, baik di pedesaan maupun perkotaan. Dan saat ini pembunuhan tidak memandang status gender dan strata sosial.

Sedangkan kasus pencurian merupakan suatu hal yang sering kali dijumpai dalam kehidupan bermasyarakat. Maraknya tindak pidana pencurian yang terjadi sangat erat kaitannya keadaan hidup masyarakat khususnya pelaku kejahatan. Berbagai faktor dapat mempengaruhi terjadinya pencurian, misalnya keadaan ekonomi atau tingkat pendapatan yang masih dibawah garis kemiskinan, tingkat pendidikan yang masih tergolong rendah, dan pertumbuhan penduduk yang semakin pesat yang tidak seimbang dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia, selain itu terkadang pencurian juga dapat terjadi karena adanya peluang dengan melihat kondisi atau keadaan lingkungan sekitar oleh pelaku untuk melakukan pencurian tersebut. Pencurian itu sendiri di atur dalam Buku II Bab XXII Pasal 362 – 365 KUHP. Pasal 362 KUHP merupakan pencurian dalam bentuk pokok. Sedangkan, tindak pidana pencurian yang lainnya merupakan pencurian biasa yang disertai dengan keadaan-keadaan khusus. Pencurian dengan keadaan khusus tersebut termasuk pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam Pasal 365 KUHP.

Hal inipun yang terjadi di kalangan masyarakat di Kabupaten Pangkep, sekian banyak kasus pembunuhan yang telah diproses di Kabupten Pangkep, ada salah satu kasus pembunuhan disertai dengan

pencurian (*Concursus Realis*) yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang selanjutnya akan dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan skripsi.

Atas dasar pemikiran inilah yang melatarbelakangi penulis memilih judul skripsi ini **“Tinjauan Yuridis Terhadap *Concursus Realis* Pada Tindak Pidana Pembunuhan dan Pencurian. (Studi Kasus Putusan Nomor 87/Pid.B/2015/PN.Pangkajene).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka yang menjadi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dan pencurian (*Concursus Realis*) dalam perkara pidana nomor 87/Pid.B/2015/PN.Pangkajene?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dan pencurian (*Concursus Realis*) dalam perkara pidana nomor 87/Pid.B/2015/PN.Pangkajene?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dan pencurian (*Concursus Realis*) dalam perkara pidana nomor 87/Pid.B/2015/PN.Pangkajene.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dan pencurian (*Concursus Realis*) dalam perkara pidana nomor 87/Pid.B/2015/PN.Pangkajene.

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka kegunaan penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis adalah untuk pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai tinjauan yuridis terhadap *Concursus Realis* pada tindak pidana pembunuhan dan pencurian (Studi kasus putusan nomor 87/Pid.B/2015/PN.Pangkajene).
2. Manfaat praktis adalah untuk dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi siapa saja, dan sebagai bahan informasi kepada peneliti lainnya dalam penyusunan suatu karya ilmiah yang ada kaitannya dengan judul di atas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tinjauan Yuridis

Tinjauan Yuridis yang dimaksud adalah tinjauan dari segi hukum, sedangkan hukum yang penulis kaji disini adalah hukum menurut ketentuan pidana materil. Khusus dalam tulisan ini pengertian tinjauan yuridis yaitu suatu kajian yang membahas mengenai tindak pidana apa yang terjadi, siapa pelakunya, terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur delik, pertanggungjawaban pidana, serta penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana.

B. Tindak Pidana

1. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah terjemahan paling umum dari istilah *strafbaarfeit* (Belanda). Terjemahan atas *strafbaarfeit* ke dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dalam berbagai istilah, misalnya tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan melawan hukum, delik, dan sebagainya.

Secara etimologi *strafbaarfeit* terdiri atas tiga unsur kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. *Straaf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh, sementara *feit* lebih diartikan sebagai tindak, peristiwa, dan perbuatan atau sebagian dari suatu kenyataan.

Secara harfiah *strafbaarfeit* dapat diartikan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Dari pengertian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dapat dihukum adalah kenyataan, perbuatan atau peristiwa, bukan pelaku.

Berikut adalah beberapa pengertian *strafbaar feit* atau tindak pidana yang dikemukakan oleh para ahli.

- a. Menurut A. Zainal Abidin Farid
Tindak pidana adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab.⁴
- b. Menurut Hazewinkel Suringa
Tindak pidana adalah suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalam undang-undang.⁵
- c. Menurut Simons
Tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum, dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.⁶
- d. Menurut Moeljatno
Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.⁷
- e. Menurut Wirjono Prodjodikoro
Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Dan pelaku ini dapat dikatakan sebagai subjek tindak pidana⁸

⁴ P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 181.

⁵ *Ibid.*

⁶ Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia : Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 97.

⁷ Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, P.T. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 54.

⁸ Wirjono Prodjodikoro, 1989, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, P.T. Eresco, Bandung, hlm 55.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

a. Unsur-Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teoritisi

Beberapa teoritisi hukum memiliki penafsiran tersendiri mengenai unsur-unsur tindak pidana yang terdiri atas dua aliran yaitu aliran monistis dan dualistis. Unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Beberapa contoh, diambil dari batasan tindak pidana oleh teoretisi yakni: Moeljatno, R.Tresna, Vos, Jonkers, Schravendijck.⁹

Menurut Moeljatno (penganut paham dualistis), unsur tindak pidana adalah:¹⁰

- a) Perbuatan;
- b) Yang dilarang (oleh aturan hukum); dan
- c) Ancaman Pidana (bagi yang melanggar hukum).

Perbuatan manusia saja boleh dilarang, oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dapat dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana. Pengertian diancam pidana merupakan pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan itu

⁹Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, P.T Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 79.

¹⁰*Ibid.*

dijatuhi pidana ataukah tidak merupakan hal yang lain dari pengertian perbuatan pidana.

Menurut R.Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:¹¹

- a) Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
- b) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
dan
- c) Diadakan tindakan penghukuman.

Dari unsur ketiga, kalimat diadakan tindakan penghukuman, terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti dengan penghukuman (pidana). Berbeda dengan Moeljatno, karena kalimat diancam pidana berarti perbuatan itu tidak selalu dan tidak dengan demikian dijatuhi pidana.

Walaupun mempunyai kesan bahwa setiap perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang selalu diikuti dengan pidana, namun dalam unsur-unsur itu tidak terdapat kesan perihal syarat-syarat (subjektif) yang melekat pada orangnya untuk dapat dijatuhkannya pidana.

Menurut bunyi batasan yang dibuat Vos, dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:¹²

- a) Kelakuan manusia;
- b) Diancam dengan pidana; dan
- c) Dalam peraturan perundang-undangan.

Dapat dilihat bahwa pada unsur-unsur dari tiga batasan penganut paham dualistis tersebut, tidak ada perbedaan, yaitu bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan manusia yang dilarang, dimuat dalam undang-

¹¹ *Ibid.*, hlm. 80.

¹² *Ibid.*

undang, dan diancam dipidana bagi yang melakukannya. Dari unsur-unsur yang ada jelas terlihat bahwa unsur-unsur tersebut tidak menyangkut diri si pembuat atau dipidananya pembuat, semata-mata mengenai perbuatannya.

Akan tetapi, jika dibandingkan dengan pendapat penganut paham monistis, memang tampak berbeda. Ada dua rumusan yang dikemukakan oleh para ahli penganut paham monistis, yaitu Jonkers dan Schravendijk.

Dari batasan yang dibuat Jonkers (penganut paham monistis) dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana yaitu:¹³

- a) Perbuatan (yang);
- b) Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat); dan
- d) Dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, Schravendijk dalam batasan yang dibuatnya secara panjang lebar itu, jika dirinci terdapat unsur-unsur sebagai berikut:¹⁴

- a) Kelakuan (orang yang);
- b) Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
- c) Diancam dengan hukuman;
- d) Dilakukan oleh orang (yang dapat); dan
- e) Dipersalahkan/kesalahan.

Walaupun rincian dari tiga rumusan di atas tampak berbeda-beda, namun pada hakikatnya ada persamaannya, yaitu tidak memisahkan

¹³*Ibid.*, hlm.81.

¹⁴*Ibid.*

antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai diri orangnya. Dari beberapa pandangan ahli diatas yang berpandangan monistis dan dualistis, penulis dapat memberikan kesimpulan atas beberapa penafsiran oleh ahli tersebut.

Adapun perbedaan diantara kedua pandangan tersebut adalah pandangan monistis merupakan suatu pandangan yang melihat syarat, untuk adanya pidana harus mencakup dua hal yakni sifat dan perbuatan. Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman, bahwa di dalam pengertian perbuatan atau tindak pidana sudah tercakup didalamnya perbuatan yang dilarang (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan (*criminal responsibility*).¹⁵

Lain halnya dengan pandangan dualistis yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Pandangan ini memiliki prinsip bahwa dalam tindak pidana hanya mencakup *criminal act* dan *criminal responsibility* tidak menjadi unsur tindak pidana. Oleh karena itu, untuk menyatakan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana cukup dengan adanya perbuatan yang dirumuskan oleh undang-undang yang memiliki sifat melawan hukum tanpa adanya suatu dasar pembenar.¹⁶

Dari sekian banyak penjelasan mengenai unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan oleh para ahli, maka penulis dapat menarik

¹⁵ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, hlm. 38.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 40.

sebuah kesimpulan tentang perihal apa saja yang menjadi unsur-unsur tindak pidana, sebagai berikut:

1. Ada perbuatan, artinya perbuatan tersebut mencocoki rumusan delik yang ada di dalam ketentuan perundang-undangan.
2. Ada sifat melawan hukum (*Wederrechtelijk*), artinya perbuatan yang dilakukan memiliki sifat melawan hukum. Sifat melawan hukum terbagi atas dua macam, yaitu sifat melawan hukum secara formil (*Formale wederrechtelijk*) dan sifat melawan hukum secara materil (*materiele wederrechtelijk*). Perbuatan bersifat melawan hukum secara formil adalah perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, kecuali jika diadakan pengecualian oleh undang-undang. Sedangkan perbuatan bersifat melawan hukum secara materil (*materiele wederrechtelijk*) adalah suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan masyarakat atau melanggar kaidah-kaidah yang berlaku di masyarakat.,
3. Tidak ada alasan pembenar, alasan pembenar adalah alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan, hingga perbuatan tersebut dianggap patut dan dibenarkan.

Alasan pembenar terdiri atas daya paksa absolut (*overmacht*) Pasal 48 KUHP, pembelaan terpaksa (*noodweer*) Pasal 49 ayat (1) KUHP, menjalankan ketentuan undang-undang Pasal 50 ayat (1), menjalankan perintah jabatan yang sah Pasal 51 ayat (1) KUHP.

b. Unsur Rumusan Tindak Pidana dalam UU

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan buku III memuat pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, yaitu mengenai tingkah laku/perbuatan walaupun ada pengecualian. Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan; sama sekali tidak dicantumkan mengenai unsur kemampuan bertanggung jawab. Di samping itu, banyak mencantumkan unsur-unsur lain baik sekitar atau mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.¹⁷

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:¹⁸

a. Unsur tingkah laku;

Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat. Oleh karena itu, perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan. Jika ada rumusan tindak pidana yang tidak mencantumkan unsur tingkah laku, cara

¹⁷ Adami Chazawi, *op.cit.*, hlm. 81

¹⁸ *Ibid*, hlm 82-115

perumusan seperti itu merupakan suatu pengecualian belaka dengan alasan tertentu, dan tidak berarti tindak pidana itu tidak terdapat unsur perbuatan.

b. Unsur sifat melawan hukum;

Melawan hukum merupakan suatu sifat tercelahnya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, di mana sifat tercela tersebut dapat bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil/*formelle wederrechtelijck*) dan dapat bersumber pada masyarakat (melawan hukum materil/*materiel wederrechtelijck*). Berpegang pada pendirian ini, setiap perbuatan yang ditetapkan sebagai dilarang dengan mencantumkanannya dalam peraturan perundang-undangan (menjadi tindak pidana), tanpa melihat apakah unsur melawan hukum itu dicantumkan atau tidak dalam rumusan, maka rumusan tindak pidana itu sudah mempunyai sifat melawan hukum.

c. Unsur kesalahan

Kesalahan (*schuld*) adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan. Oleh karena itu, unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subjektif. Unsur kesalahan yang mengenai keadaan batin pelaku adalah unsur yang menghubungkan antara perbuatan dan akibat serta sifat melawan hukum perbuatan dengan si pelaku. Hanya dengan adanya hubungan antara ketiga unsur tadi dengan keadaan batin pembuatnya inilah, pertanggung jawab dapat dibebankan pada orang itu. Dengan demikian, terhadap

pelaku dapat dijatuhi pidana. Unsur kesalahan dalam hukum pidana berhubungan dengan pertanggung jawaban, atau mengandung beban pertanggungjawaban pidana yang terdiri atas kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*).

d. Unsur akibat konstitutif

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada:

1. Tindak pidana materil (*materieel delicten*) atau tindak pidana di mana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana;
2. Tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat sebagai pemberat pidana; dan
3. Tindak pidana di mana akibat merupakan syarat dipidanya pembuat.

e. Unsur keadaan yang menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat berupa sebagai berikut:

- 1) Unsur keadaan yang menyertai mengenai cara melakukan perbuatan;
- 2) Unsur cara untuk dapat dilakukannya perbuatan;
- 3) Unsur keadaan menyertai mengenai objek tindak pidana;
- 4) Unsur keadaan yang menyertai mengenai subjek tindak pidana;

5) Keadaan yang menyertai mengenai tempat dilakukannya tindak pidana;

6) Keadaan yang menyertai mengenai waktu dilakukannya tindak pidana.

f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana

Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika ada pengaduan dari yang berhak mengadu.

g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana

Unsur ini berupa alasan untuk diperberatnya pidana, dan bukan unsur syarat untuk terjadinya atau syarat selesainya tindak pidana sebagaimana pada tindak pidana materil. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.

h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana

Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana adalah unsur keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan, yang menentukan untuk dapat dipidananya perbuatan. Artinya, bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan karenanya si pembuat tidak dapat dipidana. Sifat melawan hukumnya dan patutnya dipidana perbuatan itu sepenuhnya digantungkan pada timbulnya unsur ini. Nilai bahayanya bagi

kepentingan hukum dari perbuatan itu terletak pada timbulnya unsur syarat tambahan, bukan semata-mata pada perbuatan.

i. Unsur objek hukum tindak pidana

Unsur mengenai objek pada dasarnya adalah unsur kepentingan hukum (*rechtsbelang*) yang harus dilindungi dan dipertahankan oleh rumusan tindak pidana. Dalam setiap rumusan tindak pidana selalu ada kepentingan hukum yang dilindungi. Memang di dalam rumusan tindak pidana terkandung dua hal yang saling bertolak belakang, seperti pedang bermata dua. Mata pedang yang satu melindungi kepentingan hukum orang yakni korban, dan mata pedang yang satu menyerang kepentingan hukum orang yakni si pembuat tindak pidana.

j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana

Dibentuknya rumusan tindak pidana pada umumnya ditujukan pada setiap orang, artinya dibuat untuk diberlakukan pada semua orang. Tetapi ada beberapa tindak pidana dirumuskan dengan tujuan hanya diberlakukan pada orang tertentu saja yaitu kepada orang-orang tertentu yang mempunyai kualitas atau yang memenuhi kualitas tertentu itulah yang dapat diberlakukan rumusan tindak pidana. Jadi unsur kualitas subjek hukum tindak pidana adalah unsur kepada siapa rumusan tindak pidana itu ditujukan. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana selalu merupakan unsur tindak pidana yang bersifat objektif.

k. Unsur syarat tambahan memperingan pidana

Unsur ini diletakkan pada rumusan suatu tindak pidana tertentu yang sebelumnya telah dirumuskan. Ada dua macam unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana, yaitu unsur syarat tambahan yang bersifat objektif dan unsur syarat tambahan yang bersifat subektif. Bersifat objektif, misalnya terletak pada nilai atau harga kejahatan secara ekonomis. Sifat ringannya tindak pidana dapat pula terletak pada akibat tindak pidana, seperti pada akibat tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian tertentu. Bersifat subjektif, artinya faktor yang meringankan itu terletak pada sikap batin si pembuatnya, ialah apabila tindak pidana dilakukan karena ketidaksengajaan (*culpa*).

3. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaaerheid* atau *criminal responsbility* yang mejurus kepada pembedaan pelaku dengan maksud untuk menentukan seseorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.¹⁹

Pertanggungjawaban pidana meliputi beberapa unsur yang diuraikan sebagai berikut:

¹⁹*Ibid*, hlm. 73.

a) Mampu Bertanggung jawab

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diseluruh dunia pada umumnya tidak mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab, yang diatur yaitu ketidakmampuan bertanggungjawab, seperti isi Pasal 44 KUHP antara lain berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.”

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi menjelaskan bahwa unsur-unsur mampu bertanggungjawab mencakup: ²⁰

- 1) Keadaan jiwanya:
 - a. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*);
 - b. Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya); dan
 - c. Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar (*slaapwandel*), mengigau karena demam (*koorts*), dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.
- 2) Kemampuan jiwanya:
 - a. Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
 - b. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
 - c. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

b) Kesalahan

Kesalahan memiliki arti penting sebagai asas tidak tertulis dalam hukum positif indonesia yang menyatakan “tiada pidana tanpa kesalahan”, yang artinya, untuk dapat dipidananya seseorang diharuskan

²⁰*Ibid*, hlm. 76.

adanya kesalahan yang melekat pada diri seorang pembuat kesalahan untuk dapat diminta pertanggungjawaban atasnya.²¹

Ilmu hukum pidana mengenal dua bentuk kesalahan, yaitu kesengajaan atau dolus dan kealpaan atau culpa, yang diuraikan lebih jelas sebagai berikut:

1) Kesengajaan (*opzet*)

Menurut Criminal Wetboek Nederland tahun 1809 Pasal 11, sengaja (*Opzet*) itu adalah maksud untuk membuat sesuatu atau tidak membuat sesuatu yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang.²²

Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa kesengajaan terdiri atas 3 (tiga) bentuk, yakni:²³

a) Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*)

Corak kesengajaan ini adalah yang paling sederhana, yaitu perbuatan pelaku yang memang dikehendaki dan ia juga menghendaki (atau membayangkan) akibatnya yang dilarang. Kalau yang dikehendaki atau yang dibayangkan ini tidak ada, ia tidak akan melakukan berbuat.²⁴

b) Kesengajaan dengan insaf pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*).

Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya, tidak bertujuan untuk mencapai akibat dasar dari delik tetapi ia tahu benar bahwa akibat tersebut pasti akan mengikuti perbuatan itu.²⁵

c) Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (*dolus eventualis*).

²¹ Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 227

²² Andi Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 226.

²³ Leden Marpaung, 2011, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan dan Penyelidikan)*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9.

²⁴ Teguh Prasetyo, *Op.cit.* hlm. 98.

²⁵ Amir Ilyas, *Op.Cit.* hlm. 80.

Kesengajaan ini juga disebut “kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan” bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, akan tetapi, si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh undang-undang.²⁶

2) Kealpaan (*culpa*)

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang disebabkan kurangnya sikap hati-hati karena kurang melihat kedepan, kealpaan ini sendiri di pandang lebih ringan dari pada kesengajaan.

Kealpaan terdiri atas 2 (dua) bentuk, yakni:²⁷

- a. Kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld/culpa lata*).
Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, nyatanya timbul juga akibat tersebut.
- b. Kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld/culpa levis*)
Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang atau diancam hukuman oleh undang-undang, sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.²⁸

3) Tidak Ada Alasan Pemaaf

Alasan pemaaf atau *schulduit sluitings ground* ini menyangkut pertanggungjawaban seseorang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya atau *criminal responsibility*, alasan pemaaf ini menghapuskan kesalahan orang yang melakukan delik atas dasar beberapa hal.

²⁶ Leden Marpaung, *Op.cit.*, hlm. 18.

²⁷ *Ibid.* hlm. 26.

²⁸ *Ibid.*

Alasan pemaaf terdiri atas daya paksa relatif, Pasal 48 KUHP, pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer exces*), Pasal 49 ayat (2) KUHP, dan menjalankan perintah jabatan yang tidak sah, tetapi terdakwa mengira perintah itu sah, Pasal 51 ayat (2) KUHP.

C. Tindak Pidana Pembunuhan

1) Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Pembunuhan secara terminologi adalah perkara membunuh, perbuatan membunuh. Sedangkan dalam istilah KUHP pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain.

Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, untuk menghilangkan nyawa orang lain itu, seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa kesengajaannya dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.²⁹

2) Unsur-unsur Tindak Pidana Pembunuhan

Mengenai tindak pidana pembunuhan diatur didalam Pasal 338-340 KUHPidana. Unsur-unsur tindak pidana pembunuhan yang terdapat di dalamnya, sebagai berikut:

- a) Unsur subyektif dengan sengaja.

²⁹ P.A.F, Lamintang, Theo Lamintang, 2012, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

Pengertian dengan sengaja tidak terdapat dalam KUHP jadi harus dicari dalam karangan-karangan ahli hukum pidana, mengetahui unsur-unsur sengaja dalam tindak pidana pembunuhan sangat penting karena bisa saja terjadi kematian orang lain, sedangkan kematian itu tidak sengaja atau tidak dikehendaki oleh si pelaku.

Secara umum Zainal Abidin Farid menjelaskan bahwa secara umum sarjana hukum telah menerima tiga bentuk sengaja, yakni:

1. Sengaja sebagai niat;
2. Sengaja insyaf akan kepastian; dan
3. Sengaja insaf akan kemungkinan.

Menurut Yesmil Anwar mengenai unsur sengaja sebagai niat, yaitu:³⁰

Hilangnya nyawa seseorang harus dikehendaki, harus menjadi tujuan. Suatu perbuatan dilakukan dengan maksud atau tujuan atau niat untuk menghilangkan jiwa seseorang, timbulnya akibat hilangnya nyawa seseorang tanpa dengan sengaja atau bukan tujuan atau maksud, tidak dapat dinyatakan sebagai pembunuhan, jadi dengan sengaja berarti mempunyai maksud atau niat atau tujuan untuk menghilangkan jiwa seseorang.

Sedangkan Prdjodikoro berpendapat sengaja insaf akan kepastian, sebagai berikut: ³¹

Kesengajaan semacam ini ada apabila sipelaku, dengan perbuatannya itu bertujuan untuk mencapai akibat yang akan menjadi dasar dari tindak pidana, kecuali ia tahu benar, bahwa akibat itu mengikuti perbuatan itu.

Selanjutnya Lamintang mengemukakan sengaja insaf akan kemungkinan, sebagai berikut:³²

³⁰ Yesmil Anwar, 1994, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Cipta Adya Bakti, Bandung. hlm. 89.

³¹ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Aditama, Bandung, hlm. 63.

³² Leden Marpaung, 2005, *Tindak Pidana Nyawa dan Tubuh*, Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 18.

Pelaku yang bersangkuatan pada waktu melakukan perbuatan itu untuk menimbulkan suatu akibat, yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbul suatu akibat lain dari pada akibat yang memang ia kehendaki.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa unsur kesengajaan meliputi tindakannya dan obyeknya yang artinya pelaku mengetahui dan menghendaki hilangnya nyawa seseorang dari perbuatannya.

b) Unsur Obyektif: Perbuatan menghilangkan nyawa;

Menghilangkan nyawa orang lain hal ini menunjukkan bahwa kejahatan pembunuhan itu telah menunjukkan akibat yang terlarang atau tidak, apabila belum menimbulkan hilangnya nyawa orang lain, kejadian ini baru merupakan percobaan pembunuhan (Pasal 338 jo Pasal 53), dan belum atau bukan merupakan pembunuhan secara sempurna sebagaimana dimaksudkan Pasal 338.

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Adanya wujud perbuatan;
- b. Adanya suatu kematian (orang lain) ;dan
- c. Adanya hubungan sebab dan akibat (*causal Verband*) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain).³³

Wahyu Adnan berpendapat bahwa:³⁴

Untuk memenuhi unsur hilangnya nyawa orang lain harus ada perbuatan walaupun perbuatan tersebut, yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Akibat dari perbuatan tersebut tidak perlu terjadi secepat mungkin akan tetapi dapat timbul kemudian.

³³ Adami Chazawi, 2010, *Kejahatan Terhadap Nyawa dan Tubuh*, P.T. Raja Grafindo, Jakarta, hlm .57.

³⁴ Wahyu Adnan, 2007, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Gunung Aksara, Bandung, hlm. 45.

3) Jenis Tindak Pidana Pembunuhan

Bentuk kesalahan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain ini dapat berupa sengaja (*dolus*) dan tidak sengaja (*alpa*). Kesengajaan (*dolus*) adalah suatu perbuatan yang dapat terjadi dengan direncanakan terlebih dahulu atau tidak direncanakan.

Berdasarkan unsur kesalahan, tindak pidana pembunuhan dapat dibedakan menjadi:

a. Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja

1) Pembunuhan Biasa

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 338 KUHP merupakan tindak pidana dalam bentuk pokok (*Doodslag In Zijn Grondvorm*), yaitu delik yang telah dirumuskan secara lengkap dengan semua unsur-unsurnya. Adapun rumusan Pasal 338 KUHP adalah:

“Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Pada pembunuhan biasa ini, Pasal 338 KUHP menyatakan bahwa pemberian sanksi atau hukumanpidananya adalah pidana penjara paling lama lima belas tahun. Di sini disebutkan “paling lama” jadi tidak menutup kemungkinan hakim akan memberikan sanksi pidana kurang dari lima belas tahun penjara.

2) Pembunuhan Dengan Pemberatan (*Gequalificeerde Doodslag*)

Hal ini diatur Pasal 339 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

“Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan dan yang dilakukan dengan maksud untuk memudahkan perbuatan itu, jika tertangkap tangan, untuk melepaskan diri sendiri atau pesertanya daripada hukuman, atau supaya barang yang didapaknya dengan melawan hukum tetap ada dalam tangannya, dihukum dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.”

Perbedaan pembunuhan biasa dalam Pasal 338 KUHP dengan pembunuhan dengan pemberatan dalam Pasal 339 KUHP ialah : “diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan”.

Kata “diikuti” (*gevolgd*) dimaksudkan diikuti kejahatan lain. Pembunuhan itu dimaksudkan untuk mempersiapkan dilakukannya kejahatan lain. Misalnya : seorang yang sakit hati ingin melakukan pembunuhan terhadap Bupati; tetapi karena Bupati dikawal oleh seorang bodyguard/ pengawal, maka orang yang sakit hati tadi lebih dahulu menembak pengawalnya, baru kemudian membunuh Bupati.

Kata “disertai” (*vergezeld*) dimaksudkan, disertai kejahatan lain; pembunuhan itu dimaksudkan untuk mempermudah terlaksananya kejahatan lain itu. Misalnya : seorang pencuri ingin melakukan kejahatan dengan cara membongkar sebuah bank. Karena bank tersebut ada penjaganya, maka pencuri tersebut lebih dahulu membunuh penjaganya.

Kata “didahului” (*voorafgegaan*) dimaksudkan didahului kejahatan lainnya atau menjamin agar pelaku kejahatan tetap dapat menguasai barang-barang yang diperoleh dari kejahatan. Misalnya : seorang perampok melarikan barang yang dirampok. Untuk menyelamatkan barang yang dirampok tersebut, maka perampok tersebut menembak polisi yang mengejarnya.

Pada pembunuhan dalam Pasal 339 KUHP merupakan suatu bentuk khusus pembunuhan yang diperberat. Dalam pembunuhan yang diperberat ini terdapat dua macam tindak pidana sekaligus, yaitu pembunuhan biasa dan tindak pidana lain. Dalam Pasal 339 KUHP ini, ancaman pidananya adalah pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. Sanksi pidana pada pembunuhan ini termasuk relatif berat dibandingkan dengan pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 KUHP, karena dalam perbuatan ini terdapat dua delik sekaligus.

3) Pembunuhan Berencana (*moord*)

Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang menyebutkan sebagai berikut :

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.”

Pembunuhan dengan berencana merupakan suatu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu. Ancaman pidana pada pembunuhan berencana ini lebih berat dari pada pembunuhan yang ada pada Pasal 338 dan 339 KUHP bahkan merupakan pembunuhan dengan ancaman pidana paling berat, yaitu pidana mati. Sanksi pidana mati ini tidak tertera pada kejahatan terhadap nyawa lainnya, yang menjadi dasar beratnya hukuman ini adalah adanya perencanaan terlebih dahulu. Selain diancam dengan pidana mati, pelaku tindak pidana pembunuhan berencana juga dapat dipidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

4) Pembunuhan Terhadap Anak

Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa seorang anak yang baru dilahirkan oleh ibunya sendiri. Tentang kejahatan ini selanjutnya pembentuk undang-undang selanjutnya juga masih membuat perbedaan kesengajaan menghilangkan nyawa seseorang anak yang baru dilahirkan oleh ibunya yang dilakukan tanpa direncanakan terlebih dahulu yang telah diberi nama *kinderdoodslag* dengan kesengajaan menghilangkan nyawa seseorang anak yang baru dilahirkan ibunya sendiri dengan direncanakan terlebih dahulu yang telah disebut *kindermoord*. Jenis kejahatan yang terlabih dahulu itu oleh pembentuk undang-undang disebut *kinderDoodslag* dalam Pasal 341 KUHP dan adapun jenis kejahatan yang disebut kemudian adalah *kindmoord* diatur dalam Pasal 342 KUHP.

5) Pembunuhan yang dilakukan dengan permintaan tegas oleh korban.

Jenis kejahatan ini mempunyai unsur khusus, atas permintaan yang tegas (*uitdrukkelijk*) dan sungguh-sungguh atau nyata (*ernstig*). Tidak cukup hanya dengan persetujuan belaka, karena hal itu tidak memenuhi perumusan Pasal 344 KUHP:

“Barang siapa yang merampas jiwa orang lain atas permintaan yang sangat tegas dan sungguh-sungguh, orang itu dipidana dengan penjara paling tinggi dua belas tahun”.

6) Membantu orang lain untuk melakukan bunuh diri

Kejahatan berupa kesengajaan mendorong orang lain melakukan bunuh diri atau membantu orang lain melakukan bunuh diri sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 345 KUHP.

7) Pembunuhan dengan menggugurkan kandungan

Kejahatan berupa kesengajaan menggugurkan kandungan seorang wanita atau menyebabkan anak yang berada dalam kandungan meninggal dunia. Pengguguran kandungan itu yang oleh pembuat undang-undang telah disebut dengan kata *afdriving*. Mengenai kejahatan ini selanjutnya pembuat undang-undang masih membuat perbedaan antara beberapa jenis *afdriving* yang di pandangnya dapat terjadi dalam praktik, masing-masing yaitu:

- a. Kesengajaan menggugurkan kandungan dilakukan orang atas permintaan wanita yang mengandung seperti yang telah diatur dalam Pasal 346 KUHP.
- b. Kesengajaan menggugurkan kandungan orang tanpa mendapat izin dahulu dari wanita yang mengandung seperti yang telah diatur dalam Pasal 347 KUHP.
- c. Kesengajaan menggugurkan kandungan yang dilakukan orang dengan mendapat izin dahulu dari wanita yang mengandung seperti yang diatur dalam Pasal 348 KUHP.
- d. Kesengajaan menggugurkan kandungan seorang wanita yang pelaksanaannya telah dibantu oleh seorang dokter, seorang bidan, atau seorang peramu obat-obatan, yakni seperti yang diatur dalam Pasal 349 KUHP.³⁵

b. Pembunuhan Dengan Tidak Sengaja

Tindak pidana yang dilakukan dengan tidak sengaja merupakan bentuk kejahatan yang akibatnya tidak dikehendaki oleh pelaku. Kejahatan ini diatur dalam Pasal 359 KUHP, yang rumusannya sebagai berikut:

“Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.”

Terhadap kejahatan yang melanggar Pasal 359 KUHP ini ada dua macam hukuman yang dapat dijatuhkan terhadap pelakunya yaitu berupa pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun. Ketidaksengajaan (*alpa*) adalah suatu perbuatan tertentu terhadap seseorang yang berakibat matinya seseorang. Bentuk dari kealpaan ini dapat berupa perbuatan pasif maupun aktif. Contoh

³⁵ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *op.cit*, hlm.11-13

perbuatan yang pasif misalnya penjaga palang pintu kereta api karena tertidur pada waktu ada kereta yang melintas dia tidak menutup palang pintu sehingga mengakibatkan tertabraknya mobil yang sedang melintas. Bentuk kealpaan penjaga palang pintu ini berupa perbuatan yang pasif karena tidak melakukan apa-apa. Sedangkan contoh perbuatan yang aktif misalnya seseorang yang sedang menebang pohon ternyata menimpa orang lain sehingga matinya orang itu karena tertimpa pohon. Bentuk kealpaan dari penebang pohon berupa perbuatan yang aktif.

D. Tindak Pidana Pencurian

1) Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Salah satu bentuk kejahatan yang tercantum dalam buku kedua KUHP adalah tindak pidana pencurian yang secara khusus diatur dalam Bab XXII Pasal 362-367 KUHP. Mengenai tindak pidana pencurian ini ada salah satu pengkualifikasian dengan bentuk pencurian pemberatan, khususnya diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP. Pencurian secara umum dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak 6 (enam) puluh rupiah”.

2) Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian

1. Unsur Subjektif

a. Maksud untuk memiliki

Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

b. Melawan hukum

Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum. Berhubung dengan alasan inilah, maka unsur melawan hukum dalam pencurian digolongkan ke dalam unsur

melawan hukum subjektif. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam *MvT (Memorie Van Toelichting)* yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada di belakangnya . Unsur maksud adalah merupakan bagian dari kesengajaan. Dalam praktik hukum terbukti mengenai melawan hukum dalam pencurian ini lebih condong diartikan sebagai melawan hukum subjektif. Sedangkan apa yang dimaksud dengan melawan hukum (*wederrechtelijk*) undang-undang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat dari mana atau oleh sebab apa sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu, dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum, yaitu pertama melawan hukum formil, dan kedua melawan hukum materiil. Melawan hukum formil adalah bertentangan dengan hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak atau oleh sebab dari hukum tertulis. Seperti pendapat *Simons* yang menyatakan bahwa untuk dapat dipidananya perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam undang-undang. Sedangkan melawan hukum materiil, ialah bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat, asas mana dapat saja dalam hukum tidak tertulis maupun sudah terbentuk dalam hukum tertulis. Dengan kata lain dalam melawan hukum materiil ini, sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan terletak pada masyarakat.

Sifat tercelanya suatu perbuatan dari sudut masyarakat yang bersangkutan. Sebagaimana pendapat Vos yang menyatakan bahwa melawan hukum itu sebagai perbuatan yang oleh masyarakat tidak dikehendaki atau tidak diperbolehkan.

2. Unsur Objektif

a. Unsur perbuatan mengambil (*wegnemen*)

Dari adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif atau perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan - gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari - jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya. Sebagaimana dalam banyak tulisan, aktifitas tangan dan jari - jari sebagaimana tersebut di atas bukanlah merupakan syarat dari adanya perbuatan mengambil. Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaan. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan

membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna. Perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui.

b. Unsur benda

Pada mulanya benda - benda yang menjadi objek pencurian ini sesuai dengan keterangan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda - benda bergerak (*roerend goed*). Benda - benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak, misalnya sebatang pohon yang telah ditebang atau daun pintu rumah yang telah terlepas atau dilepas. Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud saja. Benda bergerak adalah setiap benda yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (Pasal 509 KUHPerdata). Sedangkan benda yang tidak bergerak adalah benda - benda yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawan dari benda bergerak.

3. Unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang lain

Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain , cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik petindak itu sendiri. Jadi benda yang dapat menjadi objek pencurian ini haruslah benda - benda yang ada pemiliknya. Benda - benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian.

3) Jenis Tindak Pidana Pencurian

a. Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP)

Perumusan pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP yang menyatakan sebagai berikut:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”.

Berdasarkan rumusan diatas, maka unsur-unsur tindak pidana pencurian biasa adalah sebagai berikut:

1. Unsur obyektif, yang meliputi unsur-unsur:
 - Mengambil;
 - Suatu barang;
 - Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.
2. Unsur subyektif, yang meliputi unsur-unsur:
 - Dengan maksud;
 - Untuk memiliki barang atau benda tersebut untuk dirinya sendiri;
 - Secara melawan hukum.

b. Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP)

Istilah pencurian dengan pemberatan biasanya secara doktrinal disebut sebagai pencurian yang dikualifikasikan. Pencurian yang dikualifikasikan ini menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pencurian biasa. Oleh karena pencurian yang dikualifikasikan tersebut merupakan pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang bersifat memberatkan, maka pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus diawali dengan membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya.

Berdasarkan rumusan yang terdapat dalam Pasal 363 KUHP, maka unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah:

1. Unsur-unsur pencurian yang diatur dalam Pasal 362 KUHP;
2. Unsur-unsur yang memberatkan, dalam Pasal 363 KUHP yang meliputi;
 - Pencurian ternak (Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP);
 - Pencurian pada waktu ada kebakaran, peletusan, gempa bumi, atau gempa laut, peletusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan, atau bahaya perang (Pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHP);

- Pencurian di waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak (Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP);
- Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu (Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP);
- Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu (Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP).

c. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP)

Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain (yang meringankan), ancaman pidananya menjadi diperingan. Perumusan pencurian ringan diatur dalam Pasal 364 KUHP yang menyatakan:

“Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 364 ke-4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 365 ke-5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Berdasarkan rumusan pada Pasal 364 KUHP di atas, maka unsur-unsur dalam pencurian ringan adalah:

- Pencurian dalam bentuknya yang pokok (Pasal 362 KUHP);
- Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama (Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP);
- Pencurian yang dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, dengan anak kunci, perintah palsu atau seragam palsu;
- Tidak dilakukan dalam sebuah rumah;
- Tidak dilakukan dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya; dan
- Apabila harga barang yang dicurinya itu tidak lebih dari dua puluh lima rupiah.

d. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP)

Jenis pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP lazim disebut dengan istilah “pencurian dengan kekerasan”. Ketentuan Pasal 365 KUHP selengkapnya sebagai berikut:

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang di dahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.
- 2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun;

- Ke-1 jika perbuatan dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
 - Ke-2 jika perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 - Ke-3 jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu;
 - Ke-4 jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- 3) Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- 4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam point 1 dan 3.
- e. Pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP)

Pencurian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 367 KUHP ini merupakan pencurian di kalangan keluarga. Artinya baik pelaku maupun korbannya masih dalam satu keluarga. Pencurian dalam Pasal 367 KUHP akan terjadi apabila seorang suami atau istri melakukan (sendiri) atau membantu (orang lain) pencurian terhadap harta benda istri atau suaminya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (1) KUHP apabila suami-istri tersebut masih dalam ikatan perkawinan yang utuh, tidak terpisah meja atau tempat tidur juga tidak terpisah harta kekayaannya, maka pencurian atau membantu pencurian yang dilakukan oleh mereka mutlak tidak boleh dilakukan penuntutan. Tetapi apabila dalam pencurian yang dilakukan oleh suami atau istri terhadap harta benda suami atau istri orang lain (bukan sebagai anggota keluarga) baik sebagai pelaku maupun sebagai pembantu, maka terhadap orang ini tetap dapat dilakukan penuntutan, sekalipun tidak ada pengaduan.

E. Dasar Pemberatan, Peringanan, dan Penghapusan Pidana

1. Dasar Pemberatan Pidana

Menurut Mr. J.E. Jonkers, bahwa dasar umum pemberatan atau penambahan pidana (*strafverhoging gronden*) adalah:³⁶

Kedudukan sebagai pegawai negeri, hal ini diatur dalam Pasal 52 KUHP yang berbunyi:

“Jika kalau seorang pegawai negeri (*abtenaar*) melanggar kewajiban yang istimewa dalam jabatannya karena melakukan perbuatan yang dapat dipidana, atau pada waktu melakukan perbuatan yang dapat dipidana, atau pada waktu melakukan perbuatan yang dapat dipidana memakai kekuasaan, kesempatan, atau daya upaya yang diperoleh karena jabatannya, maka pidananya boleh ditambah sepertiganya.”

Ketentuan ini jarang sekali digunakan oleh Penuntut Umum dan Pengadilan, seolah-oleh tidak dikenal mungkin juga karena kesulitan untuk membuktikan unsur pegawai negeri menurut Pasal 52 KUHP, yaitu:

³⁶ Zainal Abidin Farid, *op.cit*, hlm. 427.

1. Melanggar kewajibannya yang istimewa dalam jabatannya; atau;
2. Memakai kekuasaan atau daya upaya yang diperoleh karena jabatannya.

a. Pengulangan delik atau residivis (*recidive*)

Residivis (*recidive*) atau pengulangan kejahatan tertentu terjadi bilamana orang yang sama mewujudkan lagi suatu delik, yang diantarai oleh putusan pengadilan negeri yang telah memidana pembuat delik;

b. Gabungan atau perbarengan dua atau lebih delik (*samenloop/Concursus Realis*).

2. Dasar Peringatan Pidana

Menurut Jonkers, bahwa sebagai unsur peringatan atau pengurangan pidana yang bersifat umum adalah:³⁷

- a. Percobaan untuk melakukan kejahatan (Pasal 53 KUHP);
- b. Pembantuan (Pasal 56 KUHP);
- c. Orang yang belum cukup umur atau *minderjarigheld* (Pasal 45 KUHP).

Ayat ketiga KUHP hanya menyebut butir c, karena yang disebut pada butir a dan butir b bukanlah dasar peringatan pidana yang sebenarnya.

Pendapat Jonkers tersebut sesuai dengan pendapat Hazewinkel Suringa, yang mengemukakan percobaan dan pembantuan

³⁷ *Ibid*, hlm. 493.

adalah bukan suatu bentuk keadaan yang memberikan ciri keringanan kepada suatu delik tertentu, tetapi percobaan dan pembantuan merupakan bentuk keterwujudan yang berdiri sendiri dan tersendiri dalam delik. Jonkers menyatakan bahwa ketentuan Pasal 53 (2) dan (3) serta Pasal 57 (2) dan (3) KUHP bukan dasar pengurangan pidana menurut keadaan-keadaan tertentu, tetapi adalah penentuan pidana umum pembuat percobaan dan pembantu yang merupakan pranata hukum yang diciptakan khusus oleh pembuat undang-undang.

3. Dasar Peniadaan Pidana

Dalam ilmu hukum pidana, dasar peniadaan pidana dapat dibedakan menjadi:

- a. Adanya Ketidakmampuan Bertanggung Jawab (*Ontoerekening svatbaarheid*).

Pasal 44 KUHP merumuskan:

“Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”.

Berdasarkan Pasal tersebut, terdapat dua penyebab tidak dipidananya pelaku tindak pidana, yaitu:

- 1) Karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya;
- 2) Karena terganggu jiwanya karena sebab penyakit.

Undang-undang tidak memberikan keterangan yang jelas tentang orang yang tidak mampu bertanggungjawab, sehingga tindakannya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Di dalam *Memory van Toeliching* (M.v.T) terdapat keterangan tentang ketidakmampuan bertanggungjawab, yaitu:

- a. Apabila si pelaku tidak ada kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat mengenai apa yang dilarang dan apa yang diperintahkan oleh undang-undang;
- b. Apabila pelaku dalam keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dia tidak dapat menyadari bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat perbuatannya.

Dalam praktik hukum, sepanjang pelaku tindak pidana tidak memperlihatkan gejala kejiwaan tidak normal, maka keadaan jiwa si pelaku tidak dipermasalahkan. Sebaliknya ketika nampak gejala-gejala tidak normal, maka gejala-gejala itu harus diselidiki apakah benar dan merupakan alasan pemaaf sebagaimana dimaksudkan Pasal 44 ayat (1).

b. Daya Paksa (*Overmacht*)

Daya paksa dalam istilah hukum pidana disebut dengan *overmacht*. Sejarah perundang-undangan merupakan *overmacht* merupakan alasan atau sebab eksternal yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan menggambarkan bahwa setiap daya, dorongan, paksaan yang membuat seseorang tidak berdaya menghadapinya.

Dasar peniadaan pidana karena daya paksa dirumuskan dalam Pasal 48 KUHP yaitu:

“Barangsiapa yang melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa tidak dipidana”

c. Pembelaan Terpaksa (*noodweer*)

Pembelaan terpaksa dirumuskan dalam Pasal 49 ayat 1 sebagai berikut:

“Tidak dipidana, barangsiapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri atau orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena adanya serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum pada ketika itu juga.”

Dari rumusan di atas dapat diambil dua pokok kesimpulan yaitu: Unsur mengenai syarat pembelaan terpaksa, meliputi:

1. Pembelaan terpaksa dilakukan karena sangat terpaksa;
2. Untuk mengatasi adanya serangan atau ancaman serangan seketika yang bersifat melawan hukum;
3. Serangan atau ancaman serangan ditujukan pada tiga kepentingan hukum yakni atas badan, kehormatan kesusilaan, dan harta benda sendiri atau orang lain;
4. Harus dilakukan ketika adanya ancaman serangan dan berlangsungnya serangan, atau bahaya yang masih mengancam; dan

5. Perbuatan pembelaan harus seimbang dengan serangan yang mengancam.

Unsur dalam hal apa terjadinya pembelaan terpaksa, meliputi:

1. Dalam untuk membela dirinya sendiri atau orang lain, dan serangan ditujukan pada fisik atau badan manusia;
2. Dalam hal membela kehormatan kesusilaan;
3. Dalam hal membela harta benda diri sendiri atau harta benda orang lain.

Perbuatan yang masuk dalam pembelaan terpaksa pada dasarnya adalah tindakan menghakimi terhadap orang yang berbuat melawan hukum terhadap diri orang itu atau orang lain (*eigenriching*). Tindakan ini dilarang oleh undang-undang tapi dalam hal pembelaan terpaksa diperkenankan oleh undang-undang, berhubung dalam hal serangan seketika yang melawan hukum ini. Negara tidak dapat berbuat banyak untuk melindungi penduduknya, maka orang yang menerima serangan seketika yang mealwan hukum, diperkenankan melakukan perbuatan sepanjang memenuhi syarat untuk melindungi kepentingan sendiri atau orang lain. Penyerangan yang melawan hukum seketika itu melahirkan hukum darurat yang membolehkan korban melindungi dan mempertahankan kepentingannya atau kepentingan hukum orang lain.

d. Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*).

Dirumuskan dalam Pasal 49 ayat 2:

“Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.”

Dalam Pasal ini dapat dipahami bahwa serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum dan menyebabkan goncangan jiwa yang hebat sehingga orang yang terancam melakukan tindak pidana yang lebih berat dari ancaman serangan yang menimpanya, maka perbuatan tersebut tidak dipidana. Schravendijk memberikan contoh ada seorang laki-laki secara diam-diam masuk ke kamar seorang gadis dengan maksud hendak menyetubuhi gadis tersebut. Pada saat laki-laki meraba-raba tubuh si gadis, terbangunlah dia. Dalam situasi yang demikian, tergoncanglah jiwa antara amarah, bingung, ketakutan yang hebat, sehingga dengan tiba-tiba gadis itu mengambil pisau di dekatnya dan laki-laki tersebut ditikam hingga mati. Oleh sebab adanya kegoncangan jiwa yang hebat inilah, maka pakar hukum memasukkan *noodweer exces* ke dalam alasan pemaaf karena menghilangkan unsur kesalahan pada diri si pembuat.

e. Menjalankan Perintah Undang-Undang

Peniadaan pidana berdasarkan menjalankan perintah undangundang dirumuskan dalam Pasal 50 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana”.

Yang dimaksud perbuatan dalam Pasal di atas adalah perbuatan tindak pidana yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukannya. Sedangkan maksud ketentuan undang-undang dalam arti luas adalah peraturan undang-undang yang dibuat oleh parlemen (DPR) bersama pemerintah dan segala peraturan yang ada di bawahnya, seperti peraturan pemerintah, peraturan daerah, karena semua peraturan itu terbentuk oleh kekuasaan yang berdasarkan undang-undang. Contohnya seorang tersangka yang melarikan diri, maka petugas menembak kaki tersangka untuk melumpuhkannya.

f. Melakukan Perintah Jabatan

Dasar peniadaan pidana karena menjalankan perintah jabatan yang sah dirumuskan dalam Pasal 51 ayat 1 KUHP yang berbunyi:

“Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana”.

Ketentuan ini sama dengan alasan peniadaan pidana oleh sebab menjalankan perintah undang-undang, dalam arti kedua dasar ini menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan. Selain itu keduanya berupa perbuatan yang boleh dilakukan sepanjang menjalankan kewenangan berdasarkan undang-undang maupun perintah jabatan.

g. Menjalankan Perintah Jabatan Yang Tidak Sah Dengan Itikad Baik

Dasar peniadaan ini dirumuskan dalam Pasal 51 ayat (2) yang berbunyi:

“Perintah jabatan tanpa wenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana kecuali apabila yang menerima perintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang, dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya”.

Dari apa yang dirumuskan dalam Pasal di atas, terdapat dua syarat yang wajib dipenuhi agar orang yang menjalankan perintah yang tidak sah dengan i'tikad baik itu tidak dipidana yaitu:

1. Syarat subjektif, yaitu dengan i'tikad baik dia mengira bahwa perintah itu adalah sah
2. Syarat objektif adalah pada pelaksanaannya pelaksanaan perintah itu masuk dalam bidang tugas jabatannya.

F. Pebarengan atau GabunganTindak Pidana (*Concursus Realis* atau *Samenloop*)

1. Pengertian gabungan tindak pidana (*Concursus Realis*)

Pada dasarnya yang dimaksud dengan pebarengan tindak pidana ialah terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang dimana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau

antara tindak pidana awal dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim.³⁸

Beberapa pendapat ahli mengenai pengertian gabungan tindak pidana (*Concursus Realis*) sebagai berikut:

1. Van Hatum membahas gabungan itu sebagai satu lembaga hukum pidana tersendiri, tetapi berdasarkan alasan-alasan lain. Menurut Van Hatum maka arti gabungan itu besar berhubung dengan asas *ne bis in idem* dan ajaran mengenai unsur-unsur delik yang disebut dalam teks yang bersangkutan.³⁹
2. Simons, Zevenbergen, Vos, dan Hazewinkel-Suringa menempatkan gabungan itu dalam pembahasan mengenai ukuran untuk menetapkan beratnya hukuman (*straftoemeting*).⁴⁰
3. Pompe membahas gabungan itu sebagai bagian dari pelajaran mengenai dapat dihukum atau tidak dapat dihukumnya (*strafbaarheid*) pembuat, karena Pasal-Pasal 63 dan 64 KUHPidana menyinggung hubungan antara peristiwa pidana dan perbuatan.⁴¹
4. Jonkers membahas gabungan itu sebagai bagian dari pelajaran mengenai peristiwa pidana (*strafbaarfeit*), biarpun ia melihat gabungan itu sebagai salah satu ukuran untuk menentukan beratnya hukuman.⁴²

2. Jenis-jenis gabungan tindak pidana (*Concursus Realis*)

Terdapat tiga macam gabungan tindak pidana, yaitu:⁴³

- a. Seorang dengan satu perbuatan melakukan beberapa tindak pidana, yang dalam ilmu pengetahuan dinamakan (*eendaadsche samenloop*), diatur dalam Pasal 63 KUHP;
- b. Seorang melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan tindak pidana, tetapi dengan adanya hubungan antara satu sama lain, dianggap sebagai satu

³⁸ Adami Chazawi, *op.cit.*, hlm. 109

³⁹ E.Utrecht, 2000, *Hukum Pidana II*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, hlm.137.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm.138.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*

⁴³ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi ketiga, Refika Aditama, Bandung, hlm. 142.

- perbuatan yang dilanjutkan (*voortgezette handeling*), diatur dalam Pasal 64 KUHP;
- c. Seorang melakukan beberapa perbuatan yang tidak ada hubungan satu sama lain, dan yang masing-masing merupakan tindak pidana, hal tersebut dalam ilmu pengetahuan dinamakan gabungan beberapa perbuatan (*meerdaadsche samenloop*), diatur dalam Pasal 65 dan 66 KUHP.

Dari ketiga macam gabungan (*samenloop*) ini, yang benar-benar merupakan gabungan adalah nomor 3, yaitu beberapa perbuatan digabungkan menjadi satu, maka dinamakan *Concursus Realisrealis*, sedangkan gabungan nomor 1 dinamakan *Concursus Realis idealis* karena sebenarnya tidak ada hal-hal yang digabungkan, tetapi ada satu perbuatan yang memencarkan sayapnya kepada beberapa Pasal ketentuan hukum pidana. Sedangkan gabungan nomor 2 merupakan beberapa perbuatan yang hanya dianggap sebagai suatu perbuatan yang dilanjutkan.

3. Sistem atau (*stelsel*) penjatuhan pidana pada *Concursus Realis*

Pokok persoalan dalam gabungan melakukan tindak pidana adalah mengenai bagaimana sistem pemberian hukuman bagi seseorang yang telah melakukan delik gabungan, sebagaimana dijelaskan dalam KUHP terdapat empat teori yang dipergunakan untuk memberikan hukuman bagi pelaku tindak pidana gabungan, yaitu:

a. Sistem absorpsi atau menghisap

Dalam sistem ini pidana yang dijatuhkan ialah pidana yang terberat di antara beberapa pidana yang diancamkan. Dalam hal ini seakan-akan pidana yang ringan terserap oleh pidana yang lebih berat. Dasar daripada sistem hisapan ini adalah Pasal 63 dan 64, yaitu untuk gabungan tindak pidana tunggal dan perbuatan yang dilanjutkan.

b. Sistem absorpsi yang dipertajam

Dalam sistem ini ancaman hukumannya adalah hukuman yang terberat, namun masih harus ditambah $\frac{1}{3}$ kali maksimum hukuman terberat yang disebutkan. Sistem ini dipergunakan untuk gabungan tindak pidana berganda dimana ancaman hukuman pokoknya ialah sejenis. Adapun dasar yang digunakan adalah Pasal 65.

c. Sistem kumulasi

Sistem kumulasi yang semua ancaman hukuman dari gabungan tindak pidana tersebut dijumlahkan, tanpa ada pengurangan apa-apa dari penjatuhan hukuman tersebut. Sistem ini berlaku untuk gabungan tindak pidana berganda terhadap pelanggaran dengan pelanggaran dan kejahatan

dengan pelanggaran. Dasar hukumannya adalah Pasal 70 KUHP.

d. Sistem kumulasi yang diperlunak

Tiap-tiap ancaman hukuman dari masing-masing kejahatan yang telah dilakukan, dijumlahkan seluruhnya. Namun tidak boleh melebihi maksimum terberat ditambah sepertiganya. Sistem ini berlaku untuk gabungan tindak pidana berganda, dimana ancaman hukuman pokoknya tidak sejenis. Adapun dasar hukum sistem ini adalah Pasal 66 KUHP. Dari keempat stelsel di atas yang sering dipergunakan hanyalah tiga, yaitu sistem absorpsi, absorpsi yang dipertajam, dan kumulasi yang diperlunak. Sementara itu kumulasi murni tidak pernah dipergunakan dalam praktek, karena bertentangan dengan ajaran *samenloop* yang pada prinsipnya meringankan terdakwa.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilaksanakan. Adapun tempat atau lokasi penelitian yang penulis pilih dalam melakukan pengumpulan data guna menunjang penelitian ini adalah di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkajene.

B. Jenis dan Sumber Data

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung, dalam hal ini penulis melakukan wawancara langsung terhadap majelis hakim dan panitera yang menangani kasus tersebut .
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan atau dari berbagai literatur dengan menelaah buku-buku, artikel, internet, jurnal hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data-data dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Penelitian dilaksanakan dengan mengumpulkan, membaca, dan menelusuri sejumlah buku-buku, peraturan perundang-undangan ataupun literatur-literatur lainnya yang relevan dengan masalah yang diteliti.

2. Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian dilaksanakan dengan terjun langsung ke lokasi penelitian dengan melakukan pengamatan secara langsung (*observasi*). Metode ini terdiri atas dua cara yaitu:

- a) Wawancara langsung terhadap majelis hakim dan panitera yang pernah menangani kasus tindak pidana pembunuhan dengan nomor register perkara 87/Pid.B/2015/PN.Pangkajene.
- b) Dokumentasi yaitu menelusuri data yang berupa dokumen dan arsip yang diperoleh dari panitera muda bagian pidana Pengadilan Negeri Pangkajene.

D. Analisis Data

Data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian baik data primer ataupun data sekunder dianalisis secara kualitatif. Analisis data kualitatif adalah pengelolaan data secara deduktif, yaitu dimulai dari dasar-dasar

pengetahuan yang umum kemudian meneliti hal yang bersifat khusus. Kemudian dari proses tersebut, ditarik sebuah kesimpulan. Kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan cara menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang terkait dengan penulisan skripsi ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap *Concursus Realis* Pada Tindak Pidana Pembunuhan dan Pencurian.

1. Posisi Kasus

Pada hari Minggu tanggal 12 April 2015 sekitar jam 10.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Kampung Bisei Desa Pattalasang Kec. Labakkang Kab. Pangkep terjadi kasus pembunuhan yang dilakukan oleh NURBAYA alias BAYA binti WA'MINU terhadap korban atas nama DIAH binti WADALLE. Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika Terdakwa BAYA Alias NURBAYA Binti WA'MINU dengan mengendarai sepeda motor Yamaha FIZ-R warna hitam mendatangi korban *DIAH Binti WADALLE* dirumah kakak korban yang bernama TOU guna menanyakan tentang tuduhan korban kepada Terdakwa yang merasa Terdakwa mengganggu pacar korban, lalu sesampainya ditempat tersebut Terdakwa melihat korban sedang duduk dibawah kolom rumah selanjutnya Terdakwa menghampiri korban dimana saat percakapan antara Terdakwa dengan korban tersebut korban tetap menuduh Terdakwa mengganggu pacarnya dan mendorong Terdakwa sehingga saat itu Terdakwa emosi kemudian Terdakwa mengambil potongan kayu yang berada didepannya lalu Terdakwa

mengayunkan potongan kayu tersebut dengan menggunakan kedua tangannya kearah leher bagian belakang korban sebanyak 1 (satu) kali hingga korban jatuh tersungkur ketanah dimana saat itu korban berusaha untuk berdiri namun pada saat korban hendak berdiri Terdakwa kembali memukul korban dengan menggunakan potongan kayu tersebut pada bagian leher hingga korban kembali terjatuh selanjutnya Terdakwa kembali melakukan pemukulan terhadap korban secara berulang kali yang mengenai tubuh dan kepala korban;

Bahwa selanjutnya setelah memastikan korban tidak berdaya kemudian Terdakwa menarik korban dengan menggunakan sarung yang saat itu terikat dipinggang korban masuk kedalam gudang yang berada dibawah kolom rumah tersebut, lalu setelah berada didalam gudang kemudian Terdakwa mengambil cangkul yang berada dibelakang pintu gudang lalu Terdakwa menggali lubang didalam gudang tersebut lalu setelah lubang tersebut jadi dengan ukuran kedalam 50 cm, lebar 60 cm dan panjang 130 cm kemudian Terdakwa memasukkan korban kedalam lubang tersebut lalu setelah korban berada didalam lubang kemudian Terdakwa menutup lubang tersebut dengan menggunakan tanah hingga lobang tersebut rata kembali selanjutnya Terdakwa keluar dari dalam gudang tersebut guna mengambil 5 (lima) karung yang berisikan kotoran ayam yang berada dibagian depan rumah tersebut yang kemudian 5 (lima) karung tersebut diletakkan diatas timbunan tanah setelah itu Terdakwa

kembali mengambil 1 (satu) buah karung yang berisi arang yang berada didalam gudang tersebut yang kemudian karung yang berisi arang tersebut diletakkan disamping karung berisi kotoran ayam tersebut.

Bahwa setelah Terdakwa memastikan korban telah tertimbun kemudian Terdakwa keluar dari gudang tersebut dan setelah berada diluar Terdakwa mengambil tas kecil milik korban yang tersimpan diatas tempat duduk yang kemudian tas tersebut dimasukkan kedalam kantong celana Terdakwa lalu Terdakwa meninggalkan tempat tersebut menuju kerumahnya dengan mengendarai sepeda motornya lalu setelah berada dirumahnya kemudian Terdakwa membuka dompet milik korban tersebut lalu mengambil 1 (satu) lembar nota investasi senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang sebelumnya disimpan oleh korban di toko perhiasan emas "HENDRA" milik saksi BAHARUDDIN Alias PUANG BAHAR yang selanjutnya pada tanggal 15 April 2015 Terdakwa dengan membawa nota tersebut mendatangi toko perhiasan emas milik saksi BAHARUDDIN Alias PUANG BAHAR dan meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan bahwa DIAH (korban) sakit keras butuh biaya operasi di Rumah sakit sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), namun pada saat itu saksi BAHARUDDIN Alias PUANG BAHAR tidak memiliki uang tunai sehingga saat itu saksi BAHARUDDIN Alias PUANG BAHAR memberikan perhiasan emas

berupa 1 (satu) buah cincin, 1 (satu) buah kalung dan 1 (satu) buah gelang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan mengganti nota investasi milik korban tersebut senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), lalu setelah menerima perhiasan emas tersebut kemudian Terdakwa menjual perhiasan emas tersebut kepada penjual emas di Pasar Bonto bila bila yang Terdakwa tidak kenal namanya dengan harga Rp. 6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah) yang selanjutnya hasil penjualan emas tersebut digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-harinya. Selanjutnya pada tanggal 05 Mei 2015 Terdakwa kembali mendatangi toko emas milik saksi BAHARUDDIN Alias PUANG BAHAR dengan membawa nota investasi senilai Rp. 20.000.000,- lalu Terdakwa menyampaikan bahwa DIAH masih butuh uang untuk biaya operasi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga pada saat itu saksi BAHARUDDIN Alias PUANG BAHAR memberikan perhiasan emas kepada Terdakwa senilai Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) lalu mengganti nota investasi yang dibawa oleh Terdakwa tersebut dengan nota sisa investasi sebesar Rp. 15.800.000,- (lima belas juta delapan ratus ribu rupiah), lalu setelah menerima perhiasan emas tersebut kemudian Terdakwa pada tanggal 07 Mei 2015 menggadaikan perhiasan emas tersebut di pegadaian Palampang Kab. Pangkep dengan nilai gadai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian uang gadai tersebut digunakan Terdakwa untuk

kebutuhannya yang selanjutnya Terdakwa melarikan diri ke Siwa Kab. Wajo hingga pada tanggal 19 Mei 2015 Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian di Siwa Kab. Wajo;

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan disusun dengan cara merangkai perpaduan antara fakta-fakta perbuatan tersebut dengan unsur-unsur tindak pidana yang bersangkutan. Surat dakwaan yang disusun harus memenuhi persyaratan baik formil maupun materiil, sesuai dengan bunyi Pasal 143 Ayat (2) huruf a KUHP disebutkan bahwa syarat formil surat dakwaan meliputi :

- a. Surat dakwaan harus dibubuhi tanggal dan tanda tangan penuntut umum pembuat surat dakwaan;
- b. Surat dakwaan harus memenuhi secara lengkap identitas terdakwa yang meliputi: nama lengkap, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan;

Adapun syarat-syarat materiil surat dakwaan adalah tentang :

- 1) Tindak pidana yang dilakukan;
- 2) Siapa yang melakukan tindak pidana;
- 3) Dimana tindak pidana dilakukan;
- 4) Kapan tindak pidana dilakukan;
- 5) Bagaimana tindak pidana dilakukan,;

- 6) Akibat apa yang ditimbulkan tindak pidana tersebut (delik materiil);
- 7) Apa yang mendorong terdakwa melakukan tindak pidana tersebut (delik-delik tertentu);
- 8) Ketentuan-ketentuan pidana yang diterapkan.

Surat Dakwaan adalah sebuah akta yang dibuat oleh penuntut umum yang berisi perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa berdasarkan kesimpulan dari hasil penyidikan. Surat dakwaan merupakan senjata yang hanya bisa digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan atas asas oportunitas yang memberikan hak kepada jaksa penuntut umum sebagai wakil dari negara untuk melakukan penuntutan kepada terdakwa pelaku tindak pidana.

Dalam surat dakwaan uraiannya harus Jelas, maksudnya ialah penuntut umum harus mampu merumuskan unsur-unsur tindak pidana (delik) yang didakwakan secara jelas dalam arti rumusan unsur-unsur delik harus dapat dipadukan dan dijelaskan dalam bentuk uraian fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dengan kata lain uraian unsur-unsur delik yang dirumuskan dalam Pasal yang didakwakan harus dapat dijelaskan atau digambarkan dalam bentuk fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dengan perumusan unsur tindak pidana secara jelas dapat dicegah terjadinya kekaburan dalam surat dakwaan (*obscur libel*). Surat dakwaan setidaknya-tidaknya memuat :

- 1) Unsur tindak pidana yang dilakukan;

- 2) Fakta dari perbuatan materiil yang mendukung setiap unsur delik;
- 3) Cara perbuatan materiil dilakukan.

Selain harus jelas surat dakwaan harus lengkap dimana dalam menyusun surat dakwaan harus diuraikan unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam UU secara lengkap dalam arti tidak boleh ada yang tercecer atau tertinggal tidak tercantum dalam surat dakwaan. Surat dakwaan harus dibuat sedemikian rupa dimana semua harus diuraikan, baik unsur tindak pidana yang didakwakan, perbuatan materiil, waktu dan tempat dimana tindak pidana dilakukan sehingga tidak satupun hal yang luput dari kesalahan dalam rangka usaha pembuktian di dalam sidang pengadilan.

Setelah melihat Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene No 87/Pid.B/2015/PN.PKJ. dapat disimpulkan bahwa dakwaan yang disusun jaksa penuntut umum adalah surat dakwaan Subsidiaritas. Surat dakwaan subsidiar adalah surat dakwaan yang di dalamnya dirumuskan beberapa tindak pidana secara berlapis dimulai dari delik yang paling berat ancaman pidannya sampai dengan yang paling ringan. Akan tetapi yang sesungguhnya didakwakan terhadap terdakwa terdakwa dan yang harus dibuktikan di depan sidang pengadilan hanya “satu” dakwaan. Dalam hal ini pembuat dakwaan bermaksud agar hakim memeriksa secara cermat perkara tersebut. Ini dapat dilihat dalam susunan dakwaan Jaksa Penuntut

Umum dalam perkara dengan Nomor Register Perkara: 87/Pid.B/2015/PN.PKJ, sebagai berikut:

PERTAMA:

Dakwaan Primair (Kesatu):

Bahwa ia Terdakwa BAYA Alias NURBAYA Binti WA'MINU, pada hari Minggu tanggal 12 April 2015 sekitar jam 10.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Kampung Bisei Desa Pattalasang Kec. Labakkang Kab. Pangkep atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain akan tetapi masih termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili perkaranya oleh Pengadilan Negeri Pangkep, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu nyawa korban DIAH Binti WADALLE dengan diikuti, disertai, atau di dahului dengan tindak pidana dan dilakukan dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan perbuatan itu, atau jika tertangkap tangan untuk melepaskan diri sendiri atau sekutunya daripada pidana, atau supaya barang yang didapatnya dengan melawan hukum tetap ada dalam tangannya*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika Terdakwa BAYA Alias NURBAYA Binti WA'MINU dengan mengendarai sepeda motor Yamaha FIZ-R warna hitam mendatangi korban DIAH Binti WADALLE dirumah kakak korban yang bernama TOU guna menanyakan tentang tuduhan korban kepada Terdakwa yang merasa Terdakwa mengganggu pacar korban, lalu sesampainya ditempat tersebut Terdakwa melihat korban sedang duduk dibawah kolom rumah selanjutnya Terdakwa menghampiri korban dimana saat percakapan antara Terdakwa dengan korban tersebut korban tetap menuduh Terdakwa mengganggu pacarnya dan mendorong Terdakwa sehingga saat itu Terdakwa emosi kemudian Terdakwa mengambil potongan kayu yang berada didepannya lalu Terdakwa mengayunkan potongan kayu tersebut dengan menggunakan kedua tangannya kearah leher bagian belakang korban sebanyak 1 (satu) kali hingga korban jatuh tersungkur ketanah dimana saat itu korban berusaha untuk berdiri namun pada saat korban hendak berdiri Terdakwa kembali memukul korban dengan menggunakan potongan kayu tersebut pada bagian leher hingga korban kembali terjatuh selanjutnya Terdakwa kembali melakukan pemukulan terhadap korban secara berulang kali yang mengenai tubuh dan kepala korban;

- Bahwa selanjutnya setelah memastikan korban tidak berdaya kemudian Terdakwa menarik korban dengan menggunakan sarung yang saat itu terikat dipinggang korban masuk kedalam gudang yang berada dibawah kolom rumah tersebut, lalu setelah berada didalam gudang kemudian Terdakwa mengambil cangkul yang berada dibelakang pintu gudang lalu Terdakwa menggali lubang didalam gudang tersebut lalu setelah lubang tersebut jadi dengan ukuran kedalam 50 cm, lebar 60 cm dan panjang 130 cm kemudian Terdakwa memasukkan korban kedalam lubang tersebut lalu setelah korban berada didalam lubang kemudian Terdakwa menutup lubang tersebut dengan menggunakan tanah hingga lobang tersebut rata kembali selanjutnya Terdakwa keluar dari dalam gudang tersebut guna mengambil 5 (lima) karung yang berisikan kotoran ayam yang berada dibagian depan rumah tersebut yang kemudian 5 (lima) karung tersebut diletakkan diatas timbunan tanah setelah itu Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) buah karung yang berisi arang yang berada didalam gudang tersebut yang kemudian karung yang berisi arang tersebut diletakkan disamping karung berisi kotoran ayam tersebut.
- Bahwa setelah Terdakwa memastikan korban telah tertimbun kemudian Terdakwa keluar dari gudang tersebut dan setelah berada diluar Terdakwa mengambil tas kecil milik korban yang tersimpan diatas tempat duduk yang kemudian tas tersebut dimasukkan kedalam kantong celana Terdakwa lalu Terdakwa meninggalkan tempat tersebut menuju kerumahnya dengan mengendarai sepeda motornya lalu setelah berada dirumahnya kemudian Terdakwa membuka dompet milik korban tersebut lalu mengambil 1 (satu) lembar nota investasi senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang sebelumnya disimpan oleh korban di toko perhiasan emas "HENDRA" milik saksi BAHARUDDIN Alias PUANG BAHAR yang selanjutnya pada tanggal 15 April 2015 Terdakwa dengan membawa nota tersebut mendatangi toko perhiasan emas milik saksi BAHARUDDIN Alias PUANG BAHAR dan meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan bahwa DIAH (korban) sakit keras butuh biaya operasi di Rumah sakit sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), namun pada saat itu saksi BAHARUDDIN Alias PUANG BAHAR tidak memiliki uang tunai sehingga saat itu saksi BAHARUDDIN Alias PUANG BAHAR memberikan perhiasan emas berupa 1 (satu) buah cincin, 1 (satu) buah kalung dan 1 (satu) buah gelang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan mengganti nota investasi milik korban tersebut senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), lalu setelah menerima perhiasan emas tersebut kemudian Terdakwa menjual perhiasan emas tersebut

kepada penjual emas di Pasar Bonto bila bila yang Terdakwa tidak kenal namanya dengan harga Rp. 6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah) yang selanjutnya hasil penjualan emas tersebut digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-harinya. Selanjutnya pada tanggal 05 Mei 2015 Terdakwa kembali mendatangi toko emas milik saksi BAHARUDDIN Alias PUANG BAHAR dengan membawa nota investasi senilai Rp. 20.000.000,- lalu Terdakwa menyampaikan bahwa DIAH masih butuh uang untuk biaya operasi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga pada saat itu saksi BAHARUDDIN Alias PUANG BAHAR memberikan perhiasan emas kepada Terdakwa senilai Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) lalu mengganti nota investasi yang dibawa oleh Terdakwa tersebut dengan nota sisa investasi sebesar Rp. 15.800.000,- (lima belas juta delapan ratus ribu rupiah), lalu setelah menerima perhiasan emas tersebut kemudian Terdakwa pada tanggal 07 Mei 2015 menggadaikan perhiasan emas tersebut di pegadaian Palampang Kab. Pangkep dengan nilai gadai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian uang gadai tersebut digunakan Terdakwa untuk kebutuhannya yang selanjutnya Terdakwa melarikan diri ke Siwa Kab. Wajo hingga pada tanggal 19 Mei 2015 Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian di Siwa Kab. Wajo;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa terhadap korban DIAH Binti WADALLE tersebut mengakibatkan korban DIAH Binti WADALLE meninggal dunia dimana ditemukan luka sebagaimana Visum Et Repertum RS. Bhayangkara Makassar Nomor : 07-Mt/V/2015/Forensik yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. MAULUDDIN. M, SP.F, dimana dalam pemeriksaan terhadap jenazah korban DIAH Binti WADALLE ditemukan Fakta-Fakta sebagai berikut :

a. Tanatologi Mayat:

- Kaku mayat: Tidak ada
- Lebam mayat: tidak ada
- Pembusukan lanjut: ada, sebagian kulit mengering dan mengelupas;

b. Perlukaan :

- Ditemukan 1 (satu) luka memar intravital pada kepala belakang dengan ukuran 5,6 cm x 3,5 cm.
- Ditemukan 1 (satu) luka memar intravital pada dahi kanan dengan ukuran 5,5 cm x 4,3 cm.
- Ditemukan 1 (satu) luka memar intravital pada leher kanan dengan ukuran 4,5 cm x 4,1 cm.
- Ditemukan 1 (satu) luka memar intravital pada dada kiri dengan ukuran 7,5 cm x 4,5 cm.

- Ditemukan 1 (satu) luka memar intravital pada lengan atas kanan dengan ukuran 5,5 cm x 3,5 cm
 - c. Tanda tanda Asfiksia;
 - Peteki (bintik pendarahan) pada Selaput Kelopak Mata dalam: tidak dapat dinilai;
 - Kebiruan (sianosis) pada bibir: tidak dapat dinilai;
 - Kebiruan (sianosis) pada kuku jari tangan dan kaki: tidak dapat dinilai;
 - d. Bedah mayat :
 - Rongga kepala : Pendarahan pada daerah otak besar (Epidural bleeding) dan penekanan batang otak (herniasi).
 - Rongga dada : Retak pada tulang iga kiri 4, 5 dan 6.
 - Rongga perut : tidak ada kelainan;
- Dengan kesimpulan:
- Telah diperiksa satu korban mati berjenis kelamin perempuan dan berusia dewasa.
 - Perkiraan waktu kematian \pm 1 (satu) bulan dari waktu pemeriksaan.
 - Ditemukan luka memar intravital (dialami korban sewaktu masih hidup) pada kepala belakang, dahi kanan, leher kanan, dan lengan atas kanan akibat trauma tumpul.
 - Penyebab kematian korban dapat berhubungan dengan cidera kepala berat akibat kekerasan tumpul pada kepala bagian belakang sehingga terjadi pendarahan otak yang beresiko menyebabkan kematian secara langsung dan cepat.
- Bahwa Terdakwa telah dengan sengaja melakukan serangkaian perbuatan sebagaimana terurai diatas dimana perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut bertujuan untuk merampas nyawa korban DIAH Binti WADALLE yaitu melakukan pemukulan dengan menggunakan potongan kayu terhadap organ/bagian tubuh vital korban DIAH Binti WADALLE yaitu pada kepala, leher serta beberapa bagian tubuh yang lainnya, sehingga korban DIAH Binti WADALLE meninggal dunia atas adanya luka yang dialaminya tersebut, dan setelah terdakwa melakukan perbuatannya tersebut terhadap korban DIAH Binti WADALLE, maka terdakwa mengambil dompet milik korban yang berisi nota investasi di toko perhiasan emas, dimana hal tersebut bertujuan untuk mempersiapkan atau mempermudah perbuatannya tersebut atau untuk melepaskan diri sendiri jika terdakwa tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya tersebut.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHP;

Dakwaan Subsidair (Kedua):

Bahwa ia Terdakwa BAYA Alias NURBAYA Binti WA'MINU, pada hari Minggu tanggal 12 April 2015 sekitar jam 10.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Kampung Bisei Desa Pattalasang Kec. Labakkang Kab. Pangkep atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain akan tetapi masih termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili perkaranya oleh Pengadilan Negeri Pangkep, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu nyawa korban DIAH Binti WADALLE*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika Terdakwa BAYA Alias NURBAYA Binti WA'MINU dengan mengendarai sepeda motor Yamaha FIZ-R warna hitam mendatangi korban DIAH Binti WA'DALLE dirumah kakak korban yang bernama TOU guna menanyakan tentang tuduhan korban kepada terdakwa yang merasa terdakwa mengganggu pacar korban, lalu sesampainya ditempat tersebut terdakwa melihat korban sedang duduk dibawah kolom rumah selanjutnya terdakwa menghampiri korban dimana saat percakapan antara terdakwa dengan korban tersebut korban tetap menuduh terdakwa mengganggu pacarnya dan mendorong terdakwa sehingga saat itu terdakwa emosi kemudian terdakwa mengambil potongan kayu yang berada didepannya lalu terdakwa mengayunkan potongan kayu tersebut dengan menggunakan kedua tangannya kearah leher bagian belakang korban sebanyak 1 (satu) kali hingga korban jatuh tersungkur ketanah dimana saat itu korban berusaha untuk berdiri namun pada saat korban hendak berdiri terdakwa kembali memukul korban dengan menggunakan potongan kayu tersebut pada bagian leher hingga korban kembali terjatuh selanjutnya terdakwa kembali melakukan pemukulan terhadap korban secara berulang kali yang mengenai tubuh dan kepala korban;
- Bahwa selanjutnya setelah memastikan korban tidak berdaya kemudian terdakwa menarik korban dengan menggunakan sarung yang saat itu terikat dipinggang korban masuk kedalam gudang yang berada dibawah kolom rumah tersebut, lalu setelah berada didalam gudang kemudian terdakwa mengambil cangkul yang berada dibelakang pintu gudang lalu terdakwa menggali lubang didalam gudang tersebut lalu setelah lubang tersebut jadi

dengan ukuran kedalam 50 cm, lebar 60 cm dan panjang 130 cm kemudian terdakwa memasukkan korban kedalam lubang tersebut lalu setelah korban berada didalam lubang kemudian terdakwa menutup lubang tersebut dengan menggunakan tanah hingga lobang tersebut rata kembali selanjutnya terdakwa keluar dari dalam gudang tersebut guna mengambil 5 (lima) karung yang berisikan kotoran ayam yang berada dibagian depan rumah tersebut yang kemudian 5 (lima) karung tersebut diletakkan diatas timbunan tanah setelah itu terdakwa kembali mengambil 1 (satu) buah karung yang berisi arang yang berada didalam gudang tersebut yang kemudian karung yang berisi arang tersebut diletakkan disamping karung berisi kotoran ayam tersebut;

- Bahwa setelah terdakwa memastikan korban telah tertimbun kemudian terdakwa keluar dari gudang tersebut dan setelah berada diluar terdakwa mengambil tas kecil milik korban yang tersimpan diatas tempat duduk yang kemudian tas tersebut dimasukkan kedalam kantong celana terdakwa lalu terdakwa meninggalkan tempat tersebut menuju kerumahnya dengan mengendarai sepeda motornya lalu setelah berada dirumahnya kemudian terdakwa membuka dompet milik korban tersebut lalu mengambil 1 (satu) lembar nota investasi senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang sebelumnya disimpan oleh korban di toko perhiasan emas "HENDRA" milik saksi BAHARUDDIN Alias PUANG BAHAR yang selanjutnya pada tanggal 15 April 2015 terdakwa dengan membawa nota tersebut mendatangi toko perhiasan emas milik saksi BAHARUDDIN Alias PUANG BAHAR dan meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan bahwa DIAH (korban) sakit keras butuh biaya operasi di Rumah sakit sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), namun pada saat itu saksi BAHARUDDIN Alias PUANG BAHAR tidak memiliki uang tunai sehingga saat itu saksi BAHARUDDIN Alias PUANG BAHAR memberikan perhiasan emas berupa 1 (satu) buah cincin, 1 (satu) buah kalung dan 1 (satu) buah gelang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan mengganti nota investasi milik korban tersebut senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), lalu setelah menerima perhiasan emas tersebut kemudian terdakwa menjual perhiasan emas tersebut kepada penjual emas di Pasar Bonto bila bila yang terdakwa tidak kenal namanya dengan harga Rp. 6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah) yang selanjutnya hasil penjualan emas tersebut digunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-harinya;
- Selanjutnya pada tanggal 05 Mei 2015 terdakwa kembali mendatangi toko emas milik saksi BAHARUDDIN Alias PUANG BAHAR dengan membawa nota investasi senilai Rp.

20.000.000,- lalu terdakwa menyampaikan bahwa DIAH masih butuh uang untuk biaya operasi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga pada saat itu saksi BAHARUDDIN Alias PUANG BAHAR memberikan perhiasan emas kepada terdakwa senilai Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) lalu mengganti noto investasi yang dibawa oleh terdakwa tersebut dengan nota sisa investasi sebesar Rp. 15.800.000,- (lima belas juta delapan ratus ribu rupiah), lalu setelah menerima perhiasan emas tersebut kemudian terdakwa pada tanggal 07 Mei 2015 menggadaikan perhiasan emas tersebut di pegadaian Palampang Kab. Pangkep dengan nilai gadai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian uang gadai tersebut digunakan terdakwa untuk kebutuhannya yang selanjutnya terdakwa melarikan diri ke Siwa Kab. Wajo hingga pada tanggal 19 Mei 2015 terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian di Siwa Kab. Wajo;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa terhadap korban DIAH Binti WADALLE tersebut mengakibatkan korban DIAH Binti WADALLE meninggal dunia dimana ditemukan luka sebagaimana Visum Et Repertum RS. Bhayangkara Makassar Nomor : 07-Mt/V/2015/Forensik yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. MAULUDDIN. M, SP.F, dimana dalam pemeriksaan terhadap jenazah korban DIAH Binti WADALLE ditemukan Fakta-Fakta sebagai berikut :
 - a. Tanatologi Mayat :
 - Kaku mayat : Tidak ada;
 - Lebam mayat : tidak ada;
 - Pembusukan lanjut : ada, sebagian kulit mengering dan mengelupas;
 - b. Perlukaan :
 - Ditemukan 1 (satu) luka memar intravital pada kepala belakang dengan ukuran 5,6 cm x 3,5 cm;
 - Ditemukan 1 (satu) luka memar intravital pada dahi kanan dengan ukuran 5,5 cm x 4,3 cm;
 - Ditemukan 1 (satu) luka memar intravital pada leher kanan dengan ukuran 4,5 cm x 4,1 cm;
 - Ditemukan 1 (satu) luka memar intravital pada dada kiri dengan ukuran 7,5 cm x 4,5 cm;
 - Ditemukan 1 (satu) luka memar intravital pada lengan atas kanan dengan ukuran 5,5 cm x 3,5 cm.
 - c. Tanda tanda Asfiksia;
 - Peteki (bintik pendarahan) pada Selaput Kelopak Mata dalam : tidak dapat dinilai;
 - Kebiruan (sianosis) pada bibir : tidak dapat dinilai;
 - Kebiruan (sianosis) pada kuku jari tangan dan kaki : tidak dapat dinilai

d. Bedah mayat

- Rongga kepala : Pendarahan pada daerah otak besar (Epidural bleeding) dan penekanan batang otak (herniasi);
- Rongga dada : Retak pada tulang iga kiri 4, 5 dan 6;
- Rongga perut : tidak ada kelainan;

Dengan kesimpulan :

- Telah diperiksa satu korban mati berjenis kelamin perempuan dan berusia dewasa;
- Perkiraan waktu kematian \pm 1 (satu) bulan dari waktu pemeriksaan.
- Ditemukan luka memar intravital (dialami korban sewaktu masih hidup) pada kepala belakang, dahi kanan, leher kanan, dan lengan atas kanan akibat trauma tumpul;
- Penyebab kematian korban dapat berhubungan dengan cidera kepala berat akibat kekerasan tumpul pada kepala bagian belakang sehingga terjadi pendarahan otak yang beresiko menyebabkan kematian secara langsung dan cepat;
- Bahwa terdakwa telah dengan sengaja melakukan serangkaian perbuatan sebagaimana terurai diatas dimana perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut bertujuan untuk merampas nyawa korban DIAH Binti WADALLE yaitu melakukan pemukulan dengan menggunakan potongan kayu terhadap organ / bagian tubuh vital korban DIAH Binti WADALLE yaitu pada kepala, leher serta beberapa bagian tubuh yang lainnya, sehingga korban DIAH Binti WADALLE meninggal dunia atas adanya luka yang dialaminya tersebut;
Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

Dakwaan Lebih Subsidair (Ketiga):

Bahwa ia terdakwa BAYA Alias NURBAYA Binti WA'MINU, pada hari Minggu tanggal 12 April 2015 sekitar jam 10.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Kampung Bisei Desa Pattalasang Kec.Labakkang Kab. Pangkep atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain akan tetapi masih termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili perkaranya oleh Pengadilan Negeri Pangkep, telah melakukan penganiayaan mengakibatkan matinya orang yaitu korban DIAH Binti WADALLE, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika terdakwa BAYA Alias NURBAYA Binti WA'MINU dengan mengendarai sepeda motor Yamaha FIZ-R warna hitam mendatangi korban DIAH Binti WADALLE dirumah kakak korban yang bernama TOU guna menanyakan tentang tuduhan korban kepada terdakwa yang merasa terdakwa mengganggu pacar korban, lalu sesampainya ditempat tersebut terdakwa melihat korban sedang duduk dibawah kolom

rumah selanjutnya terdakwa menghampiri korban dimana saat percakapan antara terdakwa dengan korban tersebut korban tetap menuduh terdakwa mengganggu pacarnya dan mendorong terdakwa sehingga saat itu terdakwa emosi kemudian terdakwa mengambil potongan kayu yang berada didepannya lalu terdakwa mengayunkan potongan kayu tersebut dengan menggunakan kedua tangannya kearah leher bagian belakang korban sebanyak 1 (satu) kali hingga korban jatuh tersungkur ketanah dimana saat itu korban berusaha untuk berdiri namun pada saat korban hendak berdiri terdakwa kembali memukul korban dengan menggunakan potongan kayu tersebut pada bagian leher hingga korban kembali terjatuh selanjutnya terdakwa kembali melakukan pemukulan terhadap korban secara berulang kali yang mengenai tubuh dan kepala korban;

- Bahwa selanjutnya setelah memastikan korban tidak berdaya kemudian terdakwa menarik korban dengan menggunakan sarung yang saat itu terikat dipinggang korban masuk kedalam gudang yang berada dibawah kolom rumah tersebut, lalu setelah berada didalam gudang kemudian terdakwa mengambil cangkul yang berada dibelakang pintu gudang lalu terdakwa menggali lubang didalam gudang tersebut lalu setelah lubang tersebut jadi dengan ukuran kedalam 50 cm, lebar 60 cm dan panjang 130 cm kemudian terdakwa memasukkan korban kedalam lubang tersebut lalu setelah korban berada didalam lubang kemudian terdakwa menutup lubang tersebut dengan menggunakan tanah hingga lobang tersebut rata kembali selanjutnya terdakwa keluar dari dalam gudang tersebut guna mengambil 5 (lima) karung yang berisikan kotoran ayam yang berada dibagian depan rumah tersebut yang kemudian 5 (lima) karung tersebut diletakkan diatas timbunan tanah setelah itu terdakwa kembali mengambil 1 (satu) buah karung yang berisi arang yang berada didalam gudang tersebut yang kemudian karung yang berisi arang tersebut diletakkan disamping karung berisi kotoran ayam tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa memastikan korban telah tertimbun kemudian terdakwa keluar dari gudang tersebut dan setelah berada diluar terdakwa mengambil tas kecil milik korban yang tersimpan diatas tempat duduk yang kemudian tas tersebut dimasukkan kedalam kantong celana terdakwa lalu terdakwa meninggalkan tempat tersebut menuju kerumahnya dengan mengendarai sepeda motornya lalu setelah berada dirumahnya kemudian terdakwa membuka dompet milik korban tersebut lalu mengambil 1 (satu) lembar nota investasi senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang sebelumnya disimpan oleh korban di toko perhiasan emas "HENDRA" milik saksi BAHARUDDIN Alias PUANG BAHAR yang selanjutnya pada tanggal 15 April 2015 terdakwa dengan membawa nota tersebut mendatangi toko perhiasan emas milik saksi BAHARUDDIN Alias PUANG BAHAR dan meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

dengan alasan bahwa DIAH (korban) sakit keras butuh biaya operasi di Rumah sakit sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), namun pada saat itu saksi BAHARUDDIN Alias PUANG BAHAR tidak memiliki uang tunai sehingga saat itu saksi BAHARUDDIN Alias PUANG BAHAR memberikan perhiasan emas berupa 1 (satu) buah cincin, 1 (satu) buah kalung dan 1 (satu) buah gelang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan mengganti nota investasi milik korban tersebut senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), lalu setelah menerima perhiasan emas tersebut kemudian terdakwa menjual perhiasan emas tersebut kepada penjual emas di Pasar Bonto bila bila yang terdakwa tidak kenal namanya dengan harga Rp. 6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah) yang selanjutnya hasil penjualan emas tersebut digunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-harinya;

- Selanjutnya pada tanggal 05 Mei 2015 terdakwa kembali mendatangi toko emas milik saksi BAHARUDDIN Alias PUANG BAHAR dengan membawa nota investasi senilai Rp. 20.000.000,- lalu terdakwa menyampaikan bahwa DIAH masih butuh uang untuk biaya operasi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga pada saat itu saksi BAHARUDDIN Alias PUANG BAHAR memberikan perhiasan emas kepada terdakwa senilai Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) lalu mengganti nota investasi yang dibawa oleh terdakwa tersebut dengan nota sisa investasi sebesar Rp. 15.800.000,- (lima belas juta delapan ratus ribu rupiah), lalu setelah menerima perhiasan emas tersebut kemudian terdakwa pada tanggal 07 Mei 2015 menggadaikan perhiasan emas tersebut di pegadaian Palampang Kab. Pangkep dengan nilai gadai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian uang gadai tersebut digunakan terdakwa untuk kebutuhannya yang selanjutnya terdakwa melarikan diri ke Siwa Kab. Wajo hingga pada tanggal 19 Mei 2015 terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian di Siwa Kab. Wajo;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa terhadap korban DIAH Binti WADALLE tersebut mengakibatkan korban DIAH Binti WADALLE meninggal dunia dimana ditemukan luka sebagaimana Visum Et Repertum RS. Bhayangkara Makassar Nomor:07-Mt/V/2015/Forensik yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. MAULUDDIN. M, SP.F, dimana dalam pemeriksaan terhadap jenazah korban DIAH Binti WADALLE ditemukan Fakta-Fakta sebagai berikut :
 - a. Tanatologi Mayat :
 - Kaku mayat: Tidak ada;
 - Lebam mayat: tidak ada
 - Pembusukan lanjut: ada, sebagian kulit mengering dan mengelupas.
 - b. Perlukaan :
 - Ditemukan 1 (satu) luka memar intravital pada kepala belakang dengan ukuran 5,6 cm x 3,5 cm;

- Ditemukan 1 (satu) luka memar intravital pada dahi kanan dengan ukuran 5,5 cm x 4,3 cm;
- Ditemukan 1 (satu) luka memar intravital pada leher kanan dengan ukuran 4,5 cm x 4,1 cm;
- Ditemukan 1 (satu) luka memar intravital pada dada kiri dengan ukuran 7,5 cm x 4,5 cm.
- Ditemukan 1 (satu) luka memar intravital pada lengan atas kanan dengan ukuran 5,5 cm x 3,5 cm.

b. Tanda tanda Asfiksia;

- Peteki (bintik pendarahan) pada Selaput Kelopak Mata dalam : tidak dapat dinilai;
- Kebiruan (sianosis) pada bibir : tidak dapat dinilai;
- Kebiruan (sianosis) pada kuku jari tangan dan kaki : tidak dapat dinilai

c. Bedah mayat

- Rongga kepala : Pendarahan pada daerah otak besar (Epidural bleeding) dan penekanan batang otak (herniasi).
- Rongga dada : Retak pada tulang iga kiri 4, 5 dan 6.
- Rongga perut : tidak ada kelainan;

Dengan kesimpulan :

- Telah diperiksa satu korban mati berjenis kelamin perempuan dan berusia dewasa;
- Perkiraan waktu kematian \pm 1 (satu) bulan dari waktu pemeriksaan.
- Ditemukan luka memar intravital (dialami korban sewaktu masih hidup) pada kepala belakang, dahi kanan, leher kanan, dan lengan atas kanan akibat trauma tumpul.
- Penyebab kematian korban dapat berhubungan dengan cedera kepala berat akibat kekerasan tumpul pada kepala bagian belakang sehingga terjadi pendarahan otak yang beresiko menyebabkan kematian secara langsung dan cepat;
- Bahwa Terdakwa telah dengan sengaja melakukan serangkaian perbuatan sebagaimana terurai diatas dimana perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut bertujuan untuk merampas nyawa korban DIAH Binti WADALLE yaitu melakukan pemukulan dengan menggunakan potongan kayu terhadap organ / bagian tubuh vital korban DIAH Binti WADALLE yaitu pada kepala, leher serta beberapa bagian tubuh yang lainnya, sehingga korban DIAH Binti WADALLE meninggal dunia atas adanya luka yang dialaminya tersebut;
Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa BAYA Alias NURBAYA Binti WA'MINU, pada hari Minggu tanggal 12 April 2015 sekitar jam 10.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Kampung Bisei Desa Pattalasang Kec. Labakkang Kab. Pangkep atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain akan tetapi masih termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili perkaranya oleh Pengadilan Negeri Pangkep, *mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri mengakibatkan matinya orang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika terdakwa BAYA Alias NURBAYA Binti WA'MINU dengan mengendarai sepeda motor Yamaha FIZ-R warna hitam mendatangi korban DIAH Binti WADALLE dirumah kakak korban yang bernama TOU lalu sesampainya ditempat tersebut terdakwa melihat korban sedang duduk dibawah kolom rumah selanjutnya terdakwa menghampiri korban dimana saat percakapan tersebut terdakwa dituduh oleh korban bahwa terdakwa telah mengganggu pacarnya dan mendorong korban sehingga saat itu terdakwa emosi kemudian terdakwa mengambil potongan kayu yang berada didepannya lalu terdakwa mengayunkan potongan kayu tersebut dengan menggunakan kedua tangannya kearah leher bagian belakang korban sebanyak 1 (satu) kali hingga korban jatuh tersungkur ketanah dimana saat itu korban berusaha untuk berdiri namun pada saat korban hendak berdiri terdakwa kembali memukul korban dengan menggunakan potongan kayu tersebut pada bagian leher hingga korban kembali terjatuh selanjutnya terdakwa kembali melakukan pemukulan terhadap korban secara berulang kali yang mengenai tubuh dan kepala korban;
- Bahwa selanjutnya setelah memastikan korban tidak berdaya kemudian terdakwa menarik korban dengan menggunakan sarung yang saat itu terikat dipinggang korban masuk kedalam gudang yang berada dibawah kolom rumah tersebut, lalu setelah berada didalam gudang kemudian terdakwa mengambil cangkul yang berada dibelakang pintu gudang tersebut lalu terdakwa menggali lubang didalam gudang tersebut lalu setelah lubang tersebut jadi dengan ukuran kedalam 50 cm, lebar 60 cm dan panjang 130 cm kemudian terdakwa memasukkan korban kedalam lubang tersebut lalu setelah korban berada didalam lubang kemudian terdakwa menutup lubang tersebut dengan

menggunakan tanah hingga lobang tersebut rata kembali selanjutnya terdakwa mengambil keluar dari dalam gudang tersebut mengambil 5 (lima) karung yang berisikan kotoran ayam yang berada dibagian depan rumah tersebut yang kemudian 5 (lima) karung tersebut diletakkan diatas timbunan tanah setelah itu terdakwa kembali mengambil 1 (satu) buah karung yang berisi arang yang berada didalam gudang tersebut yang kemudian karung yang berisi arang tersebut diletakkan disamping karung berisi kotoran ayam;

- Bahwa setelah terdakwa memastikan korban telah tertimbun kemudian terdakwa keluar dari gudang tersebut dan setelah berada diluar terdakwa mengambil tas kecil milik korban yang tersimpan diatas tempat duduk yang kemudian tas tersebut dimasukkan kedalam kantong celanan terdakwa lalu terdakwa meninggalkan tempat tersebut menuju kerumahnya dengan mengendarai sepeda motornya lalu setelah berada dirumahnya kemudian terdakwa membuka dompet milik korban tersebut lalu mengambil 1 (satu) lembar nota investasi senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang sebelumnya disimpan oleh korban di toko perhiasan emas "HENDRA" milik saksi BAHARUDDIN Alias PUANG BAHAR yang selanjutnya pada tanggal 15 April 2015 terdakwa dengan membawa nota tersebut mendatangi toko perhiasan emas milik saksi BAHARUDDIN Alias PUANG BAHAR dan meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan bahwa DIAH (korban) sakit keras butuh biaya operasi di Rumah sakit sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), namun pada saat itu saksi BAHARUDDIN Alias PUANG BAHAR tidak memiliki uang tunai sehingga saat itu saksi BAHARUDDIN Alias PUANG BAHAR memberikan perhiasan emas berupa 1 (satu) buah cincin, 1 (satu) buah kalung dan 1 (satu) buah gelang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan mengganti nota investasi milik korban tersebut senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), lalu setelah menerima perhiasan emas tersebut kemudian terdakwa menjual perhiasan emas tersebut kepada penjual emas di Pasar Bonto bila bila yang terdakwa tidak kenal namanya dengan harga Rp. 6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah) yang selanjutnya hasil penjualan emas tersebut digunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-harinya;
- Selanjutnya pada tanggal 05 Mei 2015 terdakwa kembali mendatangi toko emas milik saksi BAHARUDDIN Alias PUANG BAHAR dengan membawa nota investasi senilai Rp. 20.000.000,- lalu terdakwa menyampaikan bahwa DIAH masih butuh uang untuk biaya operasi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sehingga pada saat itu saksi BAHARUDDIN Alias PUANG BAHAR memberikan perhiasan emas kepada terdakwa senilai Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) lalu mengganti nota investasi yang dibawa oleh terdakwa tersebut dengan nota sisa investasi sebesar Rp. 15.800.000,- (lima belas juta delapan ratus ribu rupiah), lalu setelah menerima perhiasan emas tersebut kemudian terdakwa pada tanggal 07 Mei 2015

menggadaikan perhiasan emas tersebut di pegadaian Palampang Kab. Pangkep dengan nilai gadai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian uang gadai tersebut digunakan terdakwa untuk kebutuhannya yang selanjutnya terdakwa melarikan diri ke Siwa Kab. Wajo hingga pada tanggal 19 Mei 2015 terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian di Siwa kab. Wajo;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa terhadap korban DIAH Binti WADALLE tersebut mengakibatkan korban DIAH Binti WADALLE meninggal dunia dimana ditemukan luka sebagaimana Visum Et Repertum RS. Bhayangkara Makassar Nomor : 07-Mt/V/2015/Forensik yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. MAULUDDIN. M, SP.F, dimana dalam pemeriksaan terhadap jenazah korban DIAH Binti WADALLE ditemukan Fakta-Fakta sebagai berikut:

a. Tanatologi Mayat :

- Kaku mayat : Tidak ada;
- Lebam mayat : tidak ada
- Pembusukan lanjut : ada, sebagian kulit mengering dan mengelupas.

b. Perlukaan :

- Ditemukan 1 (satu) luka memar intravital pada kepala belakang dengan ukuran 5,6 cm x 3,5 cm;
- Ditemukan 1 (satu) luka memar intravital pada dahi kanan dengan ukuran 5,5 cm x 4,3 cm;
- Ditemukan 1 (satu) luka memar intravital pada leher kanan dengan ukuran 4,5 cm x 4,1 cm;
- Ditemukan 1 (satu) luka memar intravital pada dada kiri dengan ukuran 7,5 cm x 4,5 cm;
- Ditemukan 1 (satu) luka memar intravital pada lengan atas kanan dengan ukuran 5,5 cm x 3,5 cm.

c. Tanda tanda Asfiksia;

- Peteki (bintik pendarahan) pada Selaput Kelopak Mata dalam: tidak dapat dinilai;
- Kebiruan (sianosis) pada bibir : tidak dapat dinilai;
- Kebiruan (sianosis) pada kuku jari tangan dan kaki : tidak dapat dinilai

d. Bedah mayat

- Rongga kepala : Pendarahan pada daerah otak besar (Epidural bleeding) dan penekanan batang otak (herniasi).
- Rongga dada : Retak pada tulang iga kiri 4, 5 dan 6.
- Rongga perut : tidak ada kelainan;

Dengan kesimpulan :

- Telah diperiksa satu korban mati berjenis kelamin perempuan dan berusia dewasa;
- Perkiraan waktu kematian \pm 1 (satu) bulan dari waktu pemeriksaan;

- Ditemukan luka memar intravital (dialami korban sewaktu masih hidup) pada kepala belakang, dahi kanan, leher kanan, dan lengan atas kanan akibat trauma benda tumpul;
- Penyebab kematian korban dapat berhubungan dengan cidera kepala berat akibat kekerasan tumpul pada kepala bagian belakang sehingga terjadi pendarahan otak yang beresiko menyebabkan kematian secara langsung dan cepat;
- Bahwa perbuatan terdakwa melakukan pemukulan terhadap tubuh korban DIAH Binti WADALLE dengan menggunakan potongan kayu tersebut dilakukannya dengan tujuan untuk mempermudah pelaksanaan perbuatan terdakwa dalam hal mengambil barang milik korban DIAH Binti WADALLE yaitu tas kecil / dompet yang berisi kwitansi investasi di toko perhiasan emas atau bertujuan untuk melepaskan diri sendiri jika terdakwa tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya tersebut;
Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (3) KUHP.

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Tuntutan pidana Penuntut umum Pada tanggal 27 agustus 2015, yang pada pokoknya mengajukan tuntutan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAYA Alias NURBAYA Binti WA'MINU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PEMBUNUHAN YANG DIKUTI, DISERTAI ATAU DIDAHULUI DENGAN TINDAK PIDANA" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHP dalam Dakwaan Kesatu PRIMAIR;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAYA Alias NURBAYA Binti WA'MINU dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) Tahun, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah cangkul;
 - 1 (satu) lembar potongan seng;
 - 1 (satu) batang potongan kayu;
 - 1 (satu) batang potongan bamboo;
 - 1 (satu) buah bando hitam;
 - 1 (satu) lembar kudung berwarna ungu;
 - 1 (satu) lembar kudung berwarna biru;
 - 1 (satu) lembar kudung berwarna kombinasi biru putih;
 - 7 (tujuh) karung berisi kotoran ayam;

- 4 (empat) karung berisi arang;
- 1 (satu) lembar nota sisa uang tersimpan senilai Rp.15.800.000,- tertanggal 5 Mei 2015;
- 1 (satu) buah gelang emas 16 karat;
- 1 (satu) buah gelang emas 12 karat;
- 1 (satu) buah cincin emas 14 karat;

Dikembalikan kepada keluarga korban yakni saksi TOU Binti WADALLE;

- 1 (satu) lembar surat bukti kredit pegadaian No. 11268-15-01004036-6 dengan barang jaminan satu gelang perhiasan emas 16 karat, satu buah gelang emas 12 karat dan satu buah cincin emas 14 karat dengan nilai uang pinjaman sebesar Rp. 2.500.000,-;
- 1 (satu) lembar nota penyimpanan 1 buah ringgit peso dan uang Rp. 10.000.000,- tertanggal 26 Desember 2014 dengan nilai Rp. 30.000.000,-;
- 1 (satu) lembar nota penyimpanan 1 buah ringgit pesos tertanggal 15 April 2015 dengan nilai Rp. 20.000.000,-;
- 1 (satu) lembar nota pengambilan 2 buah gelang dan 1 buah cincin senilai Rp. 4.200.000,-;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia model 6020 TYPE RM-30 berwarna hitam dengan nomor kartu 082348298299 milik perm. BAYA Alias Nurbaya Binti Wa'minu;
- 1 (satu) buah HP merk Nexian NX-T901 M-IMEI : 353256041407298, S.IMEI : 353256041927493 berwarna putih milik perm. BAYA Alias NURBAYA Binti WA'MINU;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fiz.R warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor mesin : 4WH-437400;
Dikembalikan kepada Terdakwa BAYA Alias NURBAYA Binti WA'MINU;
- Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

4. Analisis Penulis

Berdasarkan fakta hukum yang telah dijelaskan dalam posisi kasus di atas, diperoleh petunjuk bahwa telah terjadi gabungan tindak pidana (*concursum realis*) yang terdiri dari dua tindak pidana yaitu pembunuhan dan pencurian. Dalam putusannya hakim menjatuhkan

Pasal 338 KUHP yang menurut penulis tidak tepat. Hal ini dikarenakan penulis melihat kasus ini sebagai bentuk perbarengan tindak pidana (*concursum realis*). Dalam faktanya tindak pidana pencurian yang dilakukan pelaku telah terbukti dengan diperkuat keterangan saksi dan barang bukti yang dihadapkan dalam persidangan.

Jadi menurut penulis, seharusnya majelis hakim memutus dan mengabulkan dakwaan primair jaksa penuntut umum yaitu pelaku didakwa dengan Pasal 339 KUHP yang dengan menyebutkan secara tegas bahwa tindak pidana pembunuhan yang didahului, disertai, atau di ikuti dengan tindak pidana lain. Perbuatan ini beridiri sendiri dan tidak ada kaitan antara meninggalnya korban dengan hilangnya barang, sehingga jelas bahwa ada dua tindak pidana yang dilakukan. Terlihat dengan jelas bahwa unsur-unsur pada tindak pidana pencurian tidak dibuktikan di dalam persidangan. Menurut penulis, kesalahan juga terletak pada jenis surat dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum, karena menggunakan surat dakwaan subsidairitas yang pada dasarnya bersifat alternatif, hal ini mengandung makna apabila salah satu dakwaan telah berhasil dibuktikan, maka dakwaan yang lain sudah tidak perlu lagi untuk dibuktikan. Selanjutnya penulis akan menguraikan unsur-unsur Pasal yang dikenakan untuk pelaku sebagai berikut:

Unsur-unsur Pasal 338 KUHP:

1) Barang siapa;

Yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya itu. Subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggungjawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*) yang dalam doktrin pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*”.

Di persidangan Penuntut umum telah menghadapi seseorang bernama BAYA alias NURBAYA Binti Wa'MINU dan menurut pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan penuntut umum sehingga bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut umum, sehingga tidak terjadi *error in persona*. Bahwa dari pemeriksaan dipersidangan ternyata Terdakwa adalah mampu menjawab setiap pertanyaan dan merespon segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, dengan baik dan benar sebagaimana layaknya orang pada umumnya dan lagi pula tidak diperoleh fakta yang menunjukkan Terdakwa tidak mampu secara fisik dan psikis untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa kemudian apakah Terdakwa terbukti selaku pelaku tindak pidana yang didakwakan, adalah tergantung dari apakah perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur delik yang bersangkutan.

2) Dengan sengaja;

Bahwa kesengajaan, sengaja atau yang disebut dengan *opzet* berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau *dolus intent opzet*. Tetapi *Memorie van Toelichting* (Memori Penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum.

Dalam *Crimineel Wetboek* (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana) tahun 1809 dijelaskan pengertian, "Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang". Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, kesengajaan terjadi dalam 3 (tiga) tingkatan yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai tujuan, berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari

maksud atas tujuan dan pengetahuan dari si pelaku atau
Terdakwa;

- b. Kesengajaan dengan kesadaran atau keharusan yang menjadi sandaran terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu, dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti terjadi;
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan yang menjadi sandaran adalah sejauh mana pengetahuan atas kesadaran terdakwa tentang atau akibat terlarang yang mungkin akan terjadi.

Adapun yang dimaksud dengan sengaja (*dolus*) merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*) yang mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan yang dilakukan terdakwa. Berdasarkan sifat kesengajaan ada 2 kategori yaitu *dolus malus* dimana pada saat seseorang melakukan suatu tindak pidana, tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya itu tetapi juga menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana. Yang kedua adalah *kleurloos begrip* dimana dalam hal seseorang melakukan tindak pidana tertentu cukuplah jika (hanya) dengan tindakannya. Tidak disyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang. Sifat kesengajaan jenis kedua ini lah yang dianut dalam hukum pidana Indonesia;

Menurut **PAF. Lamintang**, seorang pelaku dapat dianggap sebagai telah melakukan kejahatan dengan sengaja apabila ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya itu sendiri atau dengan perkataan lain si pelaku menghendaki adanya akibat dari perbuatan yang dilakukannya.¹

Bahwa dari pengertian kesengajaan tersebut menurut doktrin ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*) yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);
- b. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidsbewuszijn*);
- c. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bijmogelijkheidsbewuszijn*); dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang terlarang, tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu, yaitu :
 1. Pada kesengajaan sebagai maksud, pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya;
 2. Pada kesengajaan sebagai kepastian, pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;

¹ PAF. Lamintang, *op.cit.* 269.

3. Pada kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendaknya;

Bahwa jika dihubungkan arti “dengan sengaja” diatas didapati kenyataan bahwa pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa NURBAYA BIN WA'MINU adalah suatu perbuatan yang dikehendaknya, hal ini dapat dilihat dari tindakan Terdakwa yang memukul korban dengan menggunakan balok secara berulang-ulang dibagian leher dan kepala korban hingga meninggal. Hal ini disebabkan karena Terdakwa merasa jengkel atau emosi atas tuduhan korban yang mengatakan Terdakwa berselingkuh dengan pacar korban.

Bahwa kehendak dan pengetahuan akan hubungan antara perbuatan dengan akibat yang akan muncul sudah diketahui oleh Terdakwa sebelum melakukan perbuatannya itu atau setidaknya pada saat memulai perbuatan tersebut, oleh karena itu maka unsur kedua ini majelis hakim berpendapat telah terpenuhi.

3) Menghilangkan nyawa orang lain

Unsur dengan Sengaja dalam unsur kedua ini tidak lepas kaitannya dengan unsur menghilangkan nyawa orang lain, sebab didalam unsur dengan sengaja harus ada tujuan yang hendak dicapai dan dalam perkara ini tujuan yang hendak dicapai adalah hilangnya jiwa atau nyawa seseorang, maka oleh karena itu Majelis

Hakim akan terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang menghilangkan jiwa atau nyawa orang lain;

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi yaitu:

1. Adanya wujud perbuatan;
2. Adanya suatu kematian;
3. Adanya hubungan sebab dan akibat (*causal verband*) antara perbuatan dan akibat kematian;

Bahwa mengenai wujud perbuatan, dapat dilihat dalam bentuk gerakan dari sebagian anggota tubuh pada saat melakukan perbuatan tersebut. Dalam hal ini, dipersidangan didapati fakta bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan dengan cara memukulkan balok ke bagian leher dan kepala korban dengan berkali-kali hingga memastikan korban sudah tidak berdaya lagi. Setelah memastikan korban meninggal, Terdakwa selanjutnya menarik tubuh korban menggunakan sarung ke dalam Ra'bang (kandang ayam) dan menggali lubang di dalam kandang tersebut yang selanjutnya mengubur jasad korban. Dari perbuatan Terdakwa tersebut telah nyata bahwa tindakan yang dilakukan telah dihendaki untuk terjadi.

Bahwa mengenai adanya kematian, dipersidangan terungkap bahwa korban DIAH BINTI WA'DALE mengalami luka-luka dibagian anggota tubuh sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia,

sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Makassar Nomor : 07-Mt/V/2015/Forensik tertanggal 25 Mei 2015 yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. MAULUDDIN M, SP.F, yang pada pokoknya menerangkan bahwa korban DIAH BIN WA'DALE mengalami beberapa luka di anggota tubuhnya dibagian intravital pada kepala belakang dengan ukuran 5,6 cm x 3,5 cm, luka memar intravital pada dahi kanan dengan ukuran 5,5 cm x 4,3 cm, luka memar intravital pada leher kanan dengan ukuran 4,5 cm x 4,1 cm, luka memar intravital pada dada kiri dengan ukuran 7,5 cm x 4,5 cm, luka memar intravital pada lengan atas kanan dengan ukuran 5,5 cm x 3,5 cm. Hal ini lah yang mengakibatkan korban meninggal dunia, dengan demikian mengenai kematian korban telah nyata terungkap di persidangan.

Bahwa mengenai hubungan *causal verband* antara wujud perbuatan dengan kematian korban, dalam literature hukum pidana dikenal adanya beberapa teori seperti teori syarat *condition sine qua non* atau teori khusus, dan lain-lain. Akan tetapi untuk memberikan pegangan kiranya dapat dijadikan landasan dalam menentukan mengenai hubungan *causal verband* adalah *arrest Hoog Military Gerechtschof* tanggal 8 Februari 1924 yang menyatakan "sebab dari akibat dilihat dari adanya hubungan langsung antara perbuatan dengan akibat".

Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa NURBAYA BIN WA'MINU telah mengakibatkan hilangnya nyawa korban DIAH BIN WA'DALE, sehingga terhadap unsur ini Penulis berpendapat telah terpenuhi.

Berdasarkan penjelasan Penulis di atas maka dapat dilihat dan disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa memang benar telah memenuhi unsur-unsur yang didakwakan Penuntut Umum dan terbukti menurut hukum. Dan berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan telah diperhadapkan di persidangan juga semakin memperkuat untuk menyatakan Terdakwa bersalah atas perbuatannya.

B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dan Pencurian (*Concursus Realis*).

Putusan Hakim merupakan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim. Oleh karena itu, tentu saja Hakim membuat keputusan harus memperhatikan segala aspek, mulai dari perlunya kehati-hatian baik yang bersifat formil maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya.

Pertimbangan Hakim terhadap terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu:

- a. Dakwaan primair : melanggar ketentuan Pasal 339 KUHP;
- b. Dakwaan subsidair : melanggar ketentuan Pasal 338 KUHP;
- c. Dakwaan lebih subsidair: melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Dakwaan Kedua: melanggar ketentuan Pasal 365 ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebanyak 11 (sebelas) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti surat yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada Hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 sekitar pukul 07.00 wita Kampung Bisei, Desa Pattalassang, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep. tepatnya bawah kolong rumah Tuo Binti Wa'Dalle telah ditemukan mayat seorang perempuan yang diketahui bernama Diah Binti Wa'Dalle.
2. Bahwa benar yang pertama kali menemukan mayat Diah adalah Tou Binti Wa'dalle;
3. Bahwa benar Pr. Diah adalah adik dari saksi Tuo Binti Wa'Dalle dan saksi BAHARUDDIN Bin Wa' Dalle.
4. Bahwa benar kejadian penemuan mayat berawal saat saksi Tuo Binti Wa'Dalle sedang membersihkan gudang/ Ra'bang dibawah kolong rumahnya kemudian saksi Tuo Binti Wa'Dalle mencium bau busuk sehingga saksi Tuo Binti Wa'Dalle memindahkan karung-karung yang berisi arang dan kotoran ayam yang tersusun bertingkat ke luar Ra'bang dan setelah karung karung tersebut saksi pindahkan saksi melihat ada gumpalan tanah di bawah tumpukan karung dan bau busuk makin keras tercium;
5. Bahwa benar setelah dilakukan penggalian oleh anggota Polisi pada Gumpalan tanah dalam Ra'bang ternyata yang ditemukan

adalah sesosok mayat manusia dimana mayat yang ditemukan dikenali sebagai Pr. DIAH Binti WA'DALLE dari sarung dan baju yang dipakai adalah baju dan sarung dari Pr Diah;

6. Bahwa benar mayat Diah saat ditemukan sudah dalam keadaan membusuk dan tidak dapat dikenali lagi wajahnya;
7. Bahwa benar saat ditemukan mayat Diah Barang barang yang ada di dalam Ra'bang adalah 7 (tujuh) karung kotoran ayam, 3 (tiga) karung arang, potongan seng, sebilah bambu, dan cangkul;
8. Bahwa benar Pr. Diah sehari-hari tinggal bersama-sama dengan saksi Baharuddin namun setiap pagi Pr. Diah datang kerumah saksi Tuo Binti Wa'Dalle untuk memberihkan rumah dan sekaligus berkebun dimana kebunnya berada di belakang rumah saksi Tuo Binti Wa'Dalle;
9. Bahwa benar 1 (satu) bulan sebelum mayat Diah ditemukan Diah dinyatakan hilang;
10. Bahwa benar kondisi rumah saksi Tuo Binti Wa'Dalle tempat mayat Diah ditemukan, tidak ada tetangga di samping kiri dan kanan hanya ada tetangga yang berada di depan rumah namun jaraknya cukup jauh dan tidak dapat melihat langsung keadaan rumah saksi Tuo Binti Wa'Dalle dari jarak tersebut;
11. Bahwa benar Pr. Diah memiliki perhiasan emas dan Pr. Diah sering memakai perhiasan berupa kalung 40 (empat puluh) gram, anting, dan cincin;
12. Bahwa benar selain memiliki perhiasan emas Pr. Diah juga memiliki simpanan atau investasi berupa uang dan emas ringgit di Toko Emas milik Puang Bahar;
13. Bahwa benar yang mengetahui kalau Pr Diah memiliki simpanan atau Investasi pada Puang bahar adalah saksi Tuo Binti Wa'Dalle, saksi Baharuddin, saksi Tahir Bin Najong, saksi Nurlia, saksi Sainuddin dan Terdakwa Baya.
14. Bahwa benar adapun jumlah simpanan milik Diah yang diinvestasikan kepada Puang Bahar adalah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) rupiah;
15. Bahwa benar Terdakwa Baya pernah datang menemui Puang Bahar sebanyak 2 (kali) dan mengaku bernama Ida anak dari Tuo Binti Wa'dalle;
16. Bahwa benar terdakwa datang menemui Puang Bahar dengan membawa Nota simpananan milik Diah dan mengambil uang milik Diah;
17. Bahwa benar setelah mayat Diah ditemukan saksi Tuo pernah mendatangi Puang bahar dan menanyakannya perihal simpanan Diah yang ada pada Puang Bahar dimana puang Bahar memberitahukan kalau pernah ada orang yang mengaku anak saksi Tuo yang bernama Ida datang untuk mencairkan atau menarik uang yang disimpan Diah sebanyak 2 (dua) kali;

18. Bahwa benar saksi Tuo pernah mendatangi Puang Bahar sambil membawa anak saksi yang bernama Ida dan menanyakan apa benar Ida yang pernah datang untuk mencairkan uang adalah Ida anak saksi dan setelah Puang Bahar diperlihatkan orang yang bernama Ida oleh saksi Tuo, Puang Bahar mengatakan bahwa bukan perempuan ini yang datang untuk mengambil uang investasi Diah;
19. Bahwa benar selain saksi Tuo, saksi Baharuddin juga pernah datang menemui Puang Bahar sebanyak 2 (dua) kali untuk meminta simpanan uang dan ringgit yang di investasikan Diah yaitu yang pertama sewaktu Diah dinyatakan hilang dan kedua setelah mayat Diah ditemukan.
20. Bahwa benar Diah menghilang sekitar bulan April tahun 2015 atau sekitar 1 (satu) bulan sebelum mayat Diah ditemukan di dalam Ra'Bang di bawah kolong rumah Tuo Binti Wa'Dalle;
21. Bahwa benar 1 (satu) Minggu sebelum Diah hilang, Saksi NURLIA menemani Diah ke pasar untuk mengambil bunga uang disimpannya miliknya pada Puang Bahar;
22. Bahwa benar selain Saksi NURLIA yang pernah menemani saksi Diah ke pasar adalah terdakwa dan saksi Sainuddin juga pernah menemani terdakwa;
23. Bahwa benar Diah pertama kali menginvestasikan uang dan emas miliknya pada saksi Puang Bahar pada Bulan Desember tahun 2014 dengan sistem bagi hasil;
24. Bahwa benar diah datang ke toko emas milik saksi Puang Bahar tiap bulan untuk mencairkan bagi hasil uang simpanannya yaitu sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut pada Bulan Januari, Februari, dan Maret tahun 2015 setiap tanggal 26 setiap bulannya;
25. Bahwa benar Diah mempunyai dompet yang sehari-hari selalu dibawa kemanapun Diah pergi, dimana di dalam dompet tersebut Diah menyimpan uang dan Nota investasi miliknya pada Puang Bahar;
26. Bahwa benar Diah tidak pernah memberikan atau menitipkan dompet miliknya kepada siapa pun;
27. Bahwa benar pada pertengahan bulan April 2015 datang seorang perempuan menemui Puang Bahar di Toko emas milik saksi di Pasar sambil membawa nota Investasi milik Diah yang meminta pencairan atas uang dan ringgit milik Diah;
28. Bahwa benar sebelum datang menemui saksi Puang Bahar seseorang yang mengaku bernama Ida telah menelpon saksi Puang Bahar dan mencari Saksi Puang Bahar di Rumah Toko miliknya namun saat itu Puang Bahar tidak ada sehingga Saksi Puang Bahar janji dengan perempuan yang mengaku bernama Ida untuk menemui saksi Puang Bahar di toko emas milik saksi Puang Bahar di Pasar;

29. Bahwa benar 2 (dua) hari setelah saksi Puang Bahar menerima telepon dan janji untuk bertemu di Pasar, kemudian datang seorang perempuan sambil membawa nota Investasi milik Diah dan ingin meminta simpanan milik korban senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah;
30. Bahwa benar saksi Puang Bahar memberikan uang simpanan milik Diah kepada perempuan tersebut karena perempuan tersebut mengaku bernama Ida sebagai keponakan Diah yang merupakan anak dari Tuo Binti Wa'dalle dan juga perempuan itu membawa dan memperlihatkan kepada saksi Puang Bahar Nota kwitansi bukti penyimpanan simpanan atas nama Diah;
31. Bahwa benar saksi Puang Bahar memberikan uang simpanan milik Diah kepada perempuan yang mengaku bernama Ida pada kedatangan pertama sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dalam bentuk perhiasan emas berupa kalung, cincin, gelang emas senilai hampir Rp. 9.900.000,- (sepuluh juta) rupiah, dan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah untuk menggenapkan nilai totalnya menjadi 10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah;
32. Bahwa benar kedatangan kedua perempuan yang mengaku bernama Ida untuk kedua kalinya sekitar 3 (dua) minggu setelah kedatangan pertama dan saat itu saksi Puang Bahar memberikan uang milik Diah dalam bentuk perhiasan emas berupa kalung, cincin, gelang senilai hampir Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah;
33. Bahwa benar perempuan yang mengaku bernama Ida saat datang pertama kali mengambil uang simpanan milik Diah pada Puang Bahar memberikan alasan kalau Diah membutuhkan uang untuk biaya pengobatan dan operasi dan alasan pada kedatangan kedua mengatakan kalau Diah membutuhkan uang untuk biaya pernikahan;
34. Bahwa benar Terdakwa Baya Alias Nurbaya Binti Wa'minu adalah perempuan yang datang menemui saksi Puang Bahar dan mengaku bernama Ida dengan membawa Nota Kwitansi bukti penyimpanan milik Diah.
35. Bahwa benar saat saksi Sumardi dan beberapa anggota Polisi mendatangi rumah Terdakwa Baya saat itu terdakwa Baya langsung lari dan setelah di lakukan Pengejaran Terdakwa Baya tidak dapat ditemukan;
36. Bahwa benar saksi Sumardi dan beberapa anggota Polisi merasa curiga terhadap sikap Terdakwa Baya yang langsung melarikan diri saat melihat saksi Sumardi dan beberapa anggota Polisi datang sehingga dilakukan pengeledahan di dalam rumah terdakwa Baya dan di lemari dalam kamar milik terdakwa Baya di temukan kwitansi pengambilan emas pada Puang Bahar senilai Rp. 15.800.000,- (lima belas juta delapan ratus

ribu rupiah), surat gadai pada Kantor Pegadaian, serta 2 (dua) buah Handphone;

37. Bahwa benar kwitansi pengambilan emas yang ditemukan dalam lemari kamar terdakwa baya kemudian diperlihatkan kepada Puang Bahar dan Puang mengakui kalau kuitansi itu adalah kwitansi yang diberikannya kepada perempuan yang mengaku bernama Ida yang datang ke toko miliknya beberapa waktu yang lalu;
38. Bahwa benar setelah mendatangi Puang Bahar, saksi Sumardi bersama beberapa anggota Polisi mendatangi suami terdakwa yakni saksi Anwar untuk menanyakan keberadaan terdakwa Baya dan dari informasi suami terdakwa diperoleh informasi bahwa terdakwa Baya berada di Siwa.
39. Bahwa benar saksi Sumardi kemudian bersama-sama dengan beberapa anggota polisi berangkat ke Siwa dengan membawa serta suami terdakwa yaitu saksi Anwar dan langsung menuju ke Pasar Siwa yang mana Terdakwa Baya dan suaminya Saksi Anwar telah janji untuk bertemu melalui SMS dan tidak lama kemudian terdakwa datang dan setelah terdakwa datang saksi dan beberapa anggota polisi mendatangi terdakwa kemudian mengamankan terdakwa serta membawanya mengendarai mobil ke Polsek Siwa lalu ke Polres Pangkep;
40. Bahwa benar saat di Pasar Siwa Terdakwa langsung menangis dan memeluk suaminya saksi Anwar sambil mengatakan saya yang melakukan sebanyak dua kali;
41. Bahwa benar Terdakwa tidak berusaha melarikan diri ketika melihat saksi Sumardi dan dan beberapa anggota polisi mendatangi terdakwa saat di Pasar Siwa;
42. Bahwa benar pada tanggal 16 Mei 2015 sekitar Pukul 22.30 Wita sebelum berangkat ke Siwa terdakwa sempat datang dan menginap di rumah saksi Sunggu di Kampung Bulu Sipong, Desa Bara Batu, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep;
43. Bahwa benar terdakwa saat menginap di Rumah saksi Sunggu memberikan alasan kalau terdakwa akan pergi Ke Siwa untuk mengunjungi kakaknya dimana saat itu terdakwa Baya sempat menceritakan kepada saksi Sunggu kalau ada yang meninggal dan terdakwa yang dituduh;
44. Bahwa benar saat menuju Pangkep, terdakwa dan beberapa anggota Polisi yang membawa terdakwa serta suami terdakwa Anwar sempat singgah di Polsek Siwa dan saat di Polsek Siwa sempat dilakukan tanya jawab oleh anggota Polisi dimana saat itu terdakwa didampingi oleh suaminya mengakui kalau terdakwa telah membunuh Diah;
45. Bahwa benar setelah tiba di Polres Pangkep kemudian dilakukan Introgasi lanjutan kepada terdakwa oleh anggota Polisi dan terdakwa kembali mengakui kalau terdakwa yang telah

membunuh Diah dan menjelaskan bagaimana kronologi kejadian pembunuhan terhadap Diah;

46. Bahwa benar terdakwa memperagakan adegan rekonstruksi dengan lancar mulai dari awal adegan sampai akhir adegan sesuai dengan pengakuan terdakwa pada berita Acara Pemeriksaan penyidik dan tidak pernah keberatan atas adegan-adegan rekonstruksi tersebut;
47. Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) batang potongan kayu ditemukan setelah terdakwa ditangkap dan atas pemberitahuan terdakwa mengenai alat yang digunakan terdakwa untuk membunuh korban Diah barulah barang bukti tersebut di ambil di bawah kolong rumah Tuo;
48. Bahwa benar saksi Sanu dan terdakwa Baya tidak saling kenal, terdakwa hanya tahu dan pernah melihat Saksi Sanu melalui foto dari kamera Handphone Diah saat diperlihatkan oleh Diah;
49. Bahwa benar sebelum mayat Diah ditemukan saksi Sanu bertemu dengan Diah sebanyak 2 (dua) kali dan yang terakhir kali bertemu dengan Diah pada Bulan Maret tahun 2015;
50. Bahwa benar saksi Sanu kenal dengan Nurlia dan pernah bertemu dengan Nurlia di rumah Nurlia saat mengantar Diah ke pasar, sebanyak 2 (dua) kali;
51. Bahwa benar terdakwa membantah semua keterangan yang terdakwa berikan didepan penyidik dengan alasan keterangan terdakwa yang diberikan saat didepan penyidik dalam keadaan diancam, dipaksa dan dipukul oleh penyidik yang bernama H. Ismail dan Firman untuk memberikan keterangan;
52. Bahwa benar terdakwa membantah telah membunuh Diah karena menurut terdakwa yang telah membunuh Diah adalah Sanu;
53. Bahwa benar terdakwa melihat Sanu menyeret Diah masuk ke dalam Ra'bang di bawah Kolong rumah Tuo dan saat itu jarak antara terdakwa dan Sanu adalah 20 meter;
54. Bahwa benar terdakwa tidak melihat bagaimana Sanu membunuh Diah karena terdakwa tidak dapat melihat ke dalam Ra'bang, saat itu terdakwa hanya mendengar suara teriakan dari Diah meminta tolong dan suara pukulan.
55. Bahwa pernah terdakwa pernah beberapa kali datang ke Rumah Tuo namun terdakwa tidak pernah masuk ke dalam Ra'bang tempat mayat Diah di temukan dan tidak tahu barang-barang apa saja yang terdapat dalam Ra'Bang.;
56. Bahwa benar terdakwa bertemu dengan Diah pada hari minggu tanggal 12 April 2015 sekitar pukul 14.00 di pinggir jalan sebelah rumah Diah karena sebelumnya Diah menelpon terdakwa dan meminta untuk datang mengambil kuitansi;

57. Bahwa benar Pada hari Rabu tanggal 15 April 2015 sekitar pukul 06.30 Wita Diah menelpon terdakwa untuk mengambil uang miliknya pada Puang Bahar. Dan sekitar Sekitar pukul 09.00 pagi terdakwa dengan mengendarai sepeda Motor terdakwa mendatangi toko emas Puang Bahar. Dan saat di toko emas puang bahar terdakwa lalu menunjukkan kuitansi yang sebelumnya telah dititipkan Diah kepada saya lalu Puang Bahar dan memberitahu puang bahar kalau Diah meminta uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh) juta rupiah lalu puang bahar menyerahkan kepada terdakwa perhiasan emas berupa kalung, cincin dan gelang, uang 100.000,- (seratus ribu) rupiah dan kuitansi pengambilan;
58. Bahwa benar pada hari Rabu pukul 11.00 wita terdakwa menuju ke Rumah Tuo tempat Diah berada dan berjanji akan bertemu;
59. Bahwa benar pada tanggal 5 Mei 2015 terdakwa datang menemui Puang Bahar untuk mencairkan uang sebagai ganti uang milik terdakwa yang saat itu terdakwa pakai untuk mengenakan uang hasil penjualan emas milik Diah sebesar Rp. 5.000.000.-;
60. Bahwa saat terdakwa datang pada tanggal 5 Mei 2015 puang bahar menyerahkan kepada terdakwa perhiasan emas berupa kalung, cincin, dan gelang senilai Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu) rupiah;
61. Bahwa benar Pada tanggal 7 Mei 2015 terdakwa menggadaikan perhiasan emas berupa kalung, cincin, dan gelang tersebut pada kantor Pengadaian Unit Palampang dan dari menggadaikan perhiasan emas tersebut terdakwa memperoleh uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu) rupiah;
62. Bahwa benar saat menggadaikan Emas pada Kantor Pegadaian Unit Palampang, saat itu yang melayani terdakwa adalah Saksi Essensi Bandaso;
63. Bahwa benar saksi Essensi Bandaso dapat mengenali terdakwa yang telah datang dan menggadaikan perhiasan emas pada kantor pegadaian Unit Palampang setelah melihat dan mencocokkan Foto copy KTP yang diserahkan terdakwa saat itu;
64. Bahwa benar selain pada tanggal 07 Mei 2015, terdakwa juga sebelumnya telah menggadaikan perhiasan emas namun tidak diketahui perhiasan emas berupa apa yang digadaikan karena sudah dilunasi oleh terdakwa;
65. Bahwa benar pada saat di interogasi di Kantor Polres Pangkep, terdakwa mengatakan kalau terdakwalah yang telah membunuh Diah karena waktu itu terdakwa ketakutan karena diancam polisi;
66. Bahwa benar keterangan atau informasi yang terdakwa berikan di berita acara Penyidik adalah keterangan terdakwa sendiri;

67. Bahwa benar saat di periksa di kantor polisi terdakwa memberitahukan keadaan Ra'bang kepada Polisi, barang-barang apa saja yang ada dalam Ra'bang;
68. Bahwa benar terdakwa mengetahui luka yang menjadi penyebab meninggalnya Diah dan memberitahukan kepada Penyidik saat diperiksa kalau Diah meninggal karena akibat dipukul balok kayu pada bagian belakang kepala;
69. Bahwa benar terdakwa tahu luka penyebab Diah meninggal dari mendengar cerita orang-orang yang melihat mayat Diah saat dilakukan;
70. Bahwa benar sebelum Hasil Visum terhadap mayat korban Diah pihak penyidik tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab korban Diah meninggal dunia nanti setelah hasil Visum keluar barulah diketahui penyebab meninggalnya Diah;
71. Bahwa benar hasil Visum atas mayat Diah keluar beberapa hari setelah terdakwa ditangkap dan memberikan keterangan di depan Penyidik;
72. Bahwa benar adapun cara terdakwa menghilangkan nyawa dari korban Diah Binti Wa'Dalle sesuai dengan Berita acara Pemeriksaan di Penyidik dan sesuai dengan adegan pada rekonstruksi adalah dengan cara terdakwa mengambil potongan kayu yang berada di depan Terdakwa lalu Terdakwa mengayunkan potongan kayu tersebut dengan menggunakan kedua tangannya ke arah leher bagian belakang korban Diah sebanyak 1 (satu) kali hingga korban jatuh tersungkur ketanah dimana saat itu korban berusaha untuk berdiri namun pada saat korban hendak berdiri terdakwa kembali memukul korban dengan menggunakan potongan kayu tersebut pada bagian leher hingga korban kembali terjatuh selanjutnya terdakwa kembali melakukan pemukulan terhadap korban secara berulang kali yang mengenai tubuh dan kepala korban;
73. Bahwa benar setelah memastikan korban Diah tidak berdaya kemudian terdakwa menarik korban Diah dengan menggunakan sarung yang saat itu terikat dipinggang korban masuk kedalam gudang/ Ra'Bang yang berada dibawah kolom rumah tersebut, lalu setelah berada didalam gudang kemudian terdakwa mengambil cangkul yang berada dibelakang pintu gudang lalu terdakwa menggali lubang didalam gudang tersebut lalu setelah lubang tersebut jadi dengan ukuran kedalam 50 cm, lebar 60 cm dan panjang 130 cm kemudian terdakwa memasukkan korban kedalam lubang tersebut lalu setelah korban berada didalam lubang kemudian terdakwa menutup lubang tersebut dengan menggunakan tanah hingga lobang tersebut rata kembali selanjutnya terdakwa keluar dari dalam gudang tersebut guna mengambil 5 (lima) karung yang berisikan kotoran ayam yang berada dibagian depan rumah tersebut yang kemudian 5 (lima)

karung tersebut diletakkan diatas timbunan tanah setelah itu terdakwa kembali mengambil 1 (satu) buah karung yang berisi arang yang berada didalam gudang tersebut yang kemudian karung yang berisi arang tersebut diletakkan disamping karung berisi kotoran ayam tersebut;

74. Bahwa benar setelah terdakwa memastikan korban Diah telah tertimbun kemudian terdakwa keluar dari gudang tersebut dan setelah berada diluar terdakwa mengambil tas kecil milik korban yang tersimpan diatas tempat duduk yang kemudian tas tersebut dimasukkan kedalam kantong celana terdakwa lalu terdakwa meninggalkan tempat tersebut menuju kerumahnya dengan mengendarai sepeda motornya;
75. Bahwa benar adapun barang barang yang ditemukan dan dijadikan Barang bukti pada persidangan yaitu; 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) lembar potongan seng, 1 (satu) batang potongan kayu, 1 (satu) batang potongan bambu, 1 (satu) buah bando hitam, 1 (satu) lembar kudung berwarna ungu, 1 (satu) lembar kudung berwarna biru, 1 (satu) lembar kudung berwarna kombinasi biru putih, 1 (satu) buah HP merk Nokia model 6020 type RM-30 berwarna hitam dengan nomor kartu 082348298299, 1 (satu) buah HP merk Nexian NX-T901 M-IMEI: 353256041407298, S-IMEI: 353256041927493 berwarna putih, 7 (tujuh) karung berisi kotoran ayam, 4 (empat) karung berisi arang, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FIZ R warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor mesin 4WH-437400, saksi hanya mengenali barang bukti berupa 1 (satu) lembar nota penyimpanan 1 (satu) buah ringgit pesos dan uang Rp. 10.000.000,- tertanggal 26 Desember 2014 dengan nilai Rp. 30.000.000,-, 1 (satu) lembar nota penyimpanan 1 (satu) buah ringgit pesos dan uang Rp. 10.000.000,- tertanggal 15 April dengan nilai Rp. 20.000.000,-, 1 (satu) lembar nota pengambilan 2 (dua) buah gelang dan 1 (satu) buah cincin senilai Rp. 4.200.000,-, 1(satu) lembar nota sisa uang yang tersimpan senilai Rp. 15.800.000,- tertanggal 5 Mei 2015, 1 (satu) lembar surat bukti kredit pegadaian No. 11268-15-01004036-6 dengan barang jaminan satu gelang perhiasan emas 16 karat, satu buah gelang emas 12 karat dan satu buah cincin emas 14 karat dengan nilai uang pinjaman sebesar Rp. 2.500.000,-, 1 (satu) buah gelang emas 16 karat, 1 (satu) buah gelang emas 12 karat, 1 (satu) buah cincin emas 14 karat;
76. Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum RS. Bhayangkara Makassar Nomor: 07-Mt/V/2015/Forensik tertanggal 25 Mei 2015 yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. MAULUDDIN. M, SP.F, dimana dalam pemeriksaan terhadap jenazah korban DIAH Binti WADALLE dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

a. anatologi Mayat:

- Kaku mayat : Tidak ada
- Lebam mayat : tidak ada
- Pembusukan lanjut : ada, sebagian kulit mengering dan mengelupasan;

b. Perlukaan:

- Ditemukan 1 (satu) luka memar intravital pada kepala belakang dengan ukuran 5,6 cm x 3,5 cm;
- Ditemukan 1 (satu) luka memar intravital pada dahi kanan dengan ukuran 5,5 cm x 4,3 cm;
- Ditemukan 1 (satu) luka memar intravital pada leher kanan dengan ukuran 4,5 cm x 4,1 cm;
- Ditemukan 1 (satu) luka memar intravital pada dada kiri dengan ukuran 7,5 cm x 4,5 cm;
- Ditemukan 1 (satu) luka memar intravital pada lengan atas kanan dengan ukuran 5,5 cm x 3,5 cm;

c. Tanda tanda asfiksia :

- Peteki (bintik pendarahan) pada Selaput Kelopak Mata dalam: tidak dapat Dinilai;
- Kebiruan (sianosis) pada bibir : tidak dapat dinilai;
- Kebiruan (sianosis) pada kuku jari tangan dan kaki : tidak dapat dinilai.

d. Bedah mayat :

- Rongga kepala: Pendarahan pada daerah otak besar (Epidural bleeding) dan penekanan batang otak (herniasi);
- Rongga dada : Retak pada tulang iga kiri 4, 5 dan 6;
- Rongga perut : tidak ada kelainan;

Dengan kesimpulan:

- Telah diperiksa satu korban mati berjenis kelamin perempuan dan berusia dewasa.;
- Perkiraan waktu kematian \pm 1 (satu) bulan dari waktu pemeriksaan.

- Ditemukan luka memar intravital (dialami korban sewaktu masih hidup) pada kepala belakang, dahi kanan, leher kanan, dan lengan atas kanan akibat trauma tumpul;
- Penyebab kematian korban dapat berhubungan dengan cidera kepala berat akibat kekerasan tumpul pada kepala bagian belakang sehingga terjadi pendarahan otak yang beresiko menyebabkan kematian secara langsung dan cepat;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif Subsidiaritas atau dakwaan kombinasi sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dibuktikan sesuai dengan fakta-fakta hukum diatas;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas majelis hakim memilih dakwaan kesatu dari dakwaan Penuntut umum untuk di buktikan dan oleh karena dakwaan kesatu berbentuk subsidiaritas maka terlebih dahulu akan dibuktikan dakwaan primair yakni melanggar Pasal 339 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;
3. Unsur Diikuti, disertai, atau di dahului dengan tindak pidana dan dilakukan dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan perbuatan itu, atau jika tertangkap tangan untuk melepaskan diri sendiri atau sekutunya daripada pidana, atau supaya barang yang didapatnya dengan melawan hukum tetap ada dalam tangannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggungjawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*) yang dalam doktrin pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*”;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum telah menghadapkan seseorang bernama BAYA alias NURBAYA Binti Wa'MINU dan menurut pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan

penuntut umum sehingga bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut umum, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa adalah mampu menjawab setiap pertanyaan dan merespon segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, dengan baik dan benar sebagaimana layaknya orang pada umumnya dan lagi pula tidak diperoleh fakta yang menunjukkan Terdakwa tidak mampu secara fisik dan psikis untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa kemudian apakah Terdakwa terbukti selaku pelaku tindak pidana yang didakwakan, adalah tergantung dari apakah perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur delik yang bersangkutan;

Ad.2 Unsur Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain

Menimbang, bahwa kesengajaan, sengaja atau yang disebut dengan *opzet* berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau *dolus intent opzet*. Tetapi *Memorie van Toelichting* (Memori Penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Dalam *Crimineel Wetboek* (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana) tahun 1809

dijelaskan pengertian,"Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang";

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, kesengajaan terjadi dalam 3 (tiga) tingkatan yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai tujuan, berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atas tujuan dan pengetahuan dari si pelaku/Terdakwa;
- b. Kesengajaan dengan kesadaran atau keharusan yang menjadi sandaran terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu, dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti terjadi;
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan yang menjadi sandaran adalah sejauh mana pengetahuan atas kesadaran terdakwa tentang atau akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan sengaja (*dolus*) merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*) yang mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan yang dilakukan terdakwa. Berdasarkan sifat kesengajaan ada 2 kategori yaitu *dolus malus* dimana pada saat seseorang melakukan suatu tindak pidana, tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya itu tetapi juga menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan

pidana. Yang kedua adalah *kleurloos begrip* dimana dalam hal seseorang melakukan tindak pidana tertentu cukuplah jika (hanya) dengan tindakannya. Tidak disyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang. Sifat kesengajaan jenis kedua ini lah yang dianut dalam hukum pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa menurut **PAF. Lamintang**: “seorang pelaku dapat dianggap sebagai telah melakukan kejahatan dengan sengaja apabila ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya itu sendiri atau dengan perkataan lain si pelaku menghendaki adanya akibat dari perbuatan yang dilakukannya” (lihat : Drs. PAF. Lamintang : Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, halaman 269);

Bahwa dari pengertian kesengajaan tersebut menurut doktrin ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*) yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);
- b. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidsbewuszijn*);
- c. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bijmogelijkheidsbewuszijn*); dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang terlarang, tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu, yaitu:

- 1) Pada kesengajaan sebagai maksud, pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya;
- 2) Pada kesengajaan sebagai kepastian, pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;
- 3) Pada kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;

Menimbang, bahwa adapun pengertian menghilangkan nyawa orang lain adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan tidak berfungsinya lagi fungsi-fungsi kehidupan seseorang atau disebut juga dengan kematian atau matinya seseorang, dan bagaimana cara menghilangkan tidak dirumuskan dalam Pasal ini, hanya akibat dari perbuatan terdakwa itu menimbulkan hilangnya nyawa/ jiwa orang lain dan tidak dapat kembali lagi;

Menimbang, bahwa membahas tentang unsur dengan Sengaja dalam unsur kedua ini tidak lepas kaitannya dengan unsur menghilangkan jiwa orang lain, sebab didalam unsur dengan sengaja harus ada tujuan yang hendak dicapai dan dalam perkara ini tujuan yang hendak dicapai adalah hilangnya jiwa atau nyawa seseorang, maka oleh karena itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang menghilangkan jiwa atau nyawa orang lain;

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) terdapat 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi yaitu:

1. Adanya wujud perbuatan;
2. Adanya suatu kematian;
3. Adanya hubungan sebab dan akibat (causal Verband) antara perbuatan dan akibat kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada Hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 sekitar pukul 07.00 wita Kampung Bisei, Desa Pattalassang, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep. Tepatnya di dalam Ra'Bang yang berada di bawah kolong rumah Tuo Binti Wa'Dalle telah ditemukan mayat seorang perempuan yang mana diketahui bernama Diah Binti Wa'Dalle;

Bahwa penemuan mayat Diah Binti Wa' Dalle berawal saat saksi Tuo Binti Wa'Dalle bersama-sama dengan saksi Tahir Bin Najong dan anaknya yang bernama Ida sedang membersihkan rumah miliknya dimana saksi Tuo Binti Wa'Dalle membersihkan bagian gudang/Ra'bang dibawah kolong rumahnya miliknya dan saat membersihkan dalam Ra'bang saksi Tuo Binti Wa'Dalle mencium bau busuk dan karena bau busuk tersebut sehingga saksi Tuo Binti Wa'Dalle kemudian memindahkan karung-karung yang berisi arang dan kotoran ayam yang tersusun bertingkat ke luar Ra'bang dan setelah karung karung tersebut dipindahkan keluar Rabang, saksi Tuo Binti Wa'Dalle melihat ada gumpalan tanah di bawah tumpukan karung karung yang berisi arang dan kotoran ayam tersebut dimana bau busuk semakin keras tercium;

Bahwa karena melihat adanya gumpalan tanah dan bau yang busuk sehingga Tuo Binti Wa'Dalle memberitahu saksi Tahir Bin Najong dan meminta untuk melaporkan kepada pihak kepolisian dan warga masyarakat, dan setelah anggota Polisi datang kemudian dilakukan penggalian pada gumpalan tanah dalam ra'bang tersebut, dan ternyata gumpalan tanah dalam ra'bang tersebut adalah sesosok mayat manusia yang mana mayat tersebut dapat dikenali sebagai Pr. DIAH Binti Wa'Dalle dari sarung dan baju yang dipakai dimana baju dan sarung dari mayat tersebut adalah milik dari Pr Diah Binti Wa'Dalle, yang mana 1 (satu) bulan sebelum mayat Pr. Diah Binti Wa'Dalle di

temukan. Pr. Diah dinyatakan hilang dan tidak diketahui keberadaannya;

Bahwa, setelah mayat Pr. Diah Binti Wa'Dalle ditemukan kemudian oleh saksi SUMARDI dan beberapa anggota polisi melakukan penyelidikan di sekitar lokasi penemuan mayat untuk mengumpulkan informasi dengan menanyai beberapa orang perihal teman teman korban. dan dari penyelidikan tersebut diperoleh informasi bahwa korban Diah Binti Wa'Dalle memiliki teman dekat laki-laki bernama Sainuddin alias Sanu dan setelah diperoleh informasi tersebut oleh saksi SUMARDI dan beberapa anggota Polisi kemudian menuju rumah saksi Sainuddin alias Sanu yang mana dari saksi Sainuddin alias Sanu diperoleh informasi bahwa saksi Nurlia alias Lia merupakan teman dari korban Diah Binti Wa'Dalle. Bahwa dari keterangan saksi Nurlia alias Lia kemudian diperoleh informasi kalau Diah Binti Wa'Dalle memiliki simpanan uang dan emas pada saksi Puang Bahar;

Bahwa setelah memperoleh informasi mengenai simpanan milik Diah Binti Wa'Dalle pada saksi Puang Bahar selanjutnya saksi SUMARDI bersama beberapa anggota Polisi mendatangi saksi Puang Bahar di toko emas miliknya di dalam pasar dan saat ditanyakan kepada saksi Puang bahar mengenai simpanan milik Diah Binti Wa'Dalle, saksi Puang Bahar membenarkan korban Diah Binti Wa'Dalle memiliki simpanan uang dan emas padanya namun beberapa waktu yang lalu ada seorang perempuan yang mengaku bernama Ida anak dari Tuo Binti Wa'dalle telah datang mengambil simpanan tersebut sebanyak 2 (dua) kali;

Bahwa setelah mendengar hal tersebut saksi SUMARDI kemudian memastikan hal tersebut kepada keluarga Diah Binti Wa'Dalle yang mana kemudian diketahui bahwa anak saksi Tuo Binti Wa'Dalle yang bernama Ida tidak pernah datang dan mengambil simpanan milik Diah Binti Wa'dalle pada saksi Puang Bahar karena selama ini tinggal dan berada di Gorontalo dan baru datang 3 (hari) hari sebelum mayat Diah Binti Wa'dalle ditemukan;

Bahwa dari informasi tersebut saksi SUMARDI dan anggota polisin kemudian mengembangkan kasus dan kecurigaan terarah pada perempuan yang mengambil simpanan uang dan emas milik Diah Binti Wa'Dalle pada Puang Bahar dan dari pengembangan tersebut kemudian oleh saksi SUMARDI dan beberapa anggota polisi mendatangi dan mencari informasi dari teman-teman dari korban Diah Binti Wa'Dalle termasuk salah satunya terdakwa Baya alias NURBAYA, dan pada saat akan menemui terdakwa Baya alias NURBAYA di rumahnya terdakwa Baya alias NURBAYA melarikan diri. dan karena merasa curiga melihat terdakwa Baya alias NURBAYA yang melarikan diri

kemudian dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa Baya alias NURBAYA dan di temukan kwitansi pengambilan emas pada Baharuddin, senilai Rp. 15.800.000,- (lima belas juta delapan ratus ribu rupiah), surat gadai, serta 2 (dua) buah Handphone yang mana barang-barang tersebut ditemukan dalam lemari milik Baya alias NURBAYA yang berada dalam kamar terdakwa Baya alias NURBAYA;

Bahwa selanjutnya setelah menemukan barang-barang tersebut yang berupa kwitansi pengambilan emas pada Baharuddin, surat gadai, serta 2 (dua) buah Handphone kemudian diperlihatkan kwitansi tersebut kepada saksi Puang Bahar dan di akui oleh saksi Puang Bahar bahwa kwitansi itu adalah kwitansi yang diberikan oleh saksi Puang Bahar kepada perempuan yang mengaku bernama Ida yang datang ke toko miliknya beberapa waktu yang lalu;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi SUMARDI bersama beberapa anggota Polisi mendatangi suami Terdakwa Baya alias NURBAYA yakni saksi Anwar untuk menanyakan keberadaan terdakwa Baya dan dari suami terdakwa yakni saksi Anwar diperoleh informasi bahwa terdakwa Baya berada di Siwa kemudian saksi SUMARDI bersama-sama dengan beberapa anggota polisi di temani oleh suami terdakwa yakni saksi ANWAR. berangkat ke Siwa dan saat tiba di Siwa pada waktu subuh kemudian saksi SUMARDI dan anggota polisi yang lain beserta suami terdakwa menuju ke Pasar Siwa yang mana sebelumnya suami terdakwa Baya telah janji dengan terdakwa melalui SMS dan tidak beberapa lama kemudian terdakwa datang, saksi SUMARDI dan beberapa anggota polisi kemudian mendatangi terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa dan membawanya ke Polsek Siwa lalu ke Polres Pangkep untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan di depan persidangan terdakwa Baya alias NURBAYA dan penasihat hukumnya telah membantah melakukan perbuatan menghilangkan nyawa dari Diah Binti Wa'Dalle, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa seseorang dapat dijatuhi hukuman apabila ia telah terbukti bersalah dan untuk membuktikan apakah seseorang telah melakukan kesalahan harus didukung dengan alat-alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHP telah disebutkan secara limitatif alat-alat bukti yang sah adalah sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi.
2. Keterangan Ahli.
3. Surat.
4. Petunjuk, dan
5. Keterangan terdakwa.

Berdasarkan Pasal 183 KUHAP, untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana keapad terdakwa harus:

- a. Kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah;
- b. Dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat didepan persidangan terdakwa Baya alias Nurbaya telah membantah atau tidak mengakui kalau terdakwa yang telah menghilangkan nyawa dari korban Diah Binti Wa'Dalle dimana terdakwa mengatakan kalau saksi Sainuddin alias Sanu yang telah membunuh Diah Binti Wa'Dalle dan semua keterangan yang terdakwa berikan didepan penyidik adalah tidak benar karena terdakwa berikan dalam keadaan takut dan terancam;

Menimbang, bahwa oleh karena pada persidangan terdakwa membantah sedangkan pada saat pemeriksaan oleh penyidik polisi sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersangka, terdakwa mengakui telah menghilangkan nyawa korban Diah Binti Wa'Dalle dan Berita Acara Pemeriksaan tersebut telah ditanda tangani oleh terdakwa, oleh karena terdakwa telah membantah Berita Acara Pemeriksaan Penyidik oleh Penuntut umum atas izin dari Majelis Hakim telah menghadirkan Saksi Verbalisan yakni penyidik H. Ismail yang merupakan penyidik yang melakukan pemeriksaan dan mengambil keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun keterangan dari saksi H. Ismail bahwa pada saat penyidikan terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan sebanyak 2 (dua) kali dan pemeriksaan tersebut dilakukan diruang pemeriksaan penyidikan Polres Pangkep dimana sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa oleh saksi yang merupakan penyidik menyampaikan hak-hak tersangka yang salah satunya hak untuk didampingi penasehat hukum namun pada saat itu tersangka/ terdakwa menolak untuk didampingi Penasihat Hukum. Bahwa walaupun terdakwa telah menolak untuk didampingi oleh penasihat hukum, saksi H. Ismail tetap menunjuk Penasihat hukum yang akan mendampingi

terdakwa yakni atas nama ZUL'AIDIN BAGENDA ALI, SH, namun tersangka/terdakwa tetap menolak untuk didampingi Penasihat hukum yang telah saksi H. ISMAIL hadirkan dengan menandatangani Berita Acara Penolakan Untuk didampingi Pengacara/Penasihat Hukum. Bahwa saksi H. ISMAIL pada saat melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa tidak pernah melakukan pengancaman maupun pemukulan terhadap terdakwa. Dimana keterangan terdakwa yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar keterangan yang berasal dari terdakwa sendiri tanpa ada paksaan maupun tekanan dari saksi maupun pihak lain. Dan pada saat dilakukan rekontruksi terdakwa dengan lancar memperagakan setiap adegan dan adegan-adegan yang di peragakan oleh terdakwa sesuai dengan keterangan terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan dan saat rekonstruksi terdakwa tidak pernah keberatan atas adegan-adegan tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa untuk mendukung bantahan terhadap keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan terdakwa di depan penyidik tidak dapat menghadirkan bukti berupa saksi Ade Charge sehingga Majelis Hakim melihat dan menilai bahwa keterangan yang terdakwa berikan di depan penyidik sebagaimana yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar karena selain keterangan dalam Berita Acara tersebut sama dengan Rekonstruksi yang diperagakan oleh terdakwa dan oleh terdakwa sendiri saat ditanyakan di depan persidangan mengakui kalau keterangan yang di berikan di depan penyidik adalah keterangan yang keluar dari mulut terdakwa sendiri dan bukan dari kata-kata yang diucapkan oleh penyidik H. Ismail;

Bahwa keterangan terdakwa yang diberikan didepan penyidik mengenai waktu kejadian pembunuhan terhadap Diah pada hari minggu tanggal 12 April 2015 saling berkesesuaian dengan keterangan saksi Baharuddin Bin Wa'Dalle yang menjelaskan bahwa saksi BAHARUDDIN Bin WA'DALLE terakhir kali bertemu dengan korban pada hari sabtu malam tanggal 11 April 2015 dan korban meninggalkan rumah minggu pagi tanggal 12 April 2015 dan hingga malam hari korban Dian sudah tidak kembali ke rumah saksi BAHARUDDIN Bin WA'DALLE.

Bahwa selain mengenai waktu kejadian pembunuhan terhadap Diah yang terdakwa terangkan pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, keterangan terdakwa mengenai alat yang digunakan oleh terdakwa untuk menghilangkan nyawa Diah dan luka yang menyebabkan Diah meninggal Dunia jika di hubungkan dengan keterangan dari saksi Verbalisan H. Ismail yang menjelaskan bahwa sebelum Hasil Visum terhadap mayat korban Diah keluar tidak ada yang mengetahui secara pasti

penyebab Diah meninggal Dunia dan luka yang dialami oleh Diah, dan keterangan dari saksi Sumardi yang menyatakan Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang potongan kayu nanti setelah terdakwa ditangkap dan atas pemberitahuan terdakwa mengenai alat yang digunakan terdakwa untuk membunuh korban Diah barulah barang bukti tersebut di ambil di bawah kolong rumah Tuo;

Menimbang, bahwa dari uraian uraian diatas Majelis Hakim menilai bahwa keterangan yang terdakwa berikan pada Berita Acara Pemeriksaan penyidik lebih berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan barang bukti sehingga Majelis Hakim akan mengambil alih keterangan dari terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan penyidik mengenai bagaimana Diah Binti Wa'Dalle meninggal Dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang terdakwa berikan di berita acara penyidik adapun cara terdakwa menghilangkan nyawa dari korban Diah Binti Wa'Dalle berawal ketika terdakwa BAYA Alias NURBAYA Binti WA'MINU dengan mengendarai sepeda motor Yamaha FIZ-R warna hitam mendatangi korban DIAH Binti WADALLE dirumah kakak korban yang bernama TOU lalu sesampainya ditempat tersebut terdakwa melihat korban sedang duduk dibawah kolom rumah selanjutnya terdakwa menghampiri korban dimana saat percakapan tersebut terdakwa dituduh oleh korban bahwa terdakwa telah mengganggu pacarnya dan mendorong korban sehingga saat itu terdakwa emosi kemudian terdakwa mengambil potongan kayu yang berada didepannya lalu terdakwa mengayunkan potongan kayu tersebut dengan menggunakan kedua tangannya kearah leher bagian belakang korban sebanyak 1 (satu) kali hingga korban jatuh tersungkur ke tanah dimana saat itu korban berusaha untuk berdiri namun pada saat korban hendak berdiri terdakwa kembali memukul korban dengan menggunakan potongan kayu tersebut pada bagian leher hingga korban kembali terjatuh selanjutnya terdakwa kembali melakukan pemukulan terhadap korban secara berulang kali yang mengenai tubuh dan kepala korban. Bahwa selanjutnya setelah memastikan korban tidak berdaya kemudian terdakwa menarik korban dengan menggunakan sarung yang saat itu terikat dipinggang korban masuk kedalam gudang yang berada dibawah kolom rumah tersebut, lalu setelah berada didalam gudang kemudian terdakwa mengambil cangkul yang berada dibelakang pintu gudang tersebut lalu terdakwa menggali lubang didalam gudang tersebut lalu setelah lubang tersebut jadi dengan ukuran kedalam 50 cm, lebar 60 cm dan panjang 130 cm kemudian terdakwa memasukkan korban kedalam lubang tersebut lalu setelah korban berada didalam lubang kemudian

terdakwa menutup lubang tersebut dengan menggunakan tanah hingga lobang tersebut rata kembali selanjutnya terdakwa mengambil keluar dari dalam gudang tersebut mengambil 5 (lima) karung yang berisikan kotoran ayam yang berada dibagian depan rumah tersebut yang kemudian 5 (lima) karung tersebut diletakkan diatas timbunan tanah setelah itu terdakwa kembali mengambil 1 (satu) buah karung yang berisi arang yang berada didalam gudang tersebut yang kemudian karung yang berisi arang tersebut diletakkan disamping karung berisi kotoran ayam dan setelah terdakwa memastikan korban telah tertimbun kemudian terdakwa keluar dari gudang;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas telah jelas terdakwa Baya alias Nurbaya telah dengan sengaja menghilangkan nyawa Diah Binti Wa'Dalle dimana saat terdakwa dan Diah terlibat adu mulut terdakwa yang tersulut emosi langsung mengambil kayu balok dan memukulkan ke bagian leher dan kepala Diah secara berulang-ulang dimana terdakwa saat memukul leher dan kepala Diah secara berulang-ulang terdakwa telah dapat membayangkan kalau pukulan yang terdakwa berikan kepada Diah menggunakan sepotong balok Kayu ke daerah Vital Diah dapat mengakibatkan Diah meninggal Dunia dan hal tersebut sesuai dengan hasil Visum Et Repertuim RS. Bhayangkara Makassar Nomor: 07-Mt/V/2015/Forensik tertanggal 25 Mei 2015 yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. MAULUDDIN. M, SP.F yang menyatakan Penyebab kematian korban dapat berhubungan dengan cidera kepala berat akibat kekerasan benda tumpul pada kepala bagian belakang sehingga terjadi pendarahan otak yang beresiko menyebabkan kematian secara langsung dan cepat sehingga korban DIAH Binti WADALLE meninggal dunia atas adanya luka yang dialaminya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain telah terbukti;

Ad.3 Unsur Diikuti, disertai, atau di dahului dengan tindak pidana dan dilakukan dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan perbuatan itu, atau jika tertangkap tangan untuk melepaskan diri sendiri atau sekutunya daripada pidana, atau supaya barang yang didapatnya dengan melawan hukum tetap ada dalam tangannya.

Menimbang, bahwa uraian unsur-unsur dari Pasal diatas bersifat alternatif limitatif, yang tidak harus seluruh unsur terpenuhi namun apabila

salah satu uraian dari unsur diatas telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan dan dianggap sudah cukup untuk membuktikan terdakwa bersalah;

Menimbang, bahwa unsur yang ketiga ini merupakan suatu unsur kualifikasi pemberatan dari suatu perbuatan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain atau Pembunuhan;

Bahwa unsur pembunuhan Pasal 338 KUHP (objektif dan subjektif)

Unsur-unsur objektif dalam perkataan diikuti, disertai dan didahului serta ditempatkan antara unsur pembunuhan dengan tindak pidana lain. Unsur-unsur subjektif menunjukkan ada hubungan yang bersifat subjektif (hubungan alam batin petindak) antara pembunuhan dengan tindak pidana lain itu. Hubungan ini terdapat dari unsur atau perkataan dengan maksud :

1. Untuk mempersiapkan tindak pidana lain;
2. Untuk mempermudah pelaksanaan tindak pidana lain;
3. Dalam hal tertangkap tangan ditujukan:
 - Untuk menghindarkan diri sendiri atau orang lain;
 - Untuk memastikan penguasaan benda yang diperolehnya secara melawan hukum (dari tindak pidana lain itu);

Menimbang, bahwa adapun maksud kata diikuti dimaksudkan diikuti kejahatan lain. Pembunuhan itu dimaksudkan untuk mempersiapkan dilakukannya kejahatan lain, Kata disertai dimaksudkan disertai kejahatan lain, pembunuhan itu dimaksudkan untuk mempermudah terlaksananya kejahatan lain itu. Dan Kata di dahului dimaksudkan didahului kejahatan lainnya atau menjamin agar pelaku kejahatan tetap dapat menguasai barang barang yang diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan terdakwa di Berita Acara pemeriksaan penyidik, bahwa terdakwa setelah memastikan korban Diah Binti Wa'Dalle telah tertimbun di dalam ra'bang kemudian terdakwa keluar dari ra'bang/gudang dan mengambil tas kecil milik korban Diah Binti Wa'Dalle yang terdapat di atas tempat duduk di bawah kolong rumah,

kemudian terdakwa memasukkan tas milik Diah Binti Wa'dalle ke dalam kantong celana terdakwa selanjutnya meninggalkan rumah Tuo Binti Wa'dalle menuju rumah dengan mengendarai sepeda motor. Dan beberapa hari kemudian tepatnya pada tanggal 15 April 2015 selanjutnya pada tanggal 15 April 2015 terdakwa dengan membawa nota tersebut mendatangi toko perhiasan emas milik saksi BAHARUDDIN Alias PUANG BAHAR dan meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan bahwa DIAH (korban) sakit keras butuh biaya operasi di Rumah sakit sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), namun pada saat itu saksi BAHARUDDIN Alias PUANG BAHAR tidak memiliki uang tunai sehingga saat itu saksi BAHARUDDIN Alias PUANG BAHAR memberikan perhiasan emas berupa 1 (satu) buah cincin, 1 (satu) buah kalung dan 1 (satu) buah gelang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan mengganti nota investasi milik korban tersebut senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), lalu setelah menerima perhiasan emas tersebut kemudian terdakwa menjual perhiasan emas tersebut kepada penjual emas di Pasar Bonto bila bila yang terdakwa tidak kenal namanya dengan harga Rp. 6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah). Selanjutnya pada tanggal 05 Mei 2015 terdakwa kembali mendatangi toko emas milik saksi BAHARUDDIN Alias PUANG BAHAR dengan membawa nota investasi senilai Rp. 20.000.000,- lalu terdakwa menyampaikan kalau DIAH masih butuh uang untuk biaya operasi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga pada saat itu saksi BAHARUDDIN Alias PUANG BAHAR memberikan perhiasan emas kepada terdakwa senilai Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) lalu mengganti nota investasi yang dibawa oleh terdakwa tersebut dengan nota sisa investasi sebesar Rp. 15.800.000,- (lima belas juta delapan ratus ribu rupiah), lalu setelah menerima perhiasan emas tersebut kemudian terdakwa pada tanggal 07 Mei 2015 menggadaikan perhiasan emas tersebut di Pegadaian Palampang Kab. Pangkep dengan nilai gadai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa dari keterangan terdakwa diatas yang diberikan di depan penyidik saling berkesesuaian dengan keterangan dari saksi Baharuddin alias puang Bahar yang menerangkan bahwa pada pertengahan bulan April 2015 pernah datang seorang perempuan menemui saksi Puang Bahar di Toko emas milik saksi Puang Bahar di Pasar sambil membawa nota Investasi milik Diah yang meminta pencairan atas uang dan ringgit milik Diah dimana perempuan yang datang menemui saksi Puang Bahar saat itu mengaku bernama Ida keponakan dari Diah anak dari Tuo Binti Wa'Dalle.yang mana sebelumnya, saksi Puang Bahar menerima telepon dari seorang perempuan yang mengaku sebagai Ida. Dan menyampaikan kalau dia mencari saksi Puang Bahar di Ruko namun saksi Puang Bahar tidak berada di ruko saat itu lalu perempuan ini juga menyampaikan maksudnya ingin mengambil simpanan milik korban Diah karena korban Diah sedang sakit. Lalu saksi Puang Bahar menyampaikan untuk datang saja ke pasar untuk menemui saksi Puang Bahar di toko emas milik saksi

Puang Bahar dan sekitar 2 (dua) hari setelah saksi Puang Bahar menerima telepon dan janji untuk ketemu di Pasar, kemudian datang seorang perempuan sambil membawa Nota Investasi milik Diah dan ingin meminta simpanan milik korban senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah dan saat itu saksi Puang Bahar memberikan uang simpanan milik Diah kepada perempuan yang mengaku bernama Ida namun tidak dalam bentuk uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tetapi yang saksi Puang Bahar serahkan berupa kalung, cincin, gelang emas senilai hampir Rp. 9.900.000,- (sepuluh juta) rupiah, saksi Puang Bahar juga menyerahkan uang sejumlah 100.000,- (seratus ribu) rupiah untuk mengenakan nilai totalnya menjadi 10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah;

Bahwa setelah memberikan kepada perempuan yang mengaku bernama Ida uang simpanan milik Diah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian saksi Puang Bahar mengambil nota tersebut dan mengganti dengan nota yang baru dengan nilai nominal sisa Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan 2 (dua) minggu setelah datang menemui saksi Puang Bahar untuk mengambil uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perempuan yang mengaku bernama Ida pernah datang lagi menemui saksi Puang Bahar untuk meminta pencairan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah dengan membawa dan menunjukkan kembali kuitansi yang sebelumnya saksi Puang Bahar berikan pada kedatangan pertama. Namun saat itu tidak diserahkan dalam bentuk uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) melainkan diserahkan dalam bentuk perhiasan emas berupa kalung, cincin, dan gelang senilai hampir Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah;

Menimbang, bahwa selain keterangan dari Saksi Baharuddin alias Puang Bahar, keterangan terdakwa juga berkesesuaian dengan keterangan dari saksi Essensi Bandaso juga menerangkan terdakwa Baya datang ke kantor tempat saksi Essensi Bandaso bekerja yaitu kantor Pegadaian Unit palampang pada tanggal 7 Mei 2015, pada saat itu terdakwa datang untuk menggadaikan perhiasan berupa 1 (satu) gelang rantai ditaksir perhiasan emas 16 karat berat 4.1/4.1 gram, 1 (satu) cincin hias ditaksir perhiasan emas 14 karat berat 0.98/0.98 gram dan 1 (satu) gelang keroncong ditaksir perhiasan emas 12 karat berat 5.0/5.0 gram. Dan adapun Nilai taksiran dari perhiasan emas berupa 2 (dua) gelang dan 1 (satu) cincin yang senilai 2.723.957 (dua juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu) rupiah dan pinjaman yang diberikan kepada terdakwa saat itu sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu) rupiah;

Bahwa saksi Tuo Binti Wa'Dalle, saksi Baharuddin dan saksi Nurlia alias Lia juga menerangkan bahwa benar Diah memiliki investasi pada Puang Bahar sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dimana nota Investasi tersebut Diah simpan di dalam Dompot miliknya yang mana dompet tersebut selalu di bawa oleh Diah kemanapun Diah pergi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Baharuddin alias Puang Bahar dan saksi Essensi Bandaso diatas dikuatkan dengan barang bukti

yang ditemukan di dalam Lemari rumah terdakwa Baya yaitu berupa 1 (satu) lembar surat bukti kredit pegadaian No. 11268-15-01004036-6 dengan barang jaminan satu gelang perhiasan emas 16 karat, satu buah gelang emas 12 karat dan satu buah cincin emas 14 karat dengan nilai uang pinjaman sebesar Rp. 2.500.000,-.1 (satu) lembar nota penyimpanan 1 buah ringgit peso dan uang Rp. 10.000.000,- tertanggal 26 Desember 2014 dengan nilai Rp. 30.000.000,-.1 (satu) lembar nota penyimpanan 1 buah ringgit pesos tertanggal 15 April 2015 dengan nilai Rp. 20.000.000,-.1 (satu) lembar nota pengambilan 2 buah gelang dan 1 buah cincin senilai Rp. 4.200.000,-;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas terdakwa telah jelas setelah menguburkan Diah terdakwa kemudian mengambil Dompot milik Diah yang mana didalam dompet tersebut terdapat Nota Investasi milik Diah pada Puang Bahar yang selanjutnya terdakwa mencairkan uang investasi Diah pada puang bahar sebanyak 2 (dua) kali dengan nilai yang dicairkan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dalam bentuk perhiasan emas dan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya perhiasan emas tersebut ada yang terdakwa jual dan ada juga yang terdakwa Gadaikan pada kantor pegadaian Unit Palampang namun perbuatan terdakwa tersebut menurut majelis hakim bukanlah perbuatan yang essensinya dimaksudkan dalam unsur diatas yang mana terdakwa mengambil Dompot milik Diah yang saat itu terdapat di tempat duduk yang sebelumnya diduduki Diah karena dimaksudkan terdakwa selain untuk menghilangkan jejak Diah, didalam dompet tersebut terdapat Nota Investasi Diah pada Puang Bahar. dan perbuatan terdakwa yang menghilangkan nyawa Diah bukanlah karena adanya niat awal terdakwa untuk mengambil dompet Diah melainkan karena terdakwa merasa emosi terhadap perkataan Diah sehingga terdakwa memukul Diah berkali-kali pada bagian leher dan kepala menggunakan balok kayu yang mengakibatkan Diah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim unsur diatas tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 339 KUHP dalam dakwaan pertama primair yaitu Unsur Diikuti, disertai, atau di dahului dengan tindak pidana dan dilakukan dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan perbuatan itu, atau jika tertangkap tangan untuk melepaskan diri sendiri atau sekutunya daripada pidana, atau supaya barang yang didapatnya dengan melawan hukum tetap ada dalam tangannya tidak terpenuhi sehingga Majelis Hakim berpendapat oleh karena salah satu unsur dari dakwaan pertama Primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, oleh karenanya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan pertama Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan pertama subsidair penuntut Umum yaitu Pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa

2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur Barang siapa dan unsur Dengan sengaja menghilangkan Nyawa orang lain diatas yang telah dipertimbangkan sebelumnya dalam dakwaan pertama Primair dan dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum oleh Majelis Hakim, maka menurut majelis Hakim pertimbangan tersebut akan diambil alih dan diberlakukan secara mutatis mutandis terhadap pertimbangan unsur barang Siapa dan unsur dengan sengaja Menghilangkan nyawa orang lain pada dakwaan pertama Subsidair ini;

Menimbang, bahwa Unsur barang siapa dan Unsur menghilangkan nyawa orang lain pada dakwaan kesatu Primair telah dapat dibuktikan sehingga terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sesuai Pasal 338 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka dakwaan Kesatu lebih subsidair tidak perlu dibuktikan lagi dan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan penuntut umum dalam dakwaan kesatu Subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pasal 338 KUHP telah terpenuhi makaTerdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: bahwa barang bukti :

- 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) lembar potongan seng, 1 (satu) batang potongan kayu, 1 (satu) batang potongan bambu, 1 (satu) buah bando hitam, 1 (satu) lembar kudung berwarna ungu, 1 (satu) lembar kudung berwarna biru, 1 (satu) lembar kudung berwarna kombinasi biru putih, 7 (tujuh) karung berisi kotoran ayam, 4 (empat) karung berisi arang; adalah barang bukti yang disita di Rumah saksi Tuo Binti Wa;dalle

sehingga barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada saksi TOU Binti WADALLE;

- 1 (satu) lembar nota sisa uang tersimpan senilai Rp. 15.800.000,- tertanggal 5 Mei 2015, 1 (satu) buah gelang emas 16 karat,, 1 (satu) buah gelang emas, 12 karat, 1 (satu) buah cincin emas 14 karat;

Pada persidangan diketahui kalau simpanan Diah pada Puang bahar adalah uang milik saksi Baharuddin Bin Wa'Dalle diberikan kepada Diah untuk di investasikan. Sehingga barang bukti diatas harus dikembalikan kepada saksi BAHARUDDIN Bin WA'DALLE;

- 1 (satu) lembar surat bukti kredit pegadaian No. 11268-15-01004036-6 dengan barang jaminan satu gelang perhiasan emas 16 karat, satu buah gelang emas 12 karat dan satu buah cincin emas 14 karat dengan nilai uang pinjaman sebesar Rp. 2.500.000,-.
- 1 (satu) lembar nota penyimpanan 1 buah ringgit peso dan uang Rp. 10.000.000,- tertanggal 26 Desember 2014 dengan nilai Rp. 30.000.000,-.
- 1 (satu) lembar nota penyimpanan 1 buah ringgit peso tertanggal 15 April 2015 dengan nilai Rp. 20.000.000,-.
- 1 (satu) lembar nota pengambilan 2 buah gelang dan 1 buah cincin senilai Rp. 4.200.000,-.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah HP merk Nokia model 6020 TYPE RM-30 berwarna hitam dengan nomor kartu 082348298299 milik perm. BAYA Alias Nurbaya Binti Wa'minu;
- 1 (satu) buah HP merk Nexian NX-T901 M-IMEI : 353256041407298, S.IMEI : 353256041927493 berwarna putih milik perm. BAYA Alias NURBAYA Binti WA'MINU;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fiz.R warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor mesin : 4WH-437400;

Adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa sehingga barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada terdakwa BAYA Alias NURBAYA Binti WA'MINU;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan korban Diah Binti Wa'Dalle meninggal dunia;
 - Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
 - Terdakwa selain menyebabkan korban Diah meninggal dunia, terdakwa juga mengambil barang dan uang milik dari korban Diah;
- Hal-hal yang meringankan;

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

1. Amar Putusan

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini, majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana terurai dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BAYA alias NURBAYA Binti Wa'MINU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana 'Pembunuhan yang diikuti atau disertai atau didahului tindak pidana lain" sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan kesatu primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa BAYA alias NURBAYA Binti Wa'MINU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan";

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah cangkul.
- 1 (satu) lembar potongan seng.
- 1 (satu) batang potongan kayu.
- 1 (satu) batang potongan bambu.
- 1 (satu) buah bando hitam.
- 1 (satu) lembar kudung berwarna ungu.
- 1 (satu) lembar kudung berwarna biru.
- 1 (satu) lembar kudung berwarna kombinasi biru putih.
- 7 (tujuh) karung berisi kotoran ayam.
- 4 (empat) karung berisi arang.

Dikembalikan kepada TOU Binti WA'DALLE;

- 1 (satu) lembar nota sisa uang tersimpan senilai Rp. 15.800.000,- tertanggal 5 Mei 2015.
- 1 (satu) buah gelang emas 16 karat.
- 1 (satu) buah gelang emas 12 karat.
- 1 (satu) buah cincin emas 14 karat.

Dikembalikan BAHARUDDIN Bin WA'DALLE;

- 1 (satu) lembar surat bukti kredit pegadaian No. 11268-15-01004036-6 dengan barang jaminan satu gelang perhiasan emas 16 karat, satu buah gelang emas 12 karat dan satu buah cincin emas 14 karat dengan nilai uang pinjaman sebesar Rp. 2.500.000,-;
- 1 (satu) lembar nota penyimpanan 1 buah ringgit peso dan uang Rp. 10.000.000,- tertanggal 26 Desember 2014 dengan nilai Rp. 30.000.000,-.
- 1 (satu) lembar nota penyimpanan 1 buah ringgit pesos tertanggal 15 April 2015 dengan nilai Rp. 20.000.000,-;
- 1 (satu) lembar nota pengambilan 2 buah gelang dan 1 buah cincin senilai Rp. 4.200.000,-;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah HP merk Nokia model 6020 TYPE RM-30 berwarna hitam dengan nomor kartu 082348298299 milik perm. BAYA Alias Nurbaya Binti waminu.
- 1 (satu) buah HP merk Nexian NX-T901 M-IMEI : 353256041407298, S.IMEI : 353256041927493 berwarna putih milik perm. BAYA Alias NURBAYA Binti WA'MINU.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fiz.R warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor mesin : 4WH-437400. Dikembalikan kepada terdakwa BAYA Alias NURBAYA Binti WA'MINU
- .Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkep pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 oleh Rajiah Muis, SH sebagai Hakim ketua Nur Rismayanti, SH dan Andi Imran Makulau, SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Muhammad Tasnim, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkep dengan dihadiri oleh Muhammad Yusuf, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkep di hadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

2. Analisis Penulis

Dalam wawancara tanggal 5 Januari 2017 bertempat di Pengadilan Negeri Pangkajene dengan Ketua Majelis Hakim, Rajiah dan Hakim Anggota, Andi Imran Makkulau mengatakan bahwa dakwaan yang diterima oleh majelis hakim adalah dakwaan subsidair yaitu, Pasal 338 KUHP karena di dalam fakta persidangan hanya tindak pidana pembunuhan saja yang terbukti. Oleh karena itu majelis hakim tidak mengabulkan dakwaan primair dari jaksa penuntut umum yaitu Pasal 339 KUHP. Selanjutnya, Andi Imran Makkulau mengatakan, unsur di dalam Pasal 339 KUHP yang menjadi tujuan utama dari pelaku adalah

menguasai barang milik korban sedangkan unsur menghilangkan nyawa merupakan suatu cara atau metode yang digunakan oleh pelaku untuk memudahkan penguasaan barang yang menjadi tujuan utama pelaku.

Jadi tidak tepat jika terdakwa dikenakan Pasal 339 KUHP, karena tafsiran dari Pasal 339 KUHP yaitu motif utama dari perbuatan adalah menguasai barang sedangkan membunuh adalah cara yang digunakan, dalam artian mengambil barang adalah perbuatan primer dan membunuh adalah perbuatan sekunder. Dalam konteks perkara ini yang menjadi tujuan utama dari terdakwa adalah membunuh korban, sehingga majelis hakim menganggap hanya pembunuhan biasa saja yang terjadi dan memutus terdakwa dengan Pasal 338 KUHP.

Selanjutnya, Andi Imran Makkulau mengatakan bahwa barang milik korban memang berada di tangan terdakwa atau dalam penguasaan terdakwa, akan tetapi tidak dapat dibuktikan bagaimana proses berpindahnya atau beralihnya barang milik korban tersebut apakah secara melawan hukum dalam hal ini terdakwa mencuri atau tidak melawan hukum dalam hal ini mungkin saja sebelumnya terjadi hubungan perjanjian tentang pinjam meminjam barang diantara kedua pihak karena berdasarkan keterangan terdakwa yang mengatakan barang tersebut memang sudah berada dalam penguasannya sebelum korban meninggal dunia. Hal inilah yang menyebabkan unsur pencurian dalam perkara ini menjadi buram (tidak jelas) karena unsur “mengambil” barang oleh pelaku tidak dapat dibuktikan. Dalam mencermati perkara ini, majelis hakim

menganggap kasus ini bukanlah sebagai *concursum realis* karena hanya satu tindak pidana saja yang terbukti yaitu pembunuhan dan tindak pidana pencurian dianggap tidak utuh karena memang benar bahwa barang milik korban berada di dalam penguasaan terdakwa tetapi proses berpindahnya barang tersebut tidak dapat dibuktikan. Sedangkan jika mengacu pada bunyi Pasal 65-66 KUHP yang dikatakan *concursum realis* yaitu seorang melakukan beberapa perbuatan yang tidak ada hubungan satu sama lain, dan yang masing-masing merupakan tindak pidana. Selanjutnya, Rajah menambahkan bahwa memang menjadi hal yang umum jika terjadi perbedaan penafsiran oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum mengenai penerapan Pasal yang dikenakan terhadap pelaku. Tindak pidana pencurian tidak dapat dibuktikan karena tidak didukung oleh fakta-fakta hukum dan kesulitan dari segi pembuktiannya yang dapat membenarkan terjadinya tindak pidana tersebut, sehingga ada keraguan dalam diri majelis hakim untuk menetapkan perkara ini sebagai bentuk gabungan tindak pidana. Dengan demikian karena fakta-fakta hukum dan kesulitan dalam pembuktian yang menyebabkan tindak pidana pencurian tidak dibuktikan di dalam persidangan. Sedangkan tindak pidana pembunuhan memang terbukti secara jelas dan nyata sehingga dalam penjatuhan putusan, majelis hakim memutuskan hanya terjadi pembunuhan biasa saja yakni Pasal 338 KUHP. Lebih lanjut Rajah mengatakan bahwa tidak dipertimbangkannya *concursum realis* dalam perkara ini, karena majelis hakim menganggap bahwa dalam surat dakwaan yang dibuat oleh

Penuntut Umum tidak mencantumkan adanya perbarengan tindak pidana atau *concursum realis* dalam dakwaan tersebut karena surat dakwaan yang digunakan yaitu surat dakwaan subsidairitas yang bersifat alternatif atau pilihan. Seharusnya Penuntut Umum menggunakan surat dakwaan kumulatif jika meyakini bahwa terjadi dua tindak pidana. Rajih juga beralasan bahwa majelis hakim tidak boleh menambahkan atau memperluas dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum dikarenakan adanya Asas dalam KUHP yang mengatakan bahwa hakim tidak boleh mendakwa lebih dari yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum.

Menurut Penulis, dalam kasus ini terdakwa secara jelas, terang, dan terbukti telah melakukan dua tindak pidana secara berbarengan atau sekaligus yakni melakukan tindak pidana pembunuhan dan pencurian akan tetapi *concursum realis* dalam kasus ini seperti tidak diperhitungkan atau dipertimbangkan oleh hakim. Hal ini dapat dilihat dari putusan maupun jawaban hakim pada saat di wawancara. Mengenai pernyataan tentang majelis hakim tidak boleh memutus suatu perkara di luar dari tuntutan Penuntut Umum juga keliru, mungkin hakim tidak mempertimbangkan bahwa terdapat Asas-asas umum dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa Hakim bersifat Aktif, yang artinya hakim boleh memperluas dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum, untuk mendapatkan kebenaran materiil atau kebenaran yang sebenarnya sehingga tercipta keadilan yang seadil-adilnya bagi kedua belah pihak, baik itu keluarga korban maupun terdakwa.

Putusan hakim yang menghukum terdakwa selama 15 (lima belas) tahun penjara dapat dikatakan tidak sesuai pada penilaian-penilaian yang ilmiah. Kasus No. 87/Pid.B/2015/PN.PKJ, merupakan kasus dengan kandungan *concursum realis* di dalamnya. Penulis beranggapan bahwa penjatuhan pidana penjara kepada terdakwa dengan pidana penjara 15 (lima belas tahun) dianggap kurang sesuai mengingat konsekuensi dari *concursum realis* itu sendiri, yang mana dari beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa memiliki ancaman pidana pokok yang sejenis, maka konsekuensinya dari *concursum realis* yang ancaman pidana pokoknya sejenis yakni ancaman pidana terberat ditambah sepertiga.

Selain itu, menurut penulis seharusnya Penuntut Umum dapat menambahkan dakwaannya terhadap tindak pidana mengambil barang milik orang lain karena unsur-unsur dalam Pasal tersebut telah terpenuhi yang didukung oleh keterangan saksi, barang bukti yang ditemukan, dan keterangan terdakwa itu sendiri. Dalam dakwaan yang digunakan oleh Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan menggunakan jenis dakwaan Subsidiaritas. Seharusnya menurut penulis, Penuntut Umum menggunakan jenis dakwaan kumulatif yaitu dakwaan yang terdiri dari beberapa tindak pidana yang berdiri sendiri-sendiri. Namun, berdasarkan hal diatas Majelis Hakim sama sekali tidak menyentuh ketentuan mengenai *concursum realis* . Hal tersebut dapat dilihat selama persidangan, ketentuan mengenai *concursum realis* yang seharusnya juga didakwakan terhadap terdakwa dengan men-junto-kan Pasal kedua

tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dengan ketentuan pidana mengenai *concursum realis* sebagaimana diatur dalam Pasal 67 KUHP, yang seharusnya berdasarkan hal tersebut dapat dijadikan sebagai rujukan Majelis Hakim dalam menentukan dan menilai bahwa perkara ini dapat digolongkan kedalam perbarengan atau gabungan tindak pidana (*concursum realis*). Menurut penulis, sebuah putusan haruslah didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan ilmiah sehingga putusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis, filosofis, dan sosiologis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan hukum pidana materiil dalam putusan No. 87/Pid.B/2015/PN.PKJ. adalah kurang tepat. Di dalam dakwaan tersebut terdapat banyak kekeliruan dikarenakan majelis hakim dalam memutus suatu perkara dianggap kurang cermat dalam memperhatikan kasus ini. Menurut penulis, hanya dakwaan pertama subsidair yaitu Pasal 338 KUHP berupa pembunuhan yang dapat dinyatakan terbukti. Sedangkan jika diperhatikan dengan cermat, seharusnya unsur-unsur di dalam tindak pidana pencurian juga harus dibuktikan di persidangan, karena kasus ini merupakan perbarengan atau gabungan tindak pidana yang terdiri atas dua tindak pidana yaitu pembunuhan dan pencurian. Menurut penulis, ada dua hal yang menjadi kekurangan di dalam putusan pengadilan ini yaitu pertama, surat dakwaan Penuntut umum seharusnya menggunakan surat dakwaan kumulatif, karena di dalam kasus ini ada dua tindak pidana, sedangkan faktanya surat dakwaan yang diajukan Penuntut umum yaitu dakwaan subsidairitas yang sifatnya alternatif. Dakwaan subsidairitas adalah surat dakwaan yang di dalamnya dirumuskan beberapa tindak pidana secara berlapis dimulai dari delik yang paling

berat ancaman pidananya sampai dengan yang paling ringan. Akan tetapi yang sesungguhnya didakwakan terhadap terdakwa dan yang harus dibuktikan di depan sidang pengadilan hanya “satu” dakwaan. Kedua, majelis hakim harus cermat memperhatikan kasus yang ditangani, meskipun pada dasarnya hakim tidak boleh memutus suatu perkara di luar dari tuntutan Penuntut umum, namun ada suatu asas yang berlaku di dalam hukum pidana yaitu hakim bersifat aktif yang artinya hakim diperbolehkan untuk memperluas putusannya jika ada fakta-fakta hukum yang belum dibuktikan demi tercapainya keadilan bagi semua pihak.

2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam putusan No. 87/Pid.B/2015/PN.PKJ. Menurut penulis, pertimbangan hakim yang didasarkan dengan ketentuan dalam Pasal 183 KUHP berupa tiga alat bukti yakni saksi, surat, dan keterangan terdakwa sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa Nurbaya alias Baya Bin Wa'Minu sebagai pelaku tindak pidana tersebut. Akan tetapi dalam mempertimbangkan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut umum, hakim tidak memperhatikan dakwaan kedua yaitu Pasal 365 ayat (3) KUHP yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa berniat untuk memiliki atau menguasai barang milik korban secara melawan hukum dan dalam memudahkan tujuannya, terdakwa melakukan kekerasan pada korban sehingga menyebabkan korban meninggal

dunia. Dalam perkara ini majelis hakim hanya meyakini bahwa tindak pidana yang terjadi hanya tindak pidana pembunuhan saja, sedangkan tindak pidana pencurian tidak dibuktikan di dalam persidangan karena sulitnya membuktikan unsur “mengambil” barang milik korban dan kurangnya fakta-fakta pendukung untuk membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian.

B. Saran

1. Jaksa Penuntut Umum harus teliti dan cermat dalam menyusun surat dakwaan, mengingat surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan atau tidak menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang dihadapkan di muka persidangan. Selain itu, juga harus mempunyai pengetahuan atau ilmu hukum dengan baik, bukan hanya hukum secara formil tetapi juga hukum secara materil agar tidak salah dalam menentukan mana perbuatan yang sesuai dengan unsur yang didakwakan.
2. Hakim tidak serta merta berdasar pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam menjatuhkan pidana, melainkan pada dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim. Hakim harus

lebih peka untuk melihat fakta-fakta apa yang timbul pada saat persidangan, sehingga dari fakta yang timbul tersebut, menimbulkan keyakinan hakim bahwa terdakwa benar dapat atau tidak dipidana. Selain itu dalam menjatuhkan putusan juga harus bisa memberikan hukuman yang sesuai untuk terdakwa berdasar faktor yang memberatkan atau meringankan sehingga menciptakan keadilan di dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence Theory)*. Kencana: Jakarta.
- Adami Chazawi. 2010. *Kejahatan Terhadap Nyawa dan Tubuh*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- _____, 2011. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia: Yogyakarta.
- Andi Zainal Abidin. 2007. *Hukum Pidana 1*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Erdianto Effendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia : Suatu Pengantar*. Refika Aditama: Bandung.
- E. Utrecht. 2000. *Hukum Pidana II*, Pustaka Tinta Mas: Surabaya.
- Leden Marpaung. 2011. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan dan Penyelidikan)*, Cetakan Ketiga. Sinar Grafika: Jakarta.
- Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT. Rineka Cipta: Jakarta
- P.A.F Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- _____, dan Theo Lamintang. 2012. *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Teguh Prasetyo. 2011. *Hukum Pidana*. Raja Grafindo: Jakarta.
- Wahyu Adnan. 2007. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Gunung Aksara: Bandung.

Wirjono Prodjodikoro. 1989. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. PT. Eresco: Bandung.

_____, 2003. *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Aditama: Bandung.

_____, 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi ketiga. Refika Aditama: Bandung.

Yesmil Anwar. 1994. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. Cipta Adya Bakti: Bandung.

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).